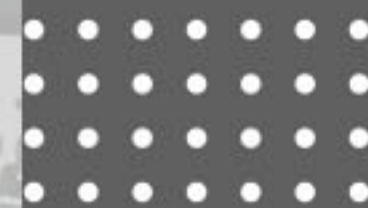


**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

PROVINSI JAWA TIMUR BAG. II





ATANG

YA

SIARAN

PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH
WILAYAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI JAWA TIMUR BAG. II





Peta Pembinaan Provinsi Jawa Timur Bagian II

Jakarta: Bina Praja Press, 2022
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN : 978-623-88657-2-7

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.com
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TIM PENULIS

Pengarah:

Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Penanggungjawab:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Penulis:

1. Diah Ayu Kusumaningrum, S.Si
2. Askin Nur Habibah, S.Si
3. Nuril Fikri Aulia, SE, M.Si

SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri
Kemendagri

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

Drs. Aferi S. Fudail, M.Si

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	3

BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA

A. KABUPATEN PASURUAN	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	6
Aspek Satuan Inovasi Daerah	7
B. KABUPATEN PONOROGO	12
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	12
Aspek Satuan Inovasi Daerah	13
C. KABUPATEN PROBOLINGGO	20
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	21
Aspek Satuan Inovasi Daerah	22
D. KABUPATEN SAMPANG	28
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	29
Aspek Satuan Inovasi Daerah	30
E. KABUPATEN SIDOARJO	38
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	39
Aspek Satuan Inovasi Daerah	40
F. KABUPATEN SITUBONDO	47
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	47
Aspek Satuan Inovasi Daerah	48
G. KABUPATEN SUMENEP	57
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	57
Aspek Satuan Inovasi Daerah	58
H. KABUPATEN TRENGGALEK	68
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	69
Aspek Satuan Inovasi Daerah	70
I. KABUPATEN TUBAN	76
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	77
Aspek Satuan Inovasi Daerah	78
J. KABUPATEN TULUNGAGUNG	85
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	85
Aspek Satuan Inovasi Daerah	86

K. KOTA BATU	93
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	93
Aspek Satuan Inovasi Daerah	94
L. KOTA BLITAR	101
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	101
Aspek Satuan Inovasi Daerah	102
M. KOTA KEDIRI	109
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	109
Aspek Satuan Inovasi Daerah	110
M. KOTA MADIUN	118
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	118
Aspek Satuan Inovasi Daerah	119
N. KOTA MALANG	126
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	126
Aspek Satuan Inovasi Daerah	127
O. KOTA MOJOKERTO	134
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	135
Aspek Satuan Inovasi Daerah	136
P. KOTA PROBOLINGGO	142
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	142
Aspek Satuan Inovasi Daerah	143
Q. KOTA SURABAYA	150
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	151
Aspek Satuan Inovasi Daerah	152
R. KOTA PASURUAN	159
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	160
Aspek Satuan Inovasi Daerah	161
BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI	166

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pasuruan
- Gambar 2 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pasuruan
- Gambar 3 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Pasuruan
- Gambar 4 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pasuruan
- Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pasuruan
- Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Pasuruan
- Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Pasuruan
- Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pasuruan
- Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Pasuruan
- Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan
- Gambar 11. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Ponorogo
- Gambar 12. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Ponorogo
- Gambar 13. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Ponorogo
- Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Ponorogo
- Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Ponorogo
- Gambar 16. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Ponorogo
- Gambar 17. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Ponorogo
- Gambar 18. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Ponorogo
- Gambar 19. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Ponorogo
- Gambar 20. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo

Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo

Gambar 22. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Probolinggo

Gambar 23. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Probolinggo

Gambar 24. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Probolinggo

Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Probolinggo

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Probolinggo

Gambar 27. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Probolinggo

Gambar 28. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Probolinggo

Gambar 29. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Probolinggo

Gambar 30. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Probolinggo

Gambar 31. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Probolinggo

Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Probolinggo

Gambar 33. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sampang

Gambar 34. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sampang

Gambar 35. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sampang

Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sampang

Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sampang

Gambar 38. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sampang

Gambar 39. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sampang

Gambar 40. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sampang

Gambar 41. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sampang

Gambar 42. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sampang

Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sampang

Gambar 44 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sidoarjo

Gambar 45. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sidoarjo

Gambar 46. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sidoarjo

Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sidoarjo

Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sidoarjo

Gambar 49. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sidoarjo

Gambar 50. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sidoarjo

Gambar 51. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sidoarjo

Gambar 52. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sidoarjo

Gambar 53. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo

Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo

Gambar 55 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Situbondo

Gambar 56. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Situbondo

Gambar 57. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Situbondo

Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Situbondo

Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Situbondo

Gambar 60. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Situbondo

Gambar 61. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Situbondo

Gambar 62. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Situbondo

Gambar 63. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Situbondo

Gambar 64. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo

Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo

Gambar 66. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumenep

Gambar 67. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumenep

Gambar 68. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumenep

Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumenep

Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumenep

Gambar 71. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sumenep

Gambar 72. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumenep

Gambar 73. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sumenep

Gambar 74. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumenep

Gambar 75. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep

Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep

Gambar 77. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Trenggalek

Gambar 78. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Trenggalek

Gambar 79. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Trenggalek

Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Trenggalek

Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Trenggalek

Gambar 82. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Trenggalek

Gambar 83. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Trenggalek

Gambar 84. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Trenggalek

Gambar 85. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Trenggalek

Gambar 86. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek

Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek

Gambar 88 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tuban

Gambar 89. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tuban

Gambar 90. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tuban

Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tuban

Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tuban

Gambar 93. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tuban

Gambar 94. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tuban

Gambar 95. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tuban

Gambar 96. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tuban

Gambar 97. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tuban

Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban

Gambar 99 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tulungagung

Gambar 100. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tulungagung

Gambar 101. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tulungagung

Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tulungagung

Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tulungagung

Gambar 104. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tulungagung

Gambar 105. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tulungagung

Gambar 106. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tulungagung

Gambar 107. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tulungagung

Gambar 108. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung

Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung

Gambar 110 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Batu

Gambar 111. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Batu

Gambar 112. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Batu

Gambar 113. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Batu

Gambar 114. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Batu

Gambar 115. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Batu

Gambar 116. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Batu

Gambar 117. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Batu

Gambar 118. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Batu

Gambar 119. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Batu

Gambar 120. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kota Batu

Gambar 121. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Blitar

Gambar 122. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Blitar

Gambar 123. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Blitar

Gambar 124. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Blitar

Gambar 125. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Blitar

Gambar 126. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Blitar

Gambar 127. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Blitar

Gambar 128. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Blitar

Gambar 129. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Blitar

Gambar 130. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Blitar

Gambar 131. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 132. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Kediri

Gambar 133. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Kediri

Gambar 134. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Kediri

Gambar 135. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Kediri

Gambar 136. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Kediri

Gambar 137. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Kediri

Gambar 138. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Kediri

Gambar 139. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Kediri

Gambar 140. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Kediri

Gambar 141. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 142. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Madiun

Gambar 143. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Madiun

Gambar 144. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Madiun

Gambar 145. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Madiun

Gambar 146. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Madiun

Gambar 147. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Madiun

Gambar 148. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Madiun

Gambar 149. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Madiun

Gambar 150. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Madiun

Gambar 151. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Madiun

Gambar 152. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 153. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Malang

Gambar 154. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Malang

Gambar 155. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Malang

Gambar 156. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Malang

Gambar 157. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Malang

Gambar 158. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Malang

Gambar 159. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Malang

Gambar 160. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Madiun

Gambar 161. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Malang

Gambar 162. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Malang

Gambar 163. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 164. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Mojokerto

Gambar 165. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Mojokerto

Gambar 166. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Mojokerto

Gambar 167. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Mojokerto

Gambar 168. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Mojokerto

Gambar 169. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Mojokerto

Gambar 170. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Mojokerto

Gambar 171. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Mojokerto

Gambar 172. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Mojokerto

Gambar 173. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Mojokerto

Gambar 174. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 175. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Probolinggo

Gambar 176. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Probolinggo

Gambar 177. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Probolinggo

Gambar 178. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Probolinggo

Gambar 179. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Probolinggo

Gambar 180. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Probolinggo

Gambar 181. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Probolinggo

Gambar 182. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Probolinggo

Gambar 183. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Probolinggo

Gambar 184. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Probolinggo

Gambar 185. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 186. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Surabaya

Gambar 187. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Surabaya

Gambar 188. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Surabaya

Gambar 189. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Surabaya

Gambar 190. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Surabaya

Gambar 191. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Surabaya

Gambar 192. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Surabaya

Gambar 193. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Surabaya

Gambar 194. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Surabaya

Gambar 195. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Surabaya

Gambar 196. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 197. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Pasuruan

Gambar 198. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Pasuruan

Gambar 199. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Pasuruan

Gambar 200. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Pasuruan

Gambar 201. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Pasuruan

Gambar 202. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Pasuruan

Gambar 203. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kota Pasuruan

Gambar 204. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Pasuruan

Gambar 205. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Pasuruan

Gambar 206. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Pasuruan

Gambar 207. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah
- Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Pasuruan beserta Skor Kematangannya
- Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Ponorogo beserta Skor Kematangannya
- Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Probolinggo beserta Skor Kematangannya
- Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Sampang beserta Skor Kematangannya
- Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Sidoarjo beserta Skor Kematangannya
- Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Situbondo beserta Skor Kematangannya
- Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Sumenep beserta Skor Kematangannya
- Tabel 9. Daftar Inovasi Kabupaten Trenggalek beserta Skor Kematangannya
- Tabel 10. Daftar Inovasi Kabupaten Tuban beserta Skor Kematangannya
- Tabel 11. Daftar Inovasi Kabupaten Tulungagung beserta Skor Kematangannya
- Tabel 12. Daftar Inovasi Kota Batu beserta Skor Kematangannya
- Tabel 13. Daftar Inovasi Kota Blitar beserta Skor Kematangannya
- Tabel 14. Daftar Inovasi Kota Kediri beserta Skor Kematangannya
- Tabel 15. Daftar Inovasi Kota Madiun beserta Skor Kematangannya
- Tabel 16. Daftar Inovasi Kota Malang beserta Skor Kematangannya
- Tabel 17. Daftar Inovasi Kota Mojokerto beserta Skor Kematangannya
- Tabel 18. Daftar Inovasi Kota Probolinggo beserta Skor Kematangannya
- Tabel 19. Daftar Inovasi Kota Surabaya beserta Skor Kematangannya
- Tabel 20. Daftar Inovasi Kota Pasuruan Beserta Skor Kematangannya
- Tabel 21. Capaian Indeks Inovasi Daerah
- Tabel 22. Capaian Variabel Kurang dari 60% Aspek Satuan Inovasi Daerah pada daerah Berpredikat Inovatif di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
- Tabel 23. Rekomendasi Strategi Untuk Meningkatkan Capaian Variabel
- Tabel 24. Capaian Variable Kurang dari 60% Aspek Satuan Inovasi Daerah pada daerah Berpredikat Kurang Inovatif di Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, dan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
- Tabel 25. Rekomendasi Strategi Untuk Meningkatkan Capaian Variabel

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori

Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelembagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY)* 2021, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

B. MANFAAT

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Timur (bagian 2). Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

C. TUJUAN

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

D. RUANG LINGKUP

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Timur (bagian 2) pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Timur (bagian 2) yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

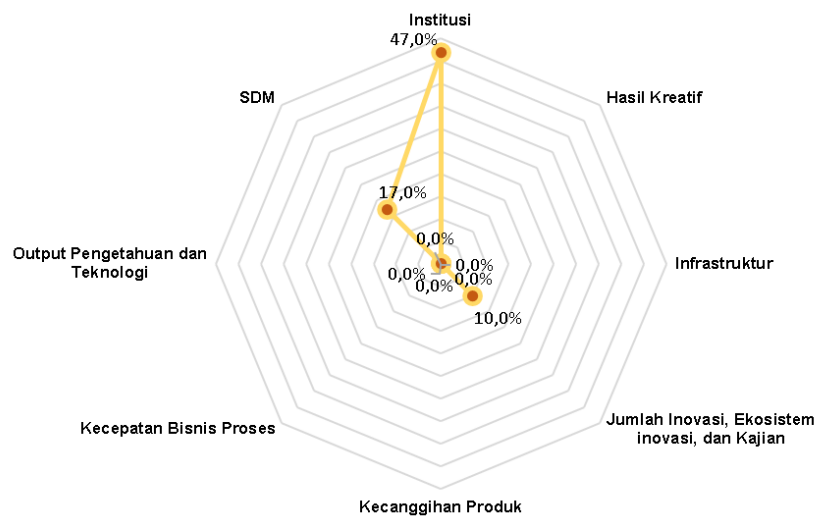
ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
		Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian
	Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi	
	Roadmap SIDA	
	SDM	Nilai IPM
		Penghargaan Bagi Inovator
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
		Kecanggihan Produk
	Online Sistem	
	Kecepatan Inovasi	
	Kecepatan Bisnis Proses	Pedoman Teknis
		Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah

BAB II

***INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN
DAN KLASTER KOTA***

A. KABUPATEN PASURUAN



Gambar 1 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Pasuruan memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 47.00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 10.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



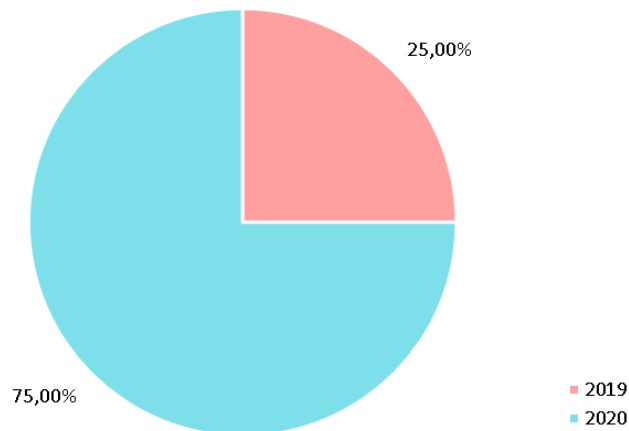
Gambar 2 Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pasuruan

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Pasuruan belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1.957%, dimana nilai tersebut sangat jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya turun sebesar 0.92%. Namun kemungkinan nilai yang diinput dari indikator tersebut tidak sesuai dengan yang diminta oleh sistem aplikasi indeks inovasi daerah. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan dan Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia bernilai 0% karena tidak ada data yang diinput oleh Kabupaten Pasuruan terkait dengan indikator-indikator tersebut. Selanjutnya, indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 0.32%, dimana nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan pada Jumlah Peningkatan PAD sebesar 19.17% dimana angka tersebut jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan kenaikan sebesar 8%. Sedangkan, indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami kenaikan sebesar 96.21% dimana angka tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.45%. Terakhir, untuk indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Pasuruan menunjukkan kenaikan sebesar 8.01%, dimana nilai tersebut ternyata lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

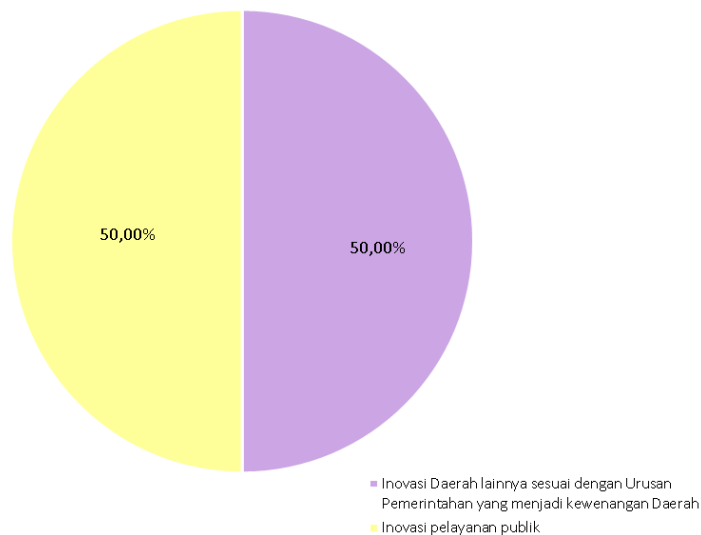
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Pasuruan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pasuruan telah diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 1 (25.00%) inovasi dari 4 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 3 (75.00%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

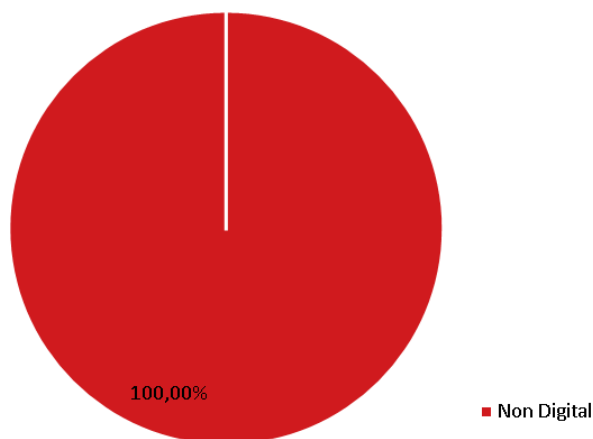


Gambar 4 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan bentuk inovasi, data menunjukkan bahwa sebanyak 2 (50.00%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pasuruan merupakan inovasi dalam bentuk Pelayanan Publik sedangkan sisanya yaitu sebanyak 2 (50.00%) inovasi merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk

inovasi dalam bentuk Tata Kelola Pemerintahan Daerah belum dilaporkan oleh Kabupaten Pasuruan.

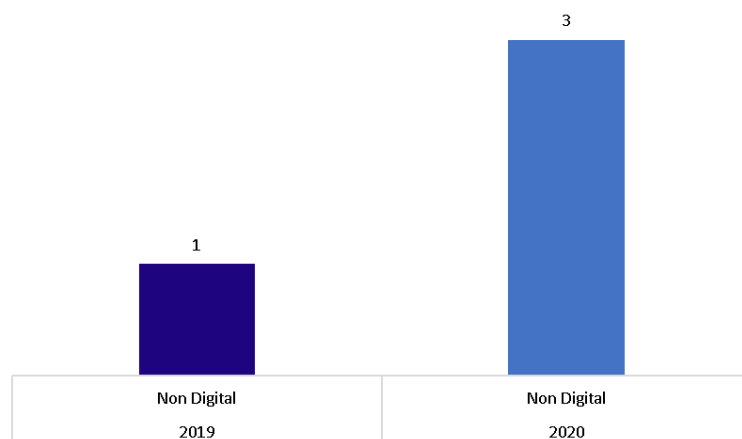
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Pasuruan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 4 (100%) dari 4 inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pasuruan merupakan inovasi non digital, sedangkan untuk jenis inovasi digital dan teknologi belum dilaporkan.

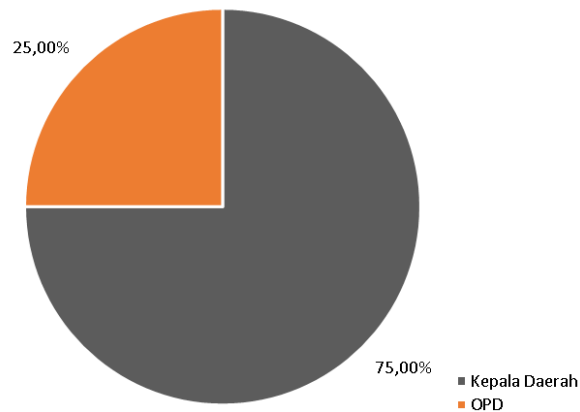
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Pasuruan

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, terutama untuk jenis inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi non digital meningkat dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan hanya sejumlah 1 inovasi kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 3 inovasi. Sedangkan untuk jenis inovasi non digital dan teknologi belum dilaporkan baik pada tahun 2019 maupun 2020.

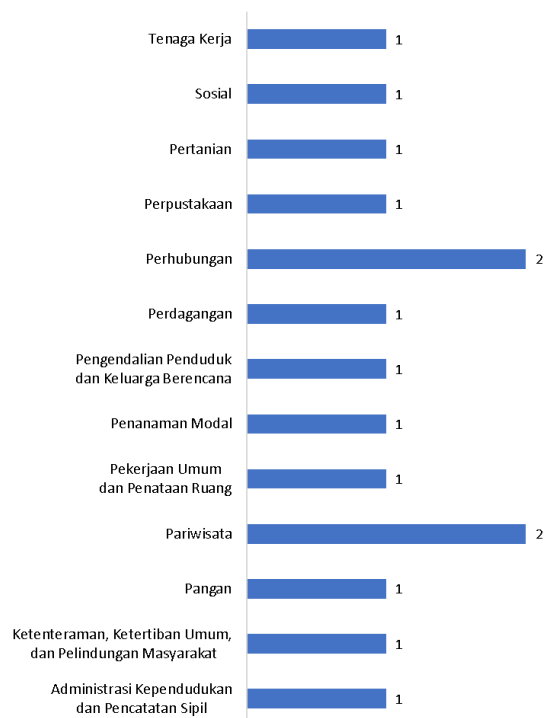
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Pasuruan

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Kepala Daerah dengan rincian 3 (75.00%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah sedangkan sisanya 1 (25.00%) inovasi diinisiasi oleh Perangkat Daerah. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD, dan Masyarakat belum terlaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

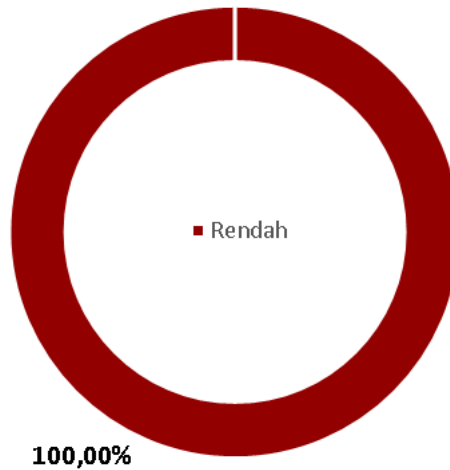


Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Pasuruan

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Pasuruan berdasarkan urusan pemerintahan sudah cukup merata karena mencakup 13 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Urusan

yang paling banyak adalah inovasi pada urusan perhubungan dan pariwisata dengan 2 inovasi dari 4 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 3 (tiga) urusan dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat masing-masing dengan 1 inovasi.

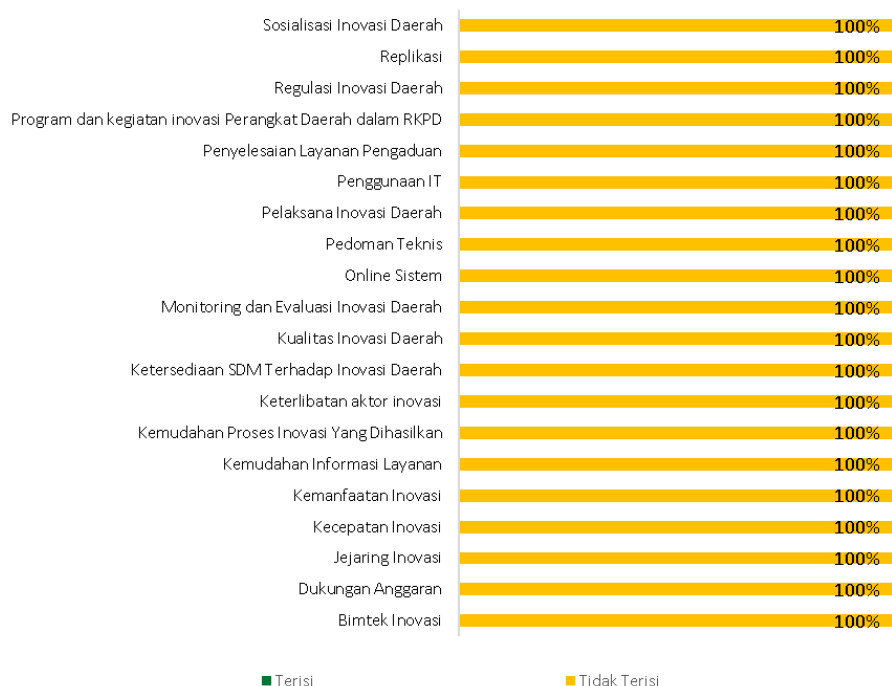
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Pasuruan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pasuruan sejumlah 4 inovasi memiliki skor kematangan yang rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan

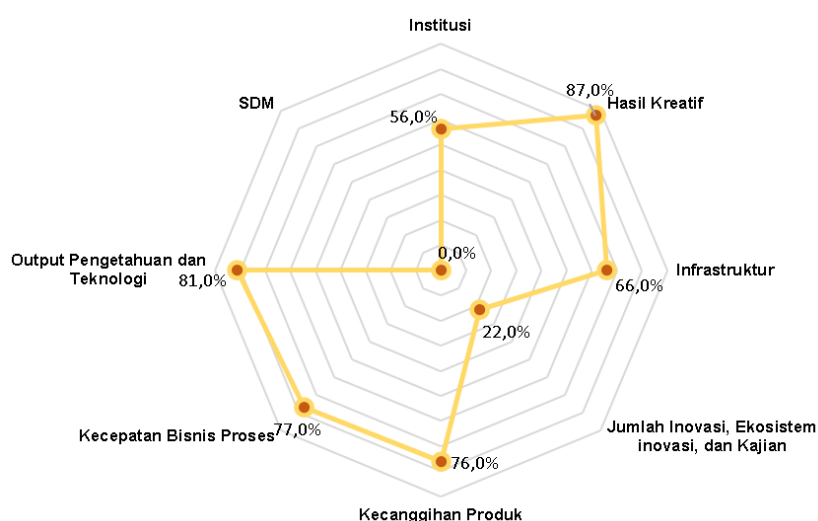
Dari 4 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Pasuruan, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 100% yang artinya bahwa tidak ada satupun inovasi yang telah terisi data pendukung.

i. Daftar Inovasi Kabupaten Pasuruan beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. Daftar Inovasi Kabupaten Pasuruan beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
KEBAL COVID 19 (KELUARGA BERDAYA LAWAN COVID 19) KABUPATEN PASURUAN SEKTOR RESTORAN	0
KEBAL COVID 19 UJI KENDARAAN BERMOTOR KAB PASURUAN	0
KEBAL COVID-19 KITA BUDAYAKAN GERAKAN "YUK NONGGO" KAB PASURUAN	0
3 in 1 LAYANAN KENDUREN MAS (KENDARAAN URUN REMBUK MASYARAKAT)	0

B. KABUPATEN PONOROGO



Gambar 11. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Ponorogo memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu sebesar 87.00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor pada variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 22.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 12. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Ponorogo

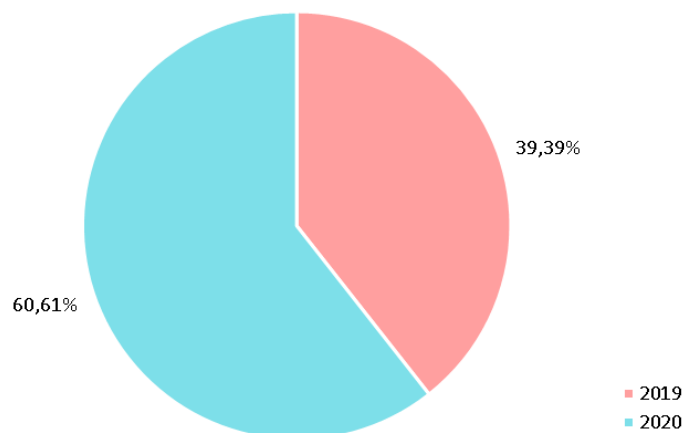
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah

Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Ponorogo belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3.101%, dimana nilai tersebut sangat jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.92%. Namun kemungkinan nilai yang diinput dari indikator tersebut tidak sesuai dengan yang diminta oleh sistem aplikasi indeks inovasi daerah. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan dan Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia bernilai 0% karena tidak ada data yang diinput oleh Kabupaten Ponorogo terkait dengan indikator-indikator tersebut. Untuk indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 13.21%, dimana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan pada Jumlah Peningkatan PAD sebesar 73.86% dimana angka tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 8%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang juga mengalami kenaikan sebesar 15.55% dimana angka tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.45%. Terakhir, untuk indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Ponorogo menunjukkan kenaikan sebesar 6.76%, dimana nilai tersebut ternyata lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang mengalami penurunan sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

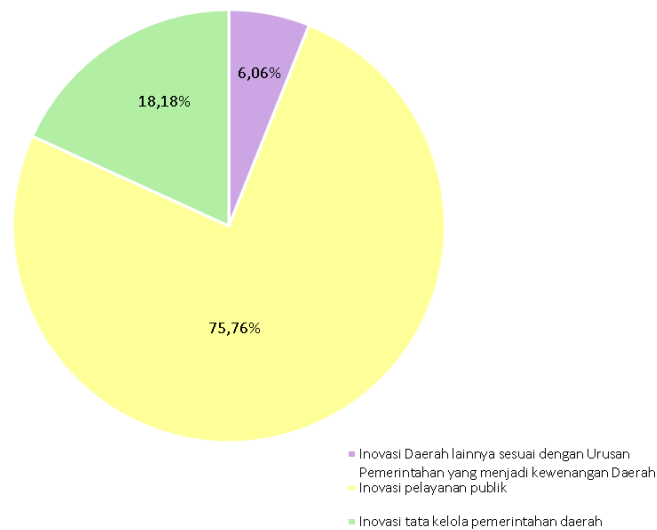
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 13. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Ponorogo

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Ponorogo telah diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 20 (60.61%) inovasi dari 33 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2020 dan 13 (39.39%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

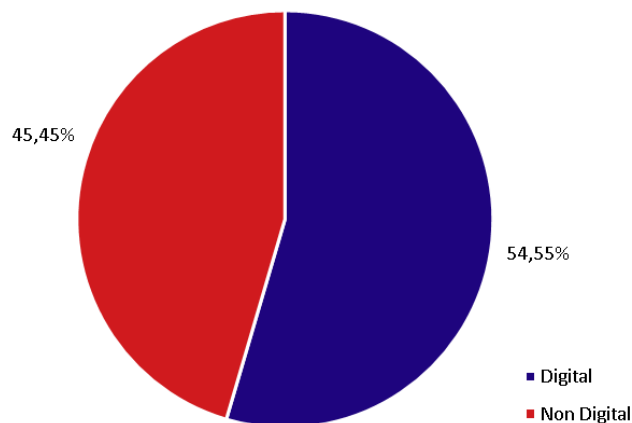
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan bentuk inovasi, data menunjukkan bahwa sebanyak 25 (75.76%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Ponorogo merupakan inovasi dalam bentuk Pelayanan Publik, kemudian sebanyak 6 (18.18%) inovasi lainnya merupakan inovasi dalam bentuk tata kelola pemerintahan daerah sedangkan sisanya yaitu sebanyak 2 (6.06%) inovasi daerah merupakan inovasi dalam bentuk lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

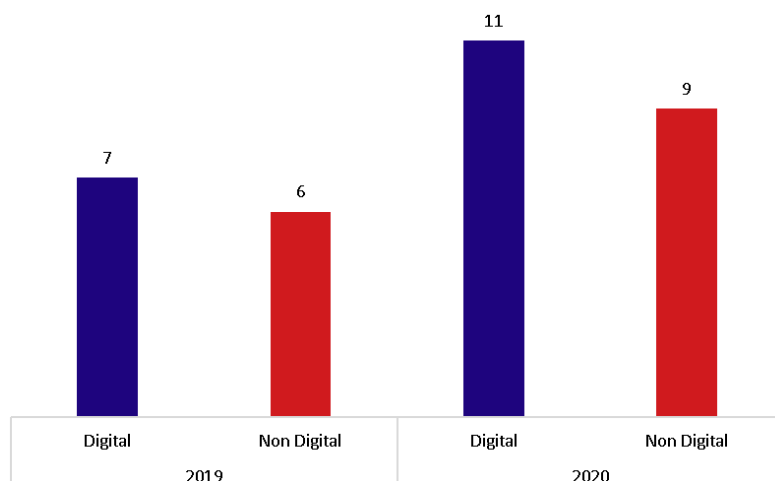
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Ponorogo

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 18 (54.55%) dari 33 inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Ponorogo merupakan inovasi digital, sedangkan sisanya sebanyak 15 (45.45%) inovasi merupakan inovasi non digital. Untuk jenis inovasi teknologi yang diterapkan pada tahun 2021 belum dilaporkan oleh Kabupaten Ponorogo.

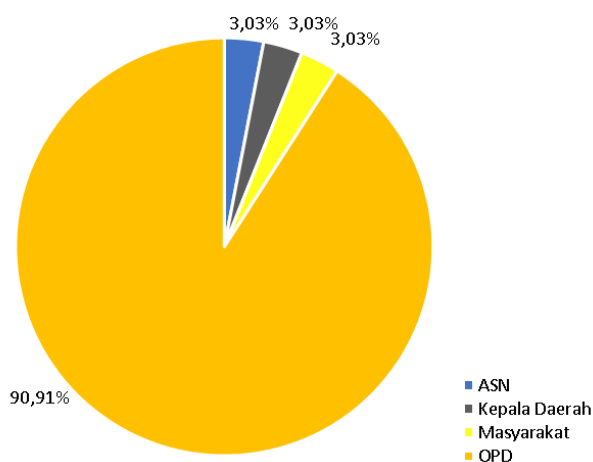
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 16. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Ponorogo

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, terutama untuk jenis inovasi digital maupun non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 7 inovasi kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 11 inovasi. Selain itu, inovasi non digital juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 6 inovasi kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 9 inovasi.

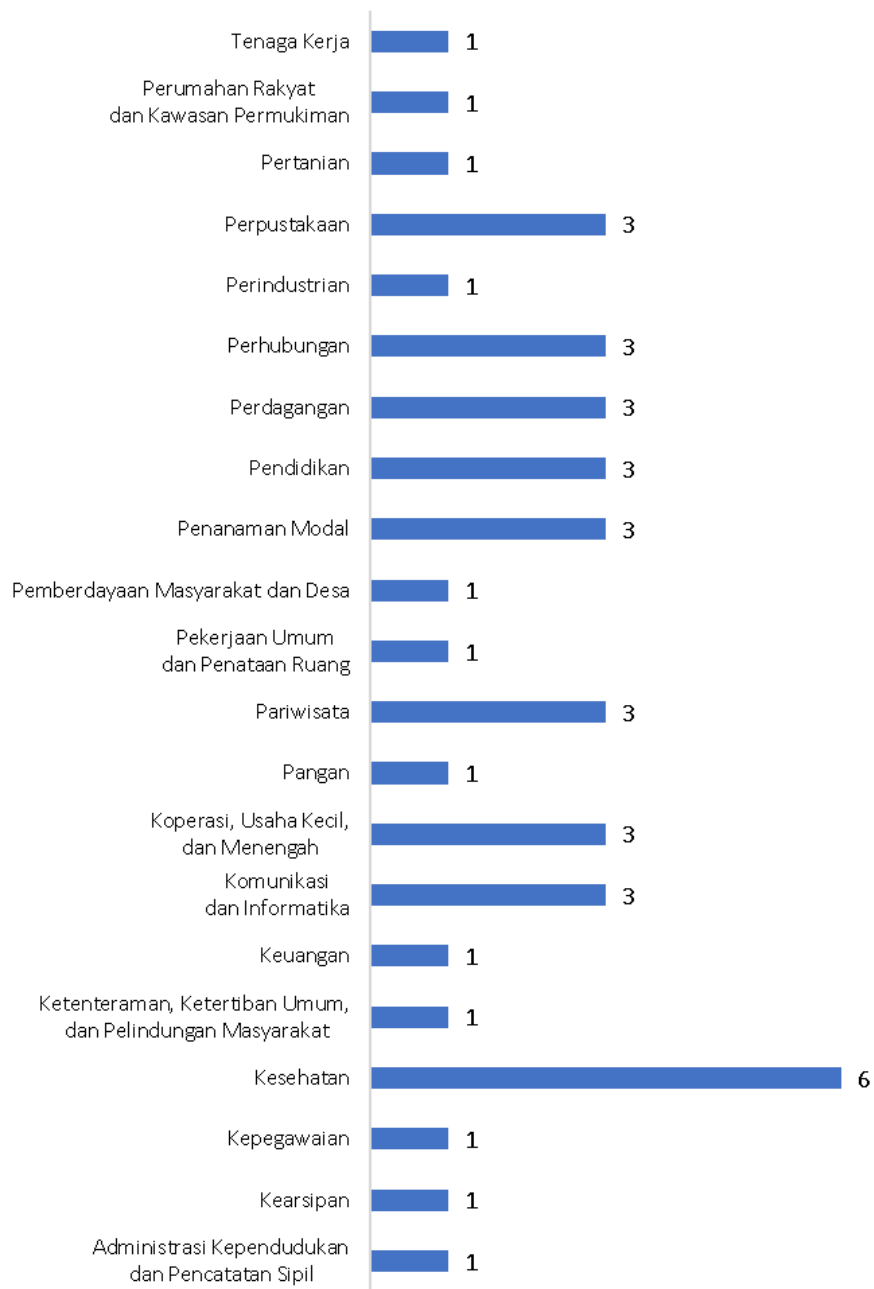
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 17. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Ponorogo

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, Kepala Daerah, ASN, dan Masyarakat dengan rincian 30 (90.91%) inovasi diinisiasi oleh Perangkat Daerah sedangkan 1 (3.03%) inovasi lainnya diinisiasi oleh Kepala Daerah, kemudian 1 (3.03%) inovasi diinisiasi oleh ASN serta sisanya 1 (3.03%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

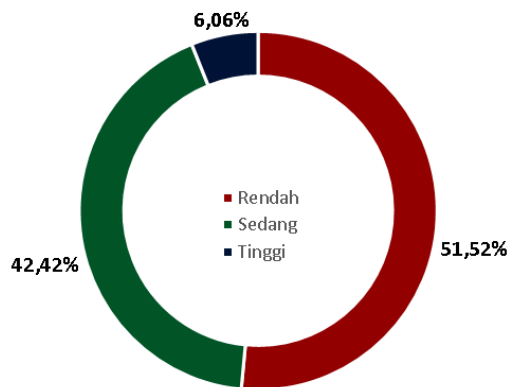
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 18. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Ponorogo

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Ponorogo berdasarkan urusan pemerintahan sudah cukup merata yaitu mencakup 21 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 6 inovasi dari 33 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Ponorogo. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 5 (lima) urusan dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat masing-masing dengan 1 inovasi, urusan pendidikan dengan 3 inovasi, dan urusan kesehatan dengan 6 inovasi.

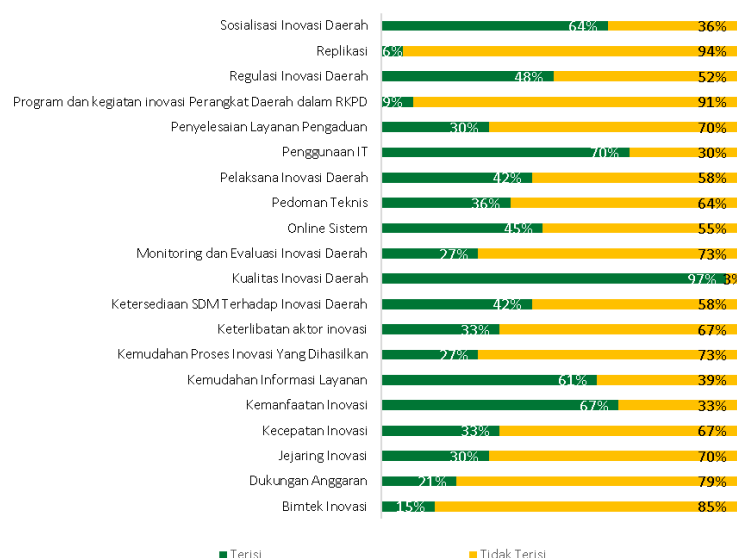
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 19. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Ponorogo

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Ponorogo memiliki skor kematangan yang rendah yaitu sejumlah 17 (51.52%) inovasi kemudian inovasi dengan skor kematangan sedang sejumlah 14 (42.42%) inovasi dan inovasi dengan skor kematangan tinggi sejumlah 2 (6.06%) inovasi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



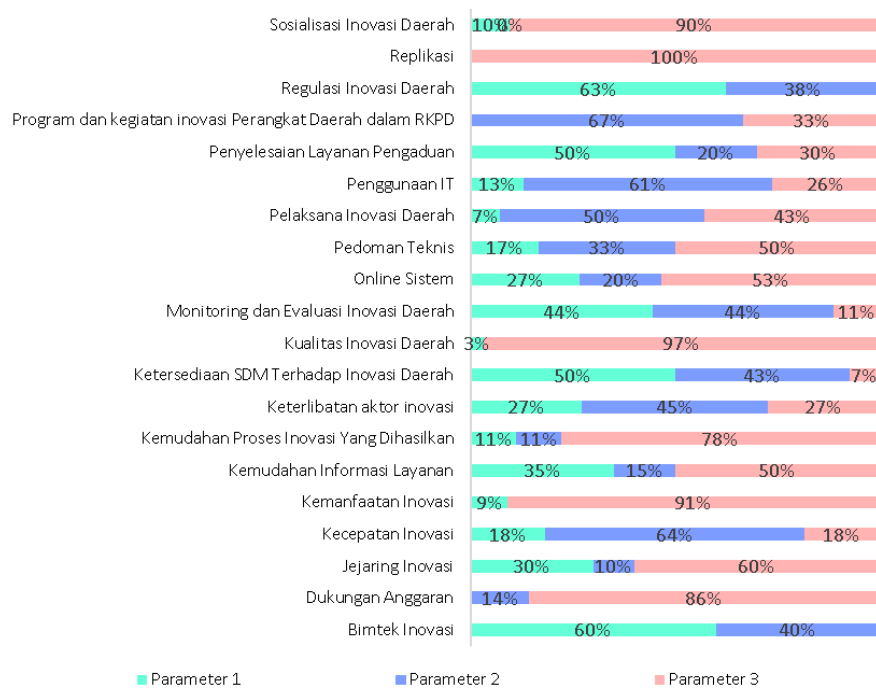
Gambar 20. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo

Dari 33 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Ponorogo, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 59.70%

sedangkan 40.30% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung terbanyak adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah yaitu sebesar 97%. Hal tersebut berarti bahwa inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Ponorogo telah terisi data pendukung pada indikator tersebut..

Selanjutnya indikator satuan inovasi daerah yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator replikasi yaitu sebesar 6% yang artinya hanya terdapat 2 dari 33 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Ponorogo telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Ponorogo

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD yaitu sebesar 67% artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah yaitu sebesar 63% artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

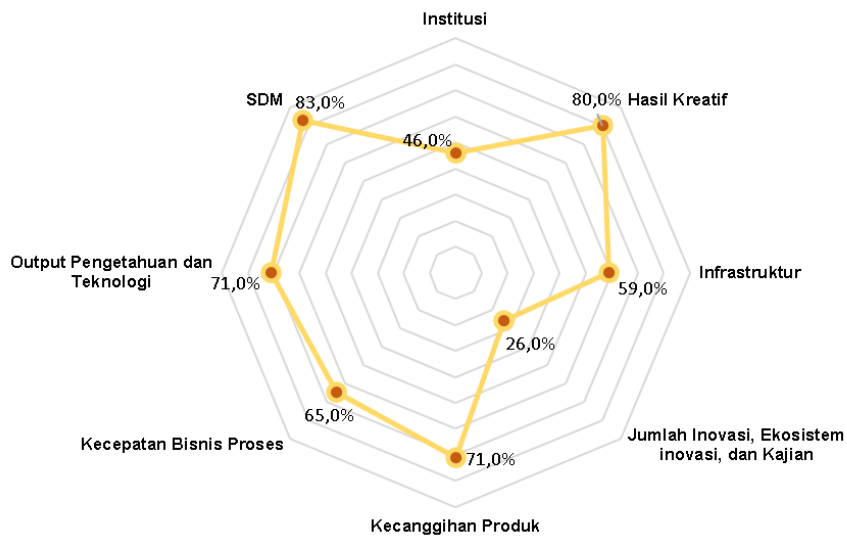
j. Daftar Inovasi Kabupaten Ponorogo beserta Skor Kematangannya

Tabel 3. Daftar Inovasi Kabupaten Ponorogo beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Transportasi Umum	15
PTSP Sehat Dalam Rangka Pencegahan Covid 19	15
Tempat Wisata Sehat	0
New Normal Restoran Sehat Dan Nyaman	15
Hotel Bersih Sehat Dan Nyaman Di tengah Pandemi Covid 19	15
Pasar Modern Dalam Pelaksanaan New Normal	15
Pasar Rakyat Sehat Ekonomi Kembali Kuat	15
Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Si-JITU)	88
KECAP MANIS (Kelas Edukasi Calon Pengantin Menuju Pernikahan Sehat dan Harmonis	56
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS SMART CARD	45
ANGKUTAN CERDAS SEKOLAH KABUPATEN PONOROGO	67
Aplikasi Info Harga "WAROG"	111
Aplikasi Sistem Informasi Senyum Masyarakat (SI-SEMAR)	79
PROGRAM INOVASI DESA "PID"	52
- Perpustakaan Digital E- Pustaka Wengker di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo	81
Menyediakan Layanan Anak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo	42
Layanan TIK 2019	25
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)	70
SIVALE (SISTEM INFORMASI VALIDASI ELEKTRONIK)	48
INOVASI "PENSUN BAHAGIA" DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONOROGO	52
Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Pajak Daerah Melalui Elektronik Pajak Daerah (E-Pajak) di Kabupaten Ponorogo	104
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI KEGIATAN "BRIGHT TECH DAY" DI TK BRIGHT KIDDIE PONOROGO	40
INOVASI DAERAH E- RETRIBUSI PASAR	44
Sistem Manajemen Surat-Menyurat dan Disposisi Online (E-Office)	73
KENES (Kelompok Nenek Peduli Asi)	15
Smart Media Monitoring (Sistem Pintar untuk Monitoring Media Online)	58
Simas Hebat	87
Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani (PAK TANI)	88
SAPA POL PP (Saluran Aduan dan Pelayanan Polisi Pamong Praja)	85
SIJATIL (SISTEM INFORMASI JUMLAH AKTUAL TEMPAT TIDUR LOWONG)	54
ANDALAN (Aplikasi Pendaftaran Rawat Jalan Online)	33

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
"Smart Electric Face Shield" Sistem Pemantauan Kondisi Suhu Tubuh Pelajar Berbasis Mikrokontroller Sebagai Upaya Awal Meminimalisir Penularan COVID-19 Pada Pelajar	15
"BOM ATD" Box Of Mask And Temperature Detector Sistem Monitoring Tertib Protokol Kesehatan Sebagai Pencegahan Penyebaran COVID 19 Berbasis Mikrokontroller Di Area Sekolah	15

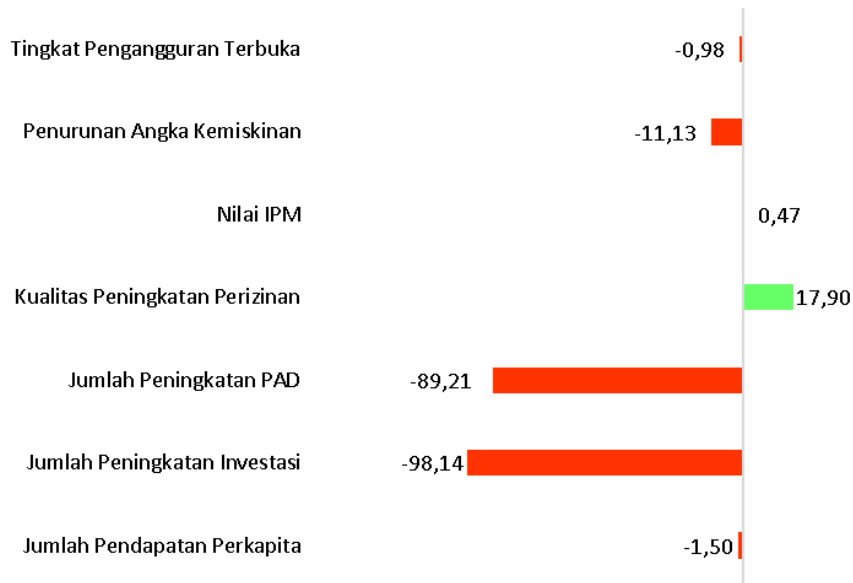
C. KABUPATEN PROBOLINGGO



Gambar 22. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Probolinggo memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu sebesar 83.00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 26.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



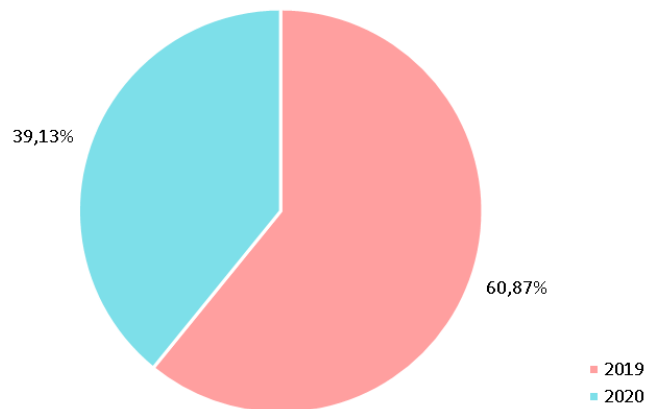
Gambar 23. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Probolinggo

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Probolinggo belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.98%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 0.98% dibandingkan tahun 2019. Namun hal ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang juga mengalami penurunan sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 11.13%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 11.13% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.47% dimana nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan ternyata juga mengalami kenaikan sebesar 17.90%, dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 89.21% dimana nilai tersebut jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan kenaikan sebesar 8%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang mengalami penurunan sebesar 98.14%, dimana nilai tersebut jauh lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.45%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Probolinggo yang menunjukkan penurunan sebesar 1.50%, dimana nilai tersebut masih lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

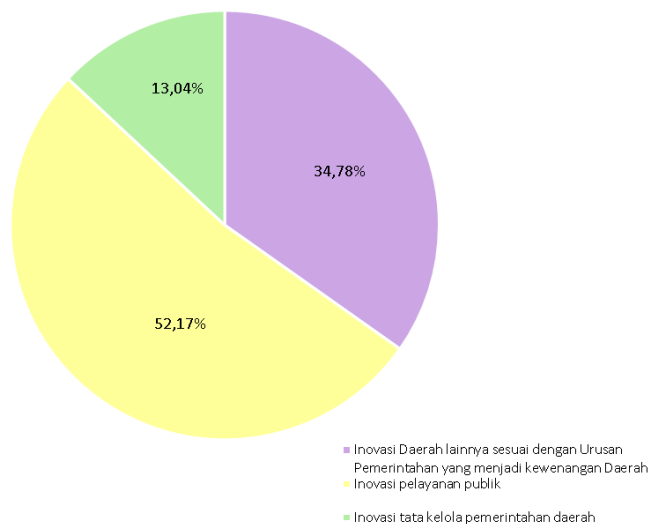
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 24. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Probolinggo

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Probolinggo telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 14 (60.87%) inovasi dari 23 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2019 dan 9 (39.13%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

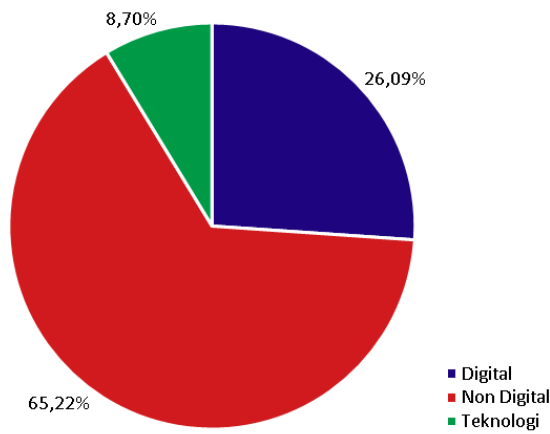


Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Probolinggo, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sebagian besar inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 12 (52.17%) inovasi, kemudian 8 (34.78%) inovasi adalah inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan 3 (13.04%) inovasi adalah inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

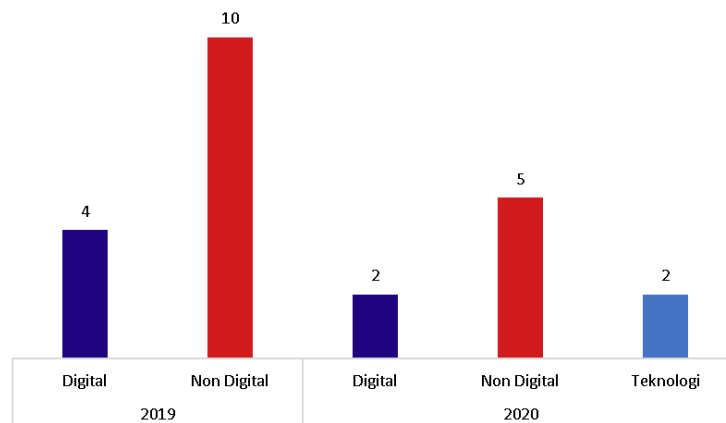
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Probolinggo

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 15 (65.22%) dari 23 inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Probolinggo merupakan inovasi non digital, sedangkan 6 (26.09%) inovasi lainnya merupakan inovasi digital, serta sisanya sejumlah 2 (8.70%) inovasi merupakan inovasi teknologi.

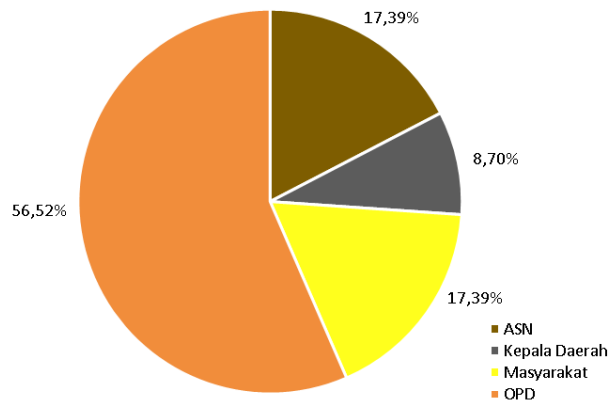
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 27. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Probolinggo

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya untuk inovasi digital maupun non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi non digital menurun dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 10 inovasi kemudian pada tahun 2020 berkurang menjadi 5 inovasi. Sedangkan inovasi digital juga menurun dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 4 inovasi kemudian pada tahun 2020 berkurang menjadi 2 inovasi. Sementara itu, untuk jenis inovasi teknologi hanya diterapkan pada tahun 2020 yaitu sejumlah 2 inovasi.

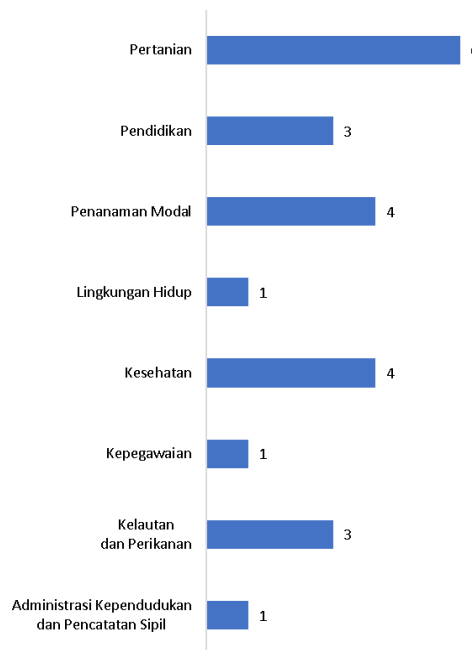
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 28. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Probolinggo

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, Kepala Daerah, ASN, dan Masyarakat dengan rincian 13 (56.52%) inovasi diinisiasi oleh Perangkat Daerah, kemudian 2 (8.70%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah, selanjutnya 4 (17.39%) inovasi lainnya diinisiasi oleh ASN serta sisanya sejumlah 4 (17.39%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

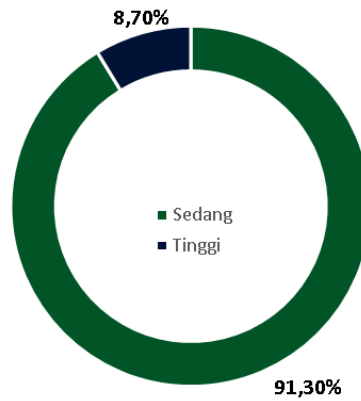


Gambar 29. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Probolinggo

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Probolinggo berdasarkan urusan pemerintahan belum cukup merata karena hanya mencakup 8 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan pertanian dengan 6 inovasi dari 23

inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Probolinggo. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 2 (dua) urusan dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 3 inovasi dan urusan kesehatan dengan 4 inovasi.

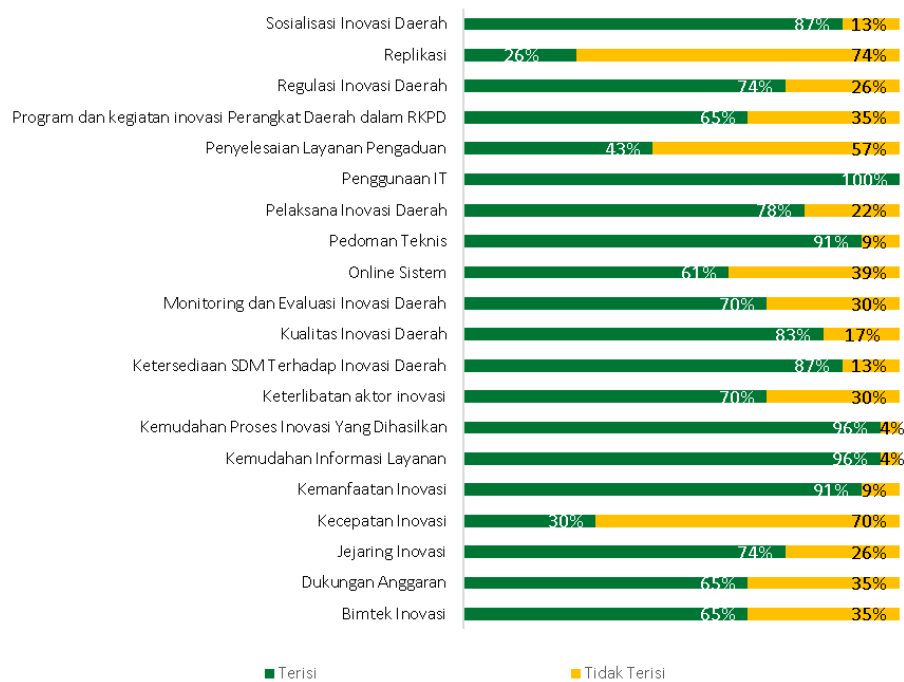
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 30. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Probolinggo

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Probolinggo memiliki skor kematangan yang sedang yaitu sejumlah 21 (91.30%) inovasi sedangkan inovasi dengan skor kematangan tinggi yaitu sejumlah 2 (8.70%) inovasi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

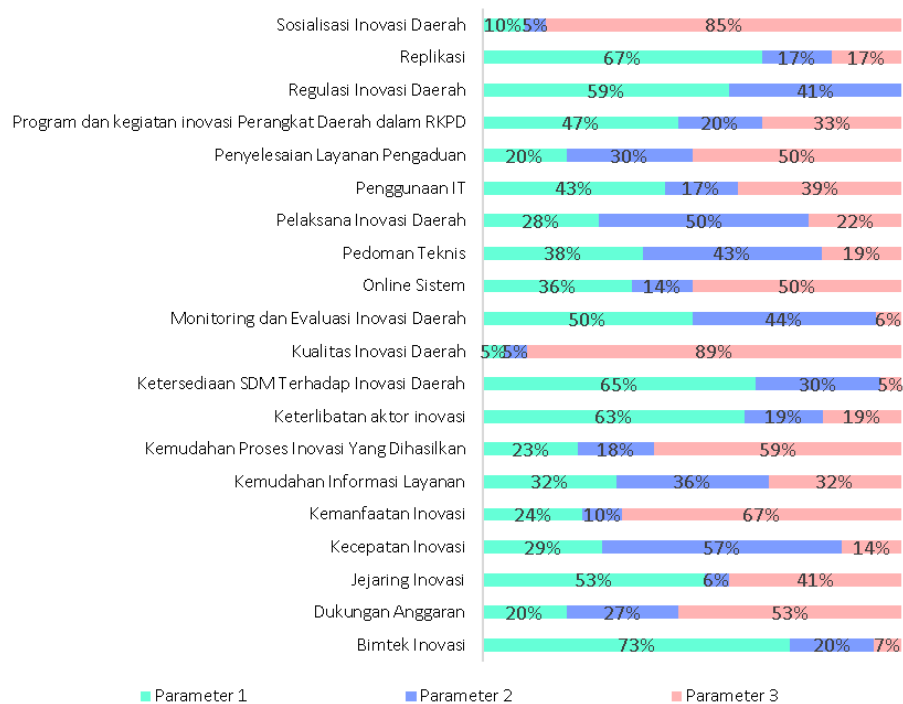


Gambar 31. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Probolinggo

Dari 23 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Probolinggo, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 27.39% sedangkan 72.61% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung terbanyak adalah indikator Penggunaan IT yaitu sebesar 100%. Hal tersebut berarti bahwa seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Probolinggo telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Selanjutnya indikator satuan inovasi daerah yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 26% yang artinya hanya terdapat 6 dari 23 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Probolinggo telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Probolinggo

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Kualitas Inovasi Daerah yaitu sebesar 89%, artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kecepatan Inovasi yaitu sebesar 57% artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek Inovasi yaitu sebesar 73% artinya sebagian besar inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

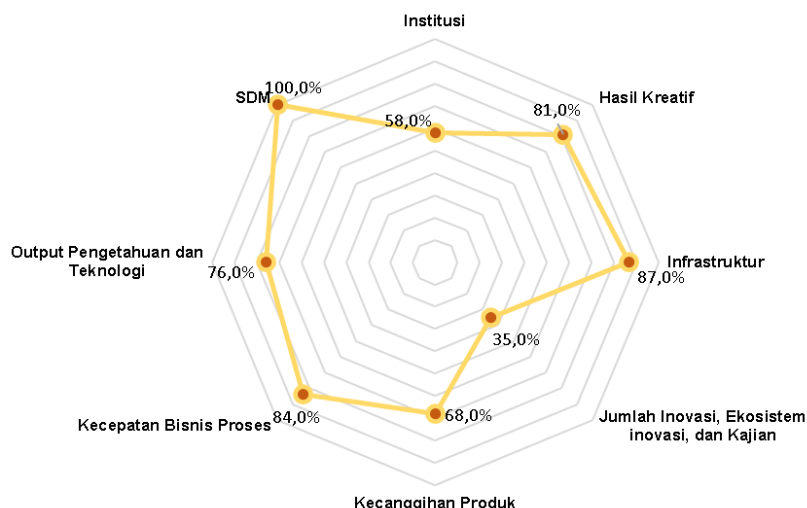
j. Daftar Inovasi Kabupaten Probolinggo beserta Skor Kematangannya

Tabel 4. Daftar Inovasi Kabupaten Probolinggo beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
JELITAKU (JELLI TAWAS BEKU PENGGANTI ES BATU)	53
BCA (Bank Clethong dan Air kencing ternak) MELAYANI TABUNGAN NABATI, IBU SIAGA SEHAT SELAMAT	100
GELIKA (Gelatin Halal dari Limbah Sisik Ikan Kakap)	54
PENYEDIAAN BIBIT TANAMAN KENTANG BERKUALITAS MELALUI INOVASI KULTUR JARINGAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI DAN MENEKAN BIAYA USAHA TANI	54
DESI SUKA JAMU (Dengan Siramah Segala Upaya Kesehatan Jadi Mudah)	79

Bela Sang Raja (Pembelajaran Kelas Rangkap, Masyarakat Sejahtera)	111
LAPOR MINTA KAWIN PAK	97
Indikator Otomatis Kontrol Pompa dan Level Air	51
MIXED BENIH MEMBRAMO – CIHERANG MAMPU MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN NILAI EKONOMI PETANI	52
ATM TELUR UNTUK IGD DAN RS (Anjungan Tunai Mandiri)	63
Pelita Hati (Pelayanan Perizinan Di Tempat Dengan Hangat, Amanah, Transparan dan Inovatif)	80
Sistem Informasi Pelayanan Ijin Terintegrasi OSS	98
Aplikasi Titik Koordinat	55
MIXED BENIH MENINGKATKAN NILAI EKONOMI PETANI	56
PENYUSUNAN E-SKP SECARA ELEKTRONIK	81
GODIGITAL	60
PASTI PROSPECT – Pemetaan Aerial Survey Titik Investasi dan Project Prospectus	58
Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Operasional Sekolah	80
HALO DOKTER (TELEPON DOKTER, OBAT DIANTAR KADER)	92
JUMPA HATI (Jemput Pasien Hipertensi Sampai Diobati)	85
Buku BaLeBung Sarana Jitu Menanamkan Konsep Awal Menulis Huruf Baku dan Memperbaiki Tulisan Tidak Baku	74
SIAP 86 (Sistem Integrasi Administrasi Pelayanan 8 Menu 6 Jaminan Mutu)	76
BUMI KRAKSAAN (Budidaya Udang Vanamei Kolam Bundar Menggunakan RAS di Media Air Laut Buatan)	85

D. KABUPATEN SAMPANG

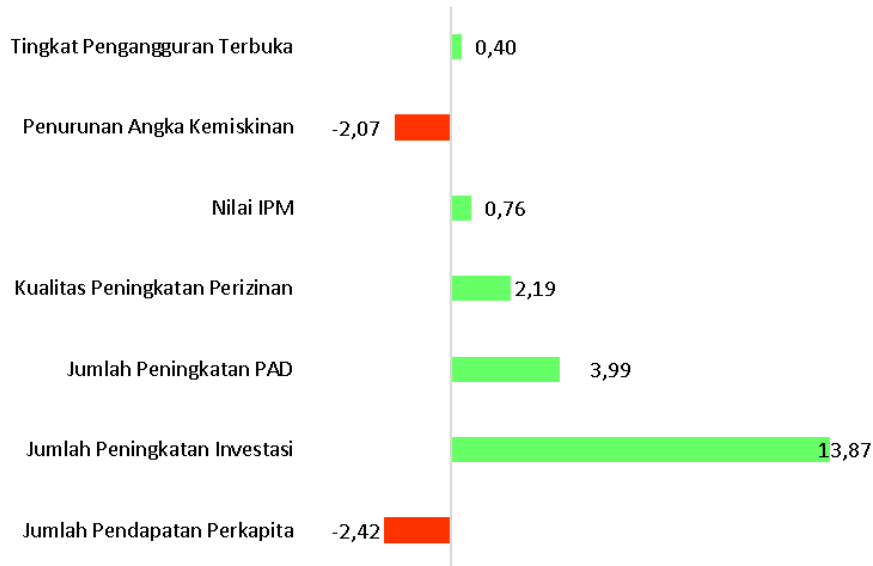


Gambar 33 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sampang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sampang memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu sebesar 100%. Artinya seluruh

indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 35.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 34. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sampang

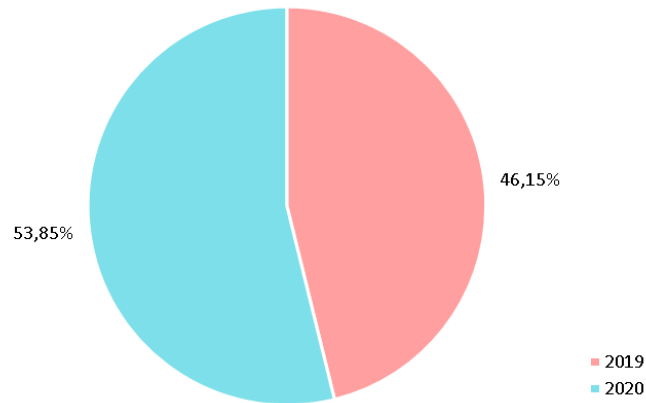
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sampang belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan sebesar 0.40%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka turun sebesar 0.40% dibandingkan tahun 2019. Namun hal ini tidak sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang juga mengalami penurunan sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 2.07%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 2.07% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan sebesar 0.76% dimana nilai tersebut sedikit lebih besar dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan ternyata mengalami kenaikan sebesar 2.19%, nilai tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Sampang mengalami kenaikan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 3.99% dimana nilai tersebut ternyata lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan kenaikan sebesar 8%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang juga mengalami kenaikan sebesar 13.87% dimana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar

0.45%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Sampang yang menunjukkan penurunan sebesar 2.42%, dimana nilai tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya turun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

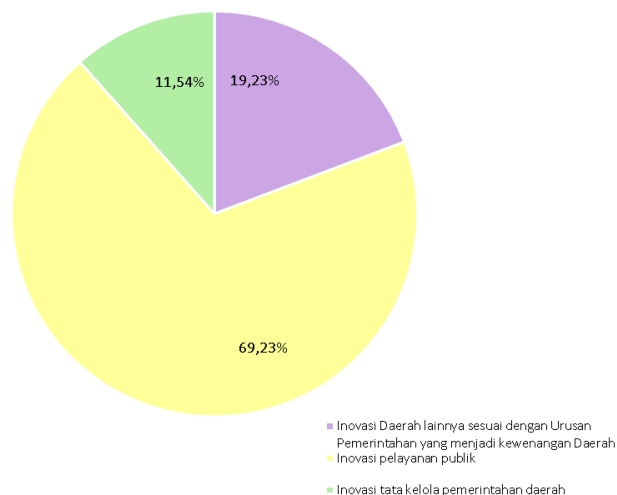
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 35. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sampang

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sampang telah diterapkan pada tahun 2020. Terdapat 42 (53.85%) inovasi dari 78 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2020 dan 36 (46.15%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

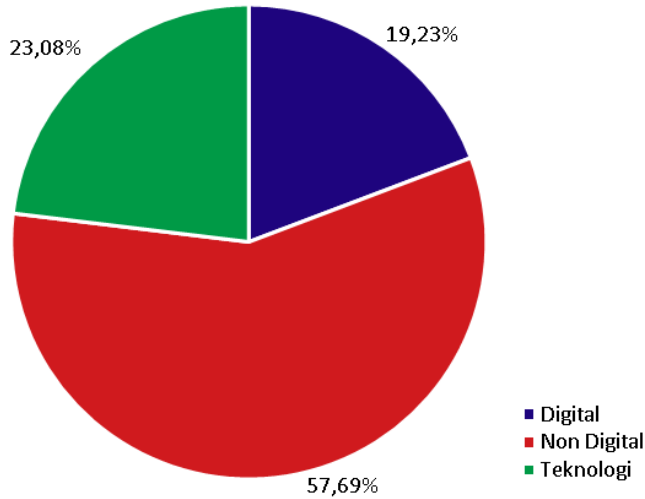


Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sampang

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sampang, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi bentuk lainnya. Sebagian besar inovasi adalah inovasi pelayanan publik yaitu

sejumlah 54 (69.23%) inovasi, kemudian 15 (19.23%) inovasi adalah inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta 9 (11.54%) inovasi lainnya adalah inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

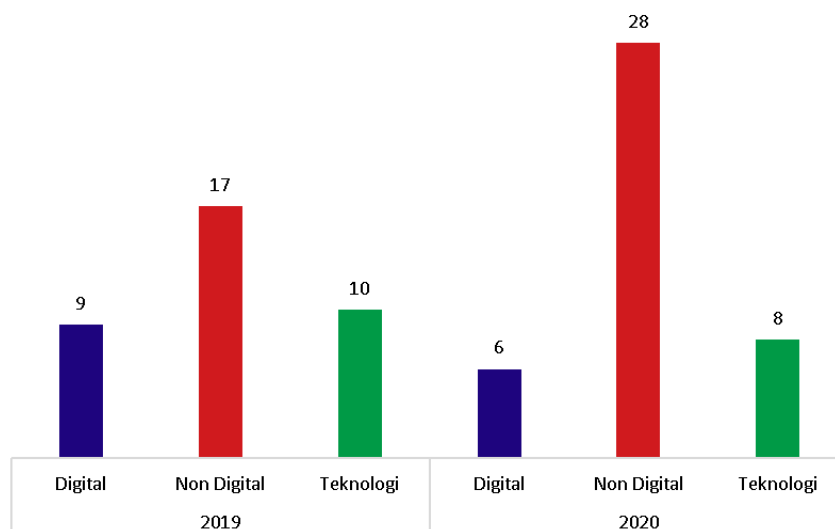
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sampang

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 15 (19.23%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sampang merupakan inovasi digital, kemudian untuk jenis inovasi non digital sejumlah 45 (57.69%) inovasi sedangkan sisanya adalah inovasi teknologi yaitu sejumlah 18 (23.08%) inovasi.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

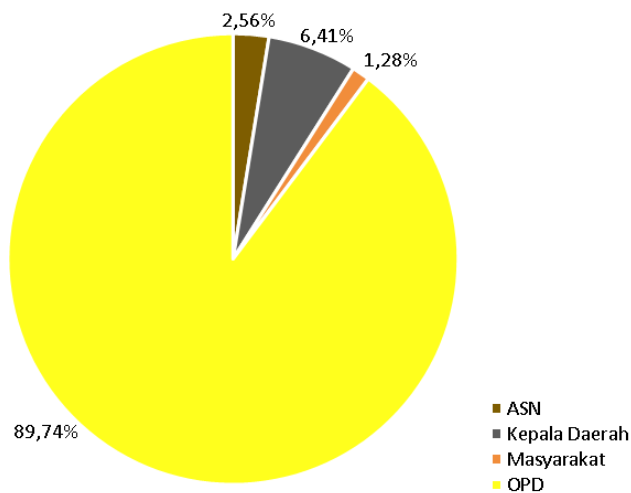


Gambar 38. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sampang

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya untuk inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi non digital meningkat di

mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan hanya sejumlah 17 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 28 inovasi. Sedangkan untuk inovasi digital mengalami penurunan pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan yaitu sejumlah 9 inovasi kemudian pada tahun 2020 berkurang menjadi 6 inovasi. Demikian pula, untuk inovasi teknologi juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 10 inovasi kemudian pada tahun 2020 berkurang menjadi 8 inovasi.

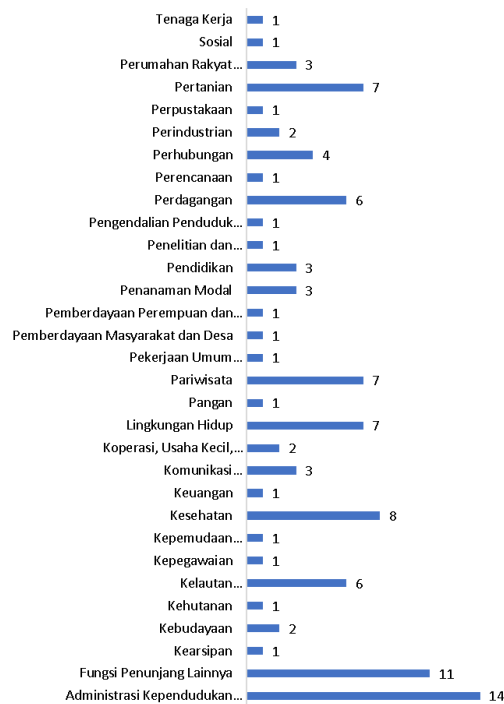
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 39. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sampang

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sampang pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, Kepala Daerah, Masyarakat, dan ASN dengan rincian 70 (89.74%) inovasi diinisiasi oleh Perangkat Daerah, 1 (1.28%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat, 5 (6.41%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah dan sisanya 2 (2.56%) inovasi diinisiasi oleh ASN. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

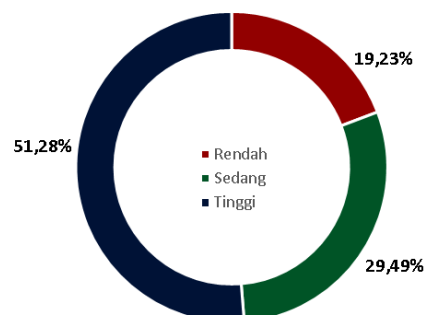
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 40. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sampang

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Sampang berdasarkan urusan pemerintahan sudah merata karena mencakup 31 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Sebagian besar urusan inovasi adalah inovasi pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sejumlah 14 inovasi kemudian diikuti dengan urusan fungsi penunjang lainnya sejumlah 11 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 5 (lima) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 8 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan 1 inovasi, urusan pendidikan dengan 3 inovasi, urusan perumahan rakyat serta kawasan permukiman dengan 3 inovasi serta urusan sosial dengan 1 inovasi.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

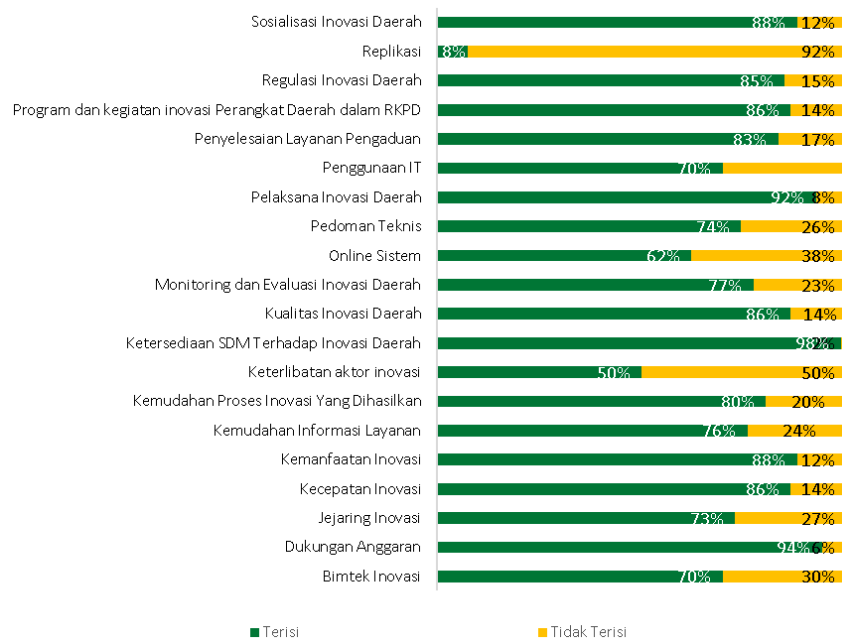


Gambar 41. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sampang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sampang sejumlah 15 (19.23%) inovasi memiliki skor kematangan yang rendah,

kemudian 23 (29.49%) inovasi memiliki skor kematangan sedang serta 40 (51.28%) inovasi memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

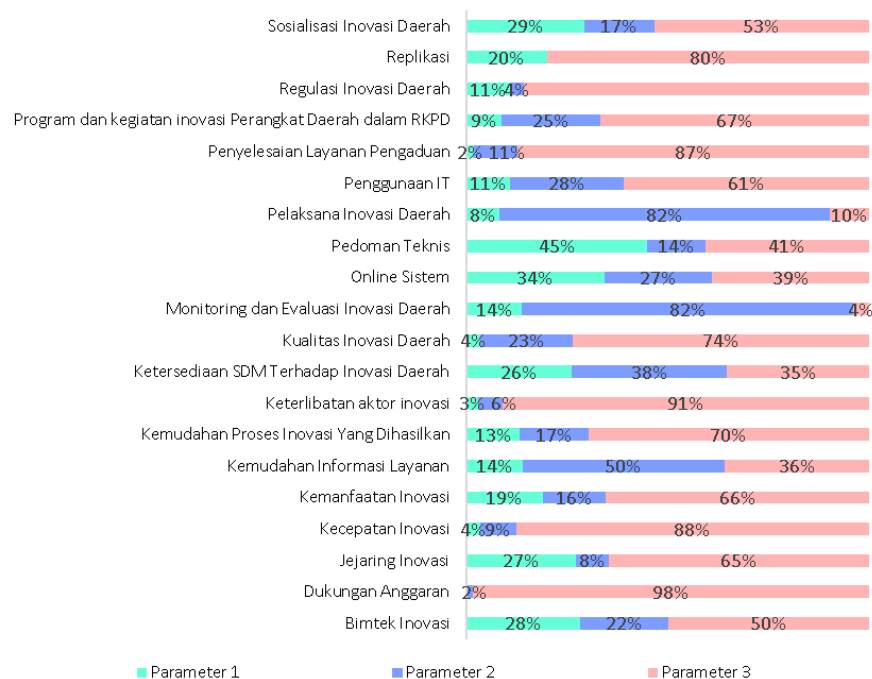


Gambar 42. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sampang

Dari 78 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sampang, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 23.64% sedangkan 76.36% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar adalah indikator Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah yaitu sebesar 98%. Hal tersebut berarti bahwa hampir keseluruhan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sampang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi sebesar 8% yang artinya 6 dari 78 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sampang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sampang

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran yaitu sebesar 98%. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah serta Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah yaitu sebesar 82% artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada kedua indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis yaitu sebesar 45% artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Sampang beserta Skor Kematangannya

Tabel 5. Daftar Inovasi Kabupaten Sampang beserta Skor Kematangannya

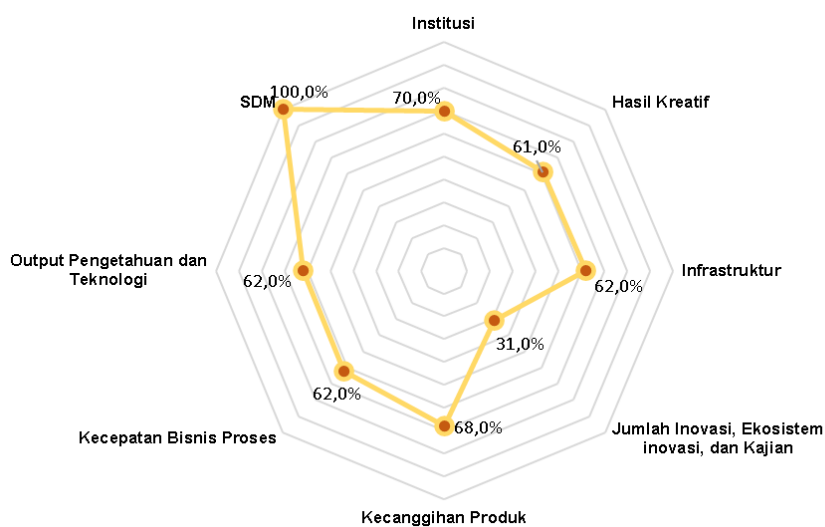
NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
RELA BERKORBAN	123
(YANPUTSAH ,,,,) Pelayanan Fasilitas Penjemputan Jenasah Bagi Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Sampang	70
“ TARPOTMEN ADMINDUK “ (Layanan Antar Jemput Dokumen Administrasi Kependudukan)	22
“PAKDE (Pelayanan Agenda Kerja Dewan)”	94
AMBIL DEPEMAS	133
Aplikasi Sistem Penghubung Kabupaten Sampang (Repository API)	125

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
APLUS K6 (APLIKASI KELULUSAN KELAS 6)	102
ASIK MAS (Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Sampang) / SIMPUS	86
Baju Ba Udin (Pembinaan Berkelanjutan Bagi Atlet Usia Dini)	88
BALLADA CINTA	102
BANK KOHE	109
Baret Pak TeJa Belang (Bayar RETribusi PaRkir Tepi JAL BERLANGganan)	0
BENGKEL SI RENCA	114
BERLIAN 1000 PROSEN (BERSAMA LINDUNGI IBU DAN ANAK PADA MASA 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN) PUSKESMAS TORJUN	115
Depor la OLA siongan Anti Rugi (DOLAR)	91
DRIVE THRU LAPAK PANTURA (Layanan Pengembalian Koleksi Tanpa Turun dari Kendaraan)	79
e-BPHTB	125
Edukasi Rajungan / Pembelajaran Rajungan	84
EFFIK KAMALA	97
ELONGAH ARTIS (PENOLONG USAHA AGAR TIDAK KRITIS)	109
ERPAS (Electronic Retribusi Pasar)	95
e-SKP	115
FAIS LAGI ONLINE (Fasilitasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Online)	78
GALI SRIRAMAH (keluarGA peduLI Seribu haRI peRTAMA keHidupan)	90
GAYA JALITA (INVESTIGASI KELAYAKAN JALAN LINGKUNGAN PERKOTAAN)	0
GeMeS MaS (Gemar Mengelola Sampah Mandiri dan Swadaya)	116
GUBUK EDUKASI BUDIDAYA BIOFLOK	110
IBU MELAMAR SANG GADIS DARI KETAPANG (Inovasi Budidaya Melon Himarasa, Labu Madu dan Pisang Cavendish dari Ketapang)	93
Inovasi Daerah Pencegahan Covid pada Sektor Transportasi Umum C-19	15
Inovasi Daerah Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Hotel-19	15
Inovasi Pencegahan Covid-19 Pada Sektor Pasar Tradisional	15
IWAK MAS (Inisiatif WArga untuK Manfaatkan Air Sungai)	65
JARI KAKI LIMA (JARING RISIKO MELALUI KARTU KONTROL IBU (Hamil, Bersalin, Nifas) MELIBATKAN MASYARAKAT)	135
Kampoeng Siongan	59
KARPET MERAH (Kartu Tanda Penduduk Tujuh Belas Tahun Menerima di Rumah/Sekolah)	108
KATAPANG (Kampung Tahan Pangan)	119
Kejar si ratu	95
Ki Buta Ngujur (Kristalisasi Budaya Melalui Tari Ngujur)	66
KLINIK KOPDUMAS	100

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Kuliner di Restoran Sehat Menuju New Normal Life Covid-19	15
LANJUT MAS BROOO !!!	76
LAPAK SERDADU	125
P4USKU (Pusat Pelayanan Pengembangan Usaha KUMKM)	121
PAKED HOT (Pelayanan Administrasi Kependudukan Mudah Cepat dan Gratis)	103
Pasar Modern Sehat dan Bersih Menyambut New Normal Life Covid-19	0
PELAOD SEHATI	127
PELAPAS DAHAGA	88
Pelayanan PTSP Sehat, Bersih dan Cepat Menyongsong New Normal Life	15
Pencegahan Covid pada Sektor Tempat Wisata C-19	15
PENGGEMUKAN SAPI DENGAN LASERPUNCTUR	116
PeSona TPA (Pengolahan Sampah Berorientasi Teknologi Tepat Guna di Tempat Pemrosesan Akhir)	100
POJOK RATDIN (Pojok Ramuan Tradisional)	102
POKDARWIS SEBAGAI KREATOR WISATA DESA	36
RESEP DOKTER 1 X 1500	119
Restoran Sehat Bebas Covid-9	15
ROMA BUDJE	14
SAE KA' DINTOH (Berbahasa Madura di Dinas Pendidikan, TK, SD, dan SMP)	104
Si JeLiTA (Sistem Jemput Limbah Tepat dan Akurat)	112
Si LANDUKPAT DI BIUS (SISTEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERCEPAT DENGAN APLIKASI BIRU GENIUS)	100
Si Panji Bluris (Sistem Pelayanan Pengujian menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik dan Qris)	108
SIMKEP (Sistem Informasi Manajemen Kepelabuhan)	45
SIMPANG KARGO (Sistem Pendampingan Kawasan Agropolitan)	73
SIP-6 (Sistem Informasi Pelayanan Penyuluhan, Pendampingan, Pengembangan Produk & Peningkatan Industri Kecil Menengah Kab. Sampang)	128
Sistem Informasi Manajemen Administrasi Terpadu (SIMADU)	131
Smart - IDI	135
Spot Stop (Penanganan serangan OPT secara cepat dan tepat)	143
STATUS TARA COMEL P-RO (STRATEGI PEMUTUS MATA RANTAI COVID-19 MELALUI PPKM MIKRO)	122
TABLOID SAKERA MESEM	109
TAMAN SURGA (Teknologi Pelayanan Mandiri Untuk Seluruh Warga)	124
TEKAN ENTER (Tertib lap Keuangan dan ANggaran dengan ENtry TERpadu)	96
TEsi Ekspres (Taman Edukasi, Rekreasi dan Ekspresi)	100
TUNAS (Tuntas Sanitasi Aman Saterossah) SAMPANG	113

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
WASLING (Wisata Arsip keliling)	103
WISATA DESA KREATIF BERBASIS POTENSI SEBAGAI SARANA ECHOO HEALING (SEKARPOTE COOLING)	128
Wisata Tani di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banyuates	63
Wisata Tani di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Camplong	63
www Si Gampang.sampangkab.go.id	38
YAN CABULI BIKA DESTI (PELAYANAN CAMAT BLUSUKAN MELALUI BINA PERANGKAT DESA TERINTEGRASI)	86

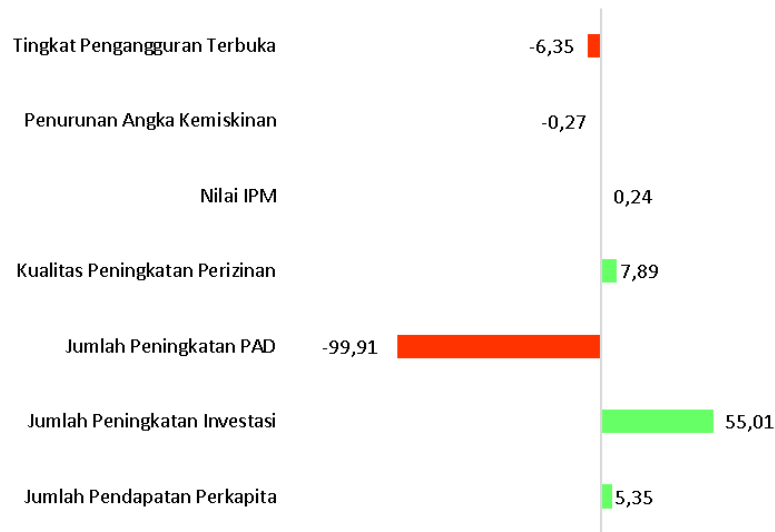
E. KABUPATEN SIDOARJO



Gambar 44 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sidoarjo memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu sebesar 100.00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih lebih rendah daripada variabel lainnya, yaitu sebesar 31.00% yang artinya bahwa secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



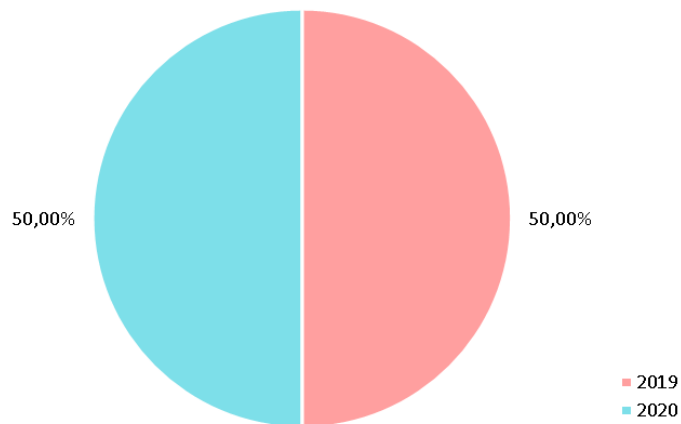
Gambar 45. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sidoarjo

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sidoarjo belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 6.35%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 6.35% dibandingkan tahun 2019. Namun hal ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang juga mengalami penurunan sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 0.27%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 0.27% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.24% dimana nilai tersebut sedikit lebih besar dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan juga mengalami kenaikan sebesar 7.89%, nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 99.91% dimana nilai tersebut ternyata jauh lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan kenaikan sebesar 8%. Sedangkan, untuk indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami kenaikan sebesar 55.01% dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.45%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Sidoarjo yang menunjukkan kenaikan sebesar 5.35%, dimana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

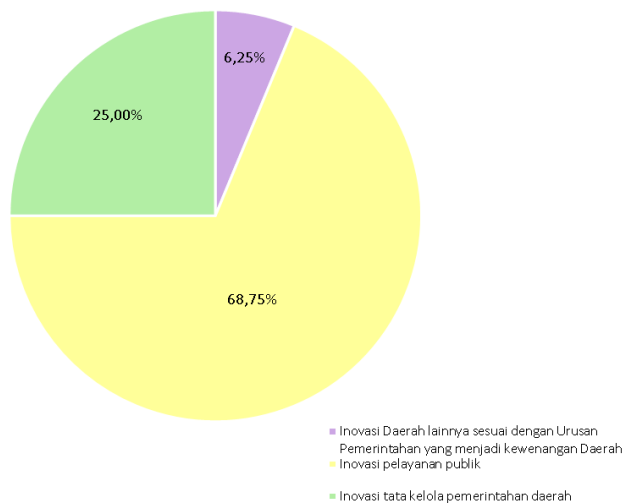
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 46. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sidoarjo

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sidoarjo telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 16 (50.00%) inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2019. Demikian pula, untuk inovasi yang diterapkan pada tahun 2020 sejumlah 16 (50.00%).

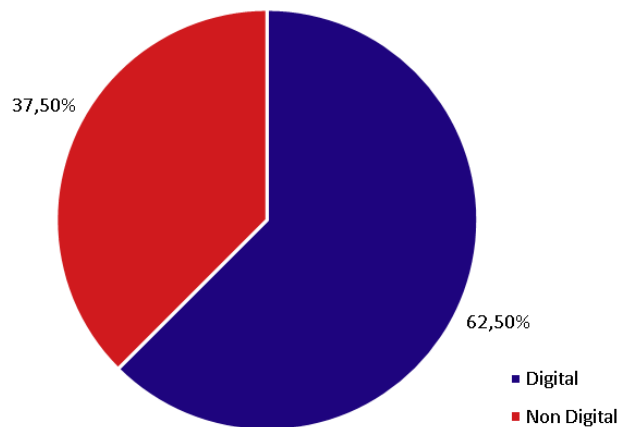
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sidoarjo, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi bentuk lainnya. Sebagian besar inovasi adalah inovasi pelayanan publik yaitu sejumlah 22 (68.75%) inovasi, kemudian 15 (25.00%) inovasi lainnya adalah inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Sedangkan, sisanya sejumlah 2 (6.25%) inovasi adalah inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

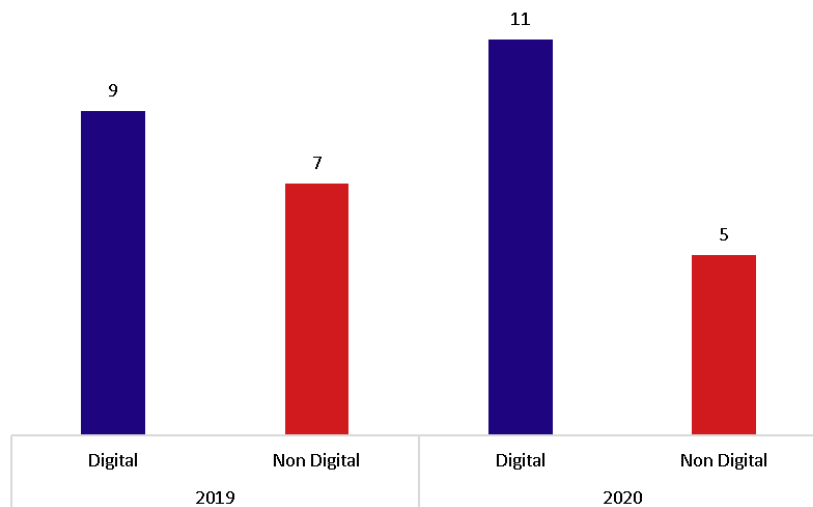
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sidoarjo

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 20 (62.50%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sidoarjo merupakan inovasi digital, sedangkan sisanya adalah inovasi non digital sejumlah 12 (37.50%) inovasi. Sedangkan, untuk inovasi teknologi belum dilaporkan.

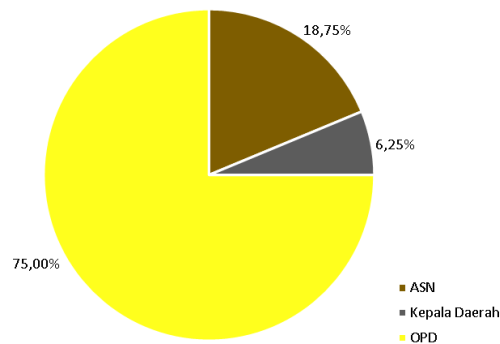
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 49. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sidoarjo

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya untuk inovasi digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan hanya sejumlah 9 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 11 inovasi. Sedangkan untuk inovasi non digital mengalami penurunan pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan yaitu sejumlah 7 inovasi kemudian pada tahun 2020 berkurang menjadi 5 inovasi. Sedangkan, untuk inovasi teknologi belum dilaporkan.

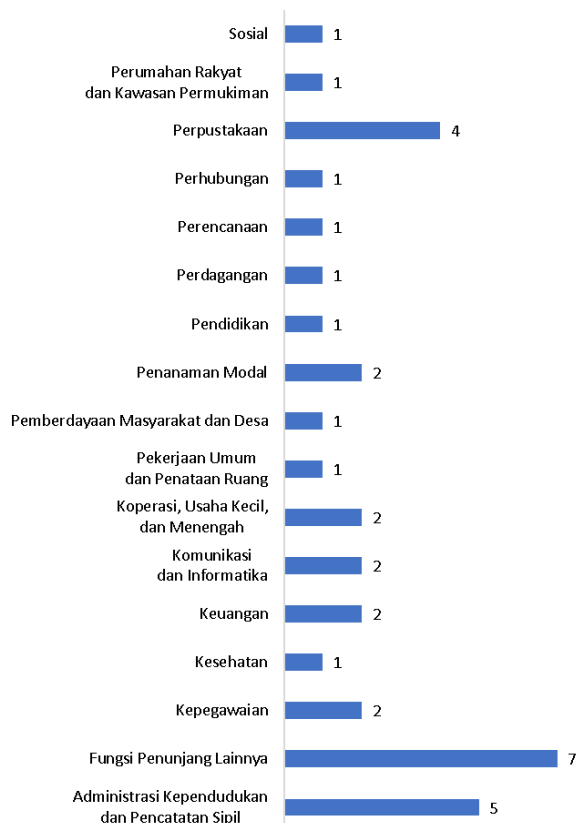
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 50. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sidoarjo

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah, Kepala Daerah, dan ASN dengan rincian 24 (75.00%) inovasi diinisiasi oleh Perangkat Daerah, 2 (6.25%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah, dan sisanya 5 (6.41%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh Masyarakat dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

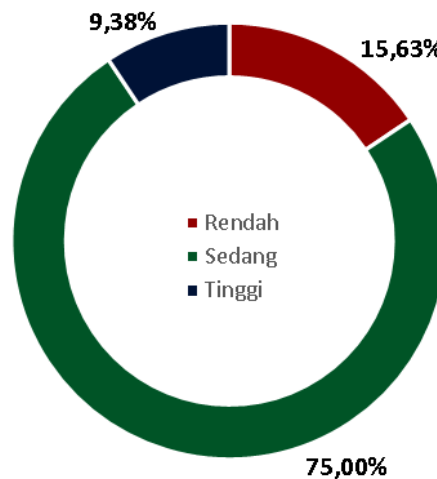


Gambar 51. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sidoarjo

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Sidoarjo berdasarkan urusan pemerintahan sudah cukup merata karena mencakup 17 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Sebagian besar

urusan inovasi adalah inovasi pada urusan fungsi penunjang lainnya sejumlah 7 inovasi kemudian diikuti dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sejumlah 5 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 5 (lima) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pendidikan, urusan perumahan rakyat serta kawasan permukiman serta urusan sosial masing-masing dengan 1 inovasi.

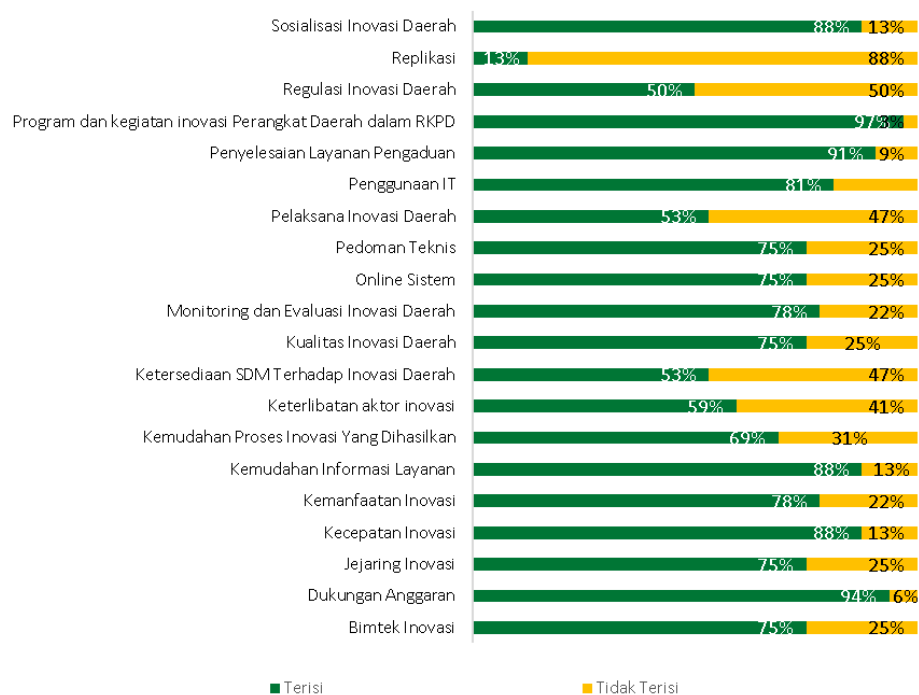
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 52. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sidoarjo

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sidoarjo sejumlah 5 (15.63%) inovasi memiliki skor kematangan yang rendah, kemudian 24 (75.00%) inovasi memiliki skor kematangan sedang serta 3 (9.38%) inovasi memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

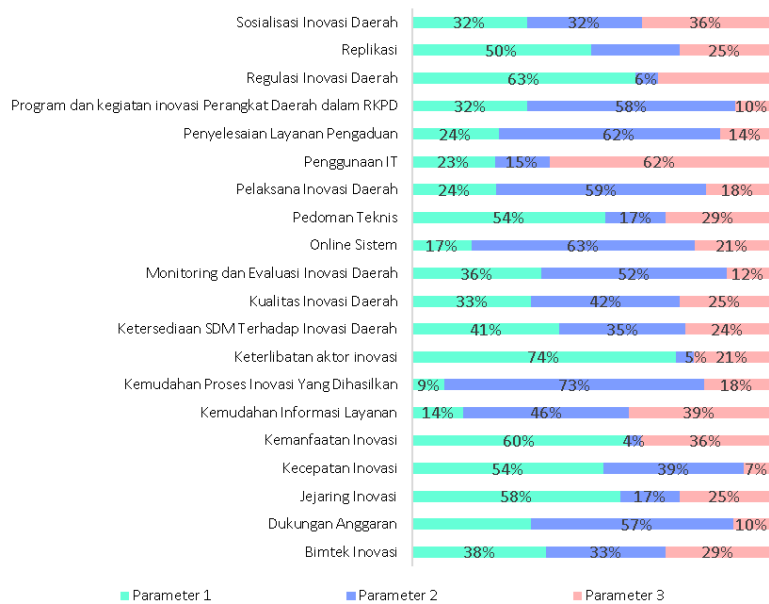


Gambar 53. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo

Dari 32 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sidoarjo, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 27.34% sedangkan 72.66% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD yaitu sebesar 97%. Hal tersebut berarti bahwa hampir keseluruhan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sidoarjo telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi sebesar 13% yang artinya hanya 4 dari 32 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sidoarjo telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penggunaan IT yaitu sebesar 62%. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan yaitu sebesar 73% artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Keterlibatan Aktor Inovasi yaitu sebesar 74% artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

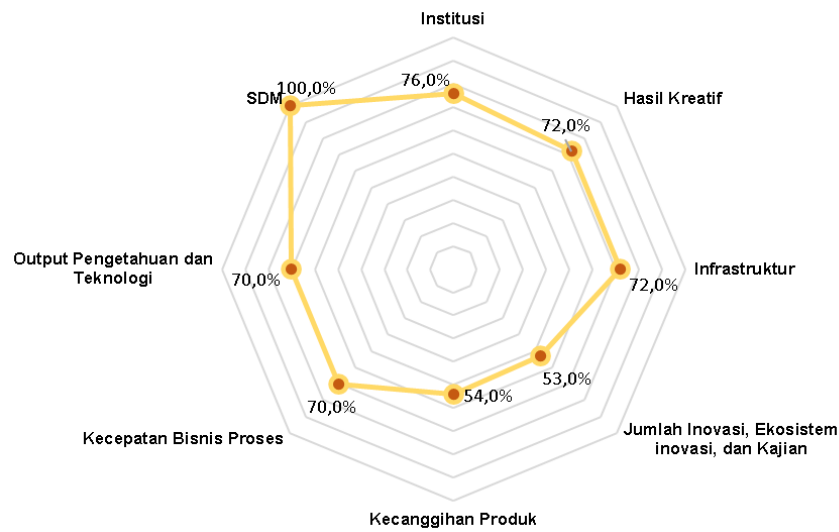
j. Daftar Inovasi Kabupaten Sidoarjo beserta Skor Kematangannya

Tabel 6. Daftar Inovasi Kabupaten Sidoarjo beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
RESTO APUNG PENATARSEWU	42
SEDEKAH ILMU UMKM	62
SEMeS 119 (Sidoarjo Emergency Medical Services 119) - update	68
Konfirmasi Status Wajib Pajak Elektronik (eKSWP & Integrasi BPN, DPMPSTSP & Kecamatan)	62
Takdol.shop sebagai Aplikasi Online Pemasaran Produk IKM Binaan Dekranasda Sidoarjo	85
RDS (Regional Development System)	82
DITAKOPUM (Digital Data Koperasi dan Usaha Mikro)	79

e-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) - upgrade	85
SINERGITAS KECAMATAN KABUPATEN SIDOARJO	53
Mini Mall Pelayanan Publik	51
SIPPADU 2.0 (Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu) -upgrade	88
APLIKASI SIPRAJA (SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO) - upgrade	135
Layanan E-Sedot Tinja Periodik	76
E-KGB (Kenaikan Gaji Berkala) -upgrade	72
E-BPHTB (Elektronik Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan)	78
DRIVE THRU UJI KIR -upgrade	76
IMS (Intelligence Monitoring System) -upgrade	67
E-BUDDY Teman Kerjaku	88
PEDULI DILAN (Peduli Disabilitas, ODGJ, dan Lanjut Usia) - update	102
LKBH (Layanan Konsultasi dan bantuan Hukum) -update	54
SIM-BMD (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah)	56
BOLAM (Bioskop Literasi Anak dan Masyarakat) -update	85
TORPIN (Motor Pintar) -update	68
MPK (Mobil Perpustakaan Keliling) -update	56
SIDIRA (Sidoarjo Information Digital Library) -upgrade	35
SIKSDA Kabupaten Sidoarjo -upgrade	59
PLAVON DUKCAPIL (Pelayanan via Online Dukcapil)	113
YANTIS (Layanan Antar Gratis)	66
GAPURA DELTA (Garda Petugas Registrasi Admuduk Desa/Kelurahan di Kota Delta)	23
KIA Back To School	25
LADEN (Aplikasi Pendaftaran Penduduk Non Permanen)	28
E-MONEV PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	72

F. KABUPATEN SITUBONDO



Gambar 55 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Situbondo

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Lombok Utara memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu sebesar 100.00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu sebesar 53.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



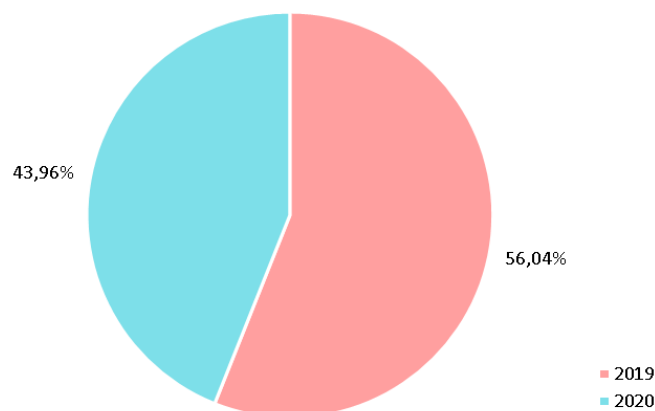
Gambar 56. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Situbondo

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Situbondo belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 1.08%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 1.08% dibandingkan tahun 2019. Namun hal ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang juga mengalami penurunan sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 1.02%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 1.02% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.29% dimana nilai tersebut sedikit lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan ternyata mengalami kenaikan sebesar 5.87%, nilai tersebut hampir mendekati standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 6.89% dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan kenaikan sebesar 8%. Sama halnya dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang mengalami kenaikan sebesar 68.81% dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.45%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Situbondo yang mengalami penurunan sebesar 0.81%, dimana nilai tersebut masih lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang ternyata turun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

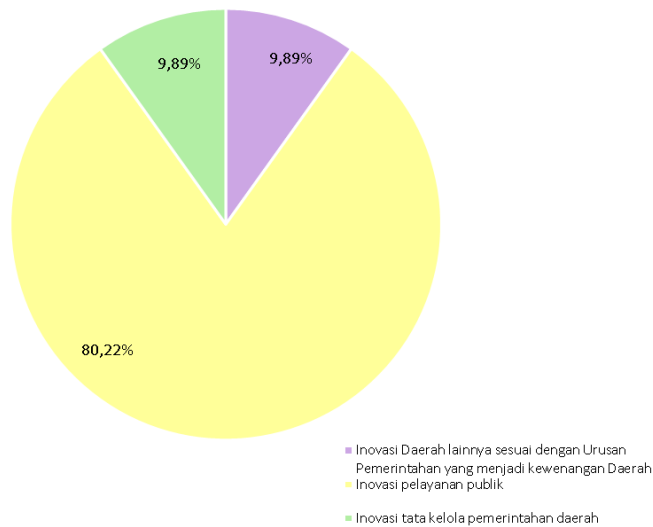


Gambar 57. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Situbondo

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Situbondo telah diterapkan pada tahun 2020 dan 2019. Terdapat 40 (43.96%) inovasi dari 91 inovasi

yang dilaporkan tersebut diterapkan pada tahun 2020 dan sisanya 51 (56.04%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

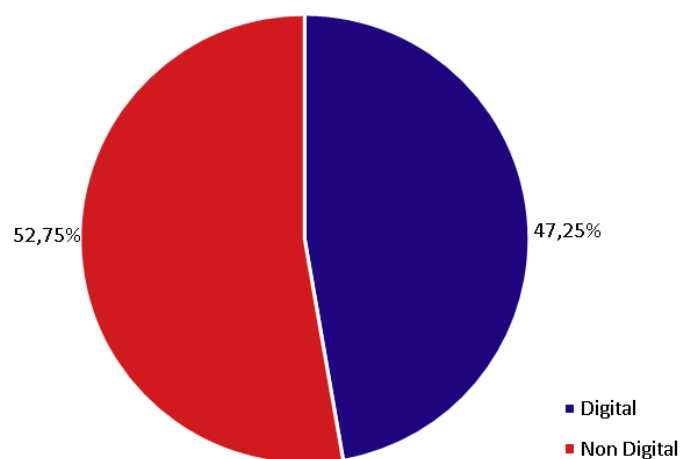
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Situbondo

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Situbondo, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi bentuk lainnya. Sebagian besar inovasi adalah inovasi pelayanan publik yaitu sejumlah 73 (80.22%) inovasi, kemudian 9 (9.89%) inovasi adalah inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Sedangkan, sisanya sejumlah 9 (9.89%) inovasi adalah inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

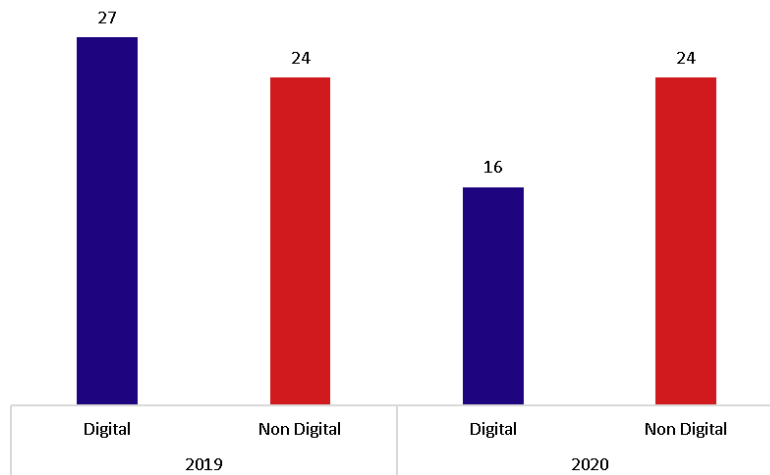


Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Situbondo

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 43 (47.25%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Situbondo merupakan inovasi

digital, kemudian 48 (52.75%) inovasi daerah lainnya merupakan inovasi non digital sedangkan untuk jenis inovasi teknologi belum dilaporkan.

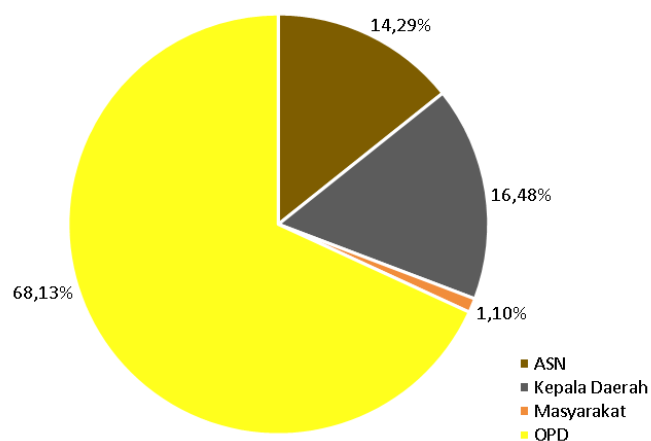
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 60. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Situbondo

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya untuk inovasi digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun yaitu pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 27 inovasi kemudian pada tahun 2020 berkurang menjadi 16 inovasi. Sedangkan untuk inovasi non digital tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan, dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan yaitu sejumlah 24 inovasi kemudian pada tahun 2020 masih sama jumlahnya dengan tahun 2019 yaitu sejumlah 24 inovasi. Sedangkan, untuk inovasi teknologi belum dilaporkan.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

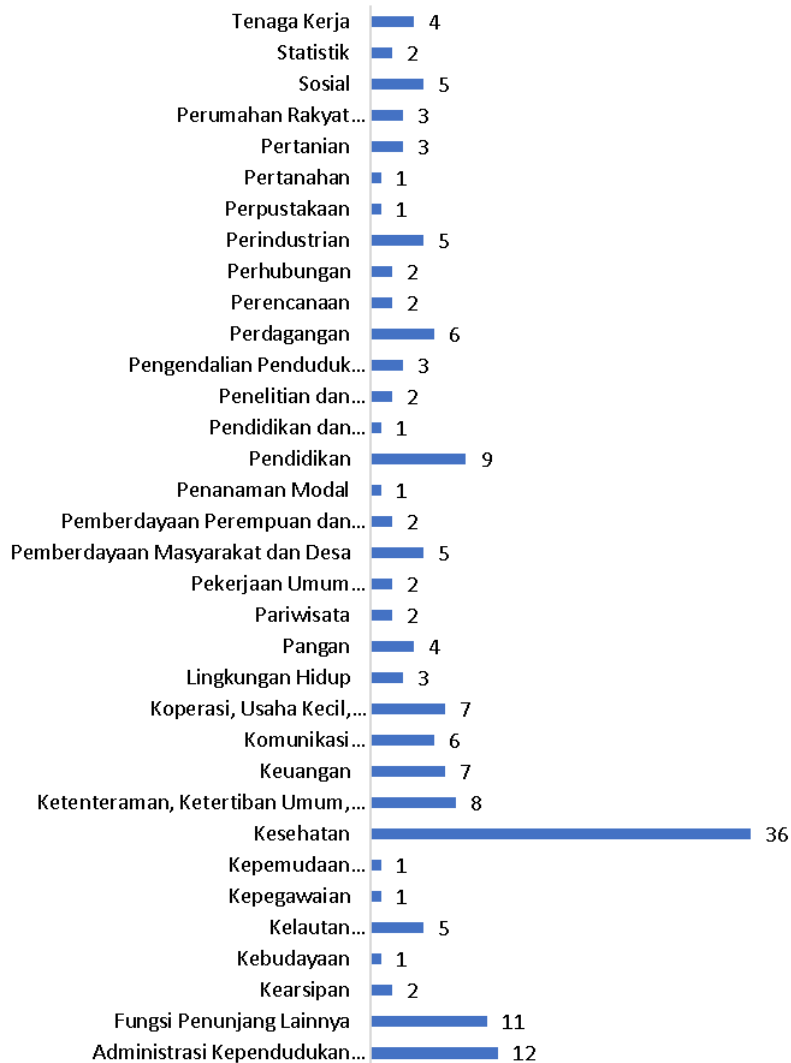


Gambar 61. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Situbondo

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah yaitu sejumlah 62 (68.13%) inovasi, 15 (16.48%) inovasi diinisiasi oleh

Kepala Daerah, 13 (14.29%) inovasi diinisiasi oleh ASN dan sisanya 1 (1.10%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

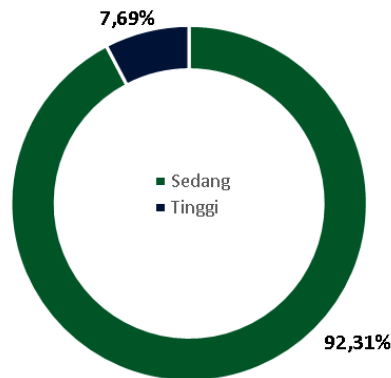
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 62. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Situbondo

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Situbondo berdasarkan urusan pemerintahan sudah merata karena mencakup seluruh urusan pemerintahan yang ada. Sebagian besar urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan sejumlah 36 inovasi kemudian diikuti dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sejumlah 12 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 5 (lima) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan sejumlah 36 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sejumlah 8 inovasi, urusan pendidikan sejumlah 9 inovasi, urusan perumahan rakyat serta kawasan permukiman sejumlah 3 inovasi serta urusan sosial sejumlah 5 inovasi.

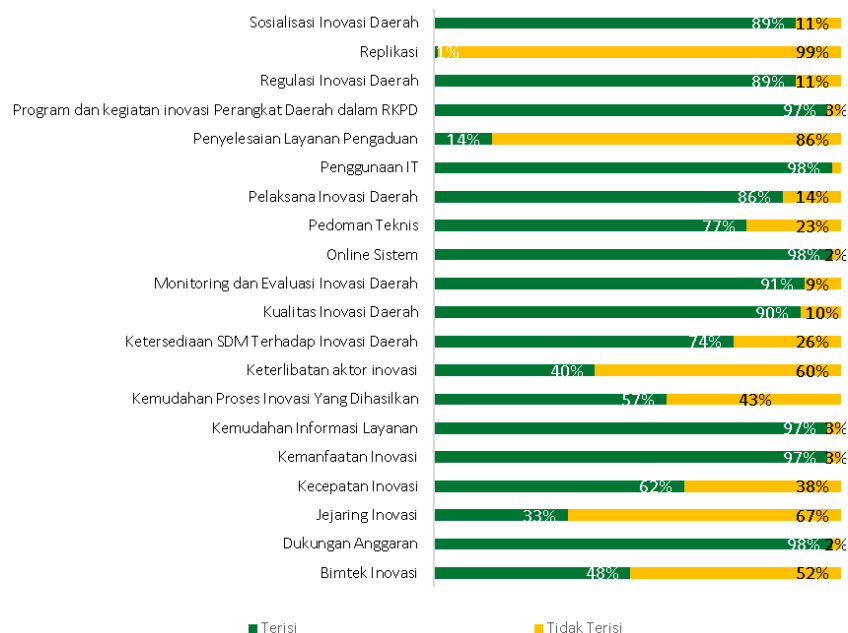
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 63. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Situbondo

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Situbondo sejumlah 84 (92.31%) inovasi memiliki skor kematangan sedang, kemudian sisanya 7 (7.69%) inovasi memiliki skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



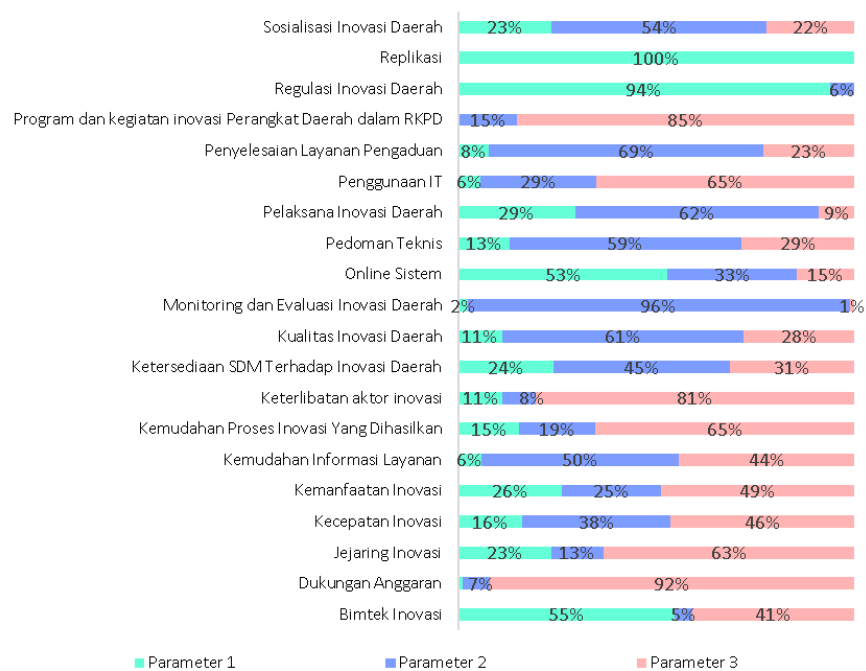
Gambar 64. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo

Dari 91 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Situbondo, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 28.30%

sedangkan 71.70% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar adalah indikator Dukungan Anggaran, Online Sistem, dan Penggunaan IT yaitu sebesar 98%. Hal tersebut berarti bahwa hampir keseluruhan inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Situbondo telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi sebesar 1% yang artinya hanya 1 dari 91 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Situbondo telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran yaitu sebesar 92%. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah yaitu sebesar 96% artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 100% artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Situbondo beserta Skor Kematangannya

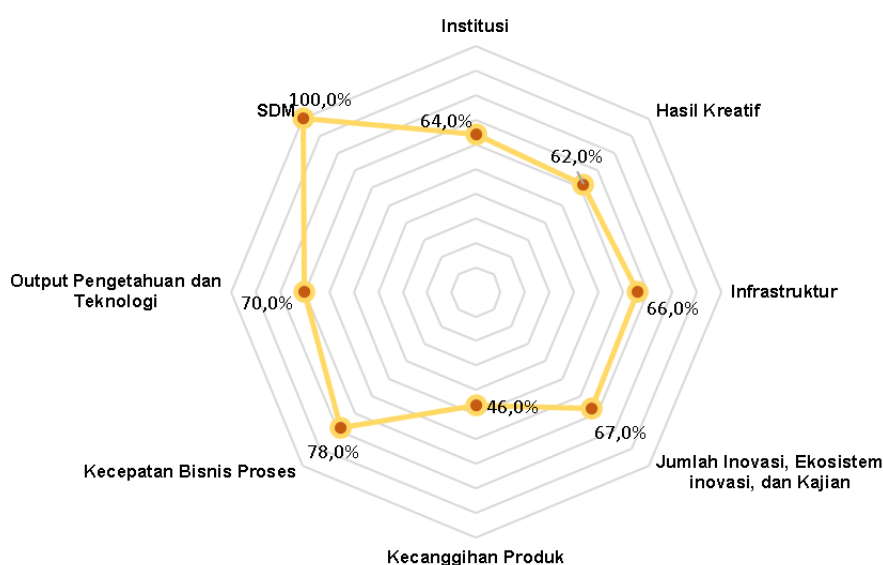
Tabel 7. Daftar Inovasi Kabupaten Situbondo beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
PANTURA MAS	83
SI-OMMnit (Sistem Informasi Obat Multi Manfaat Sub Unit)	97
Gerakan Tertib Administrasi Sapu Bersih Daftar Gadungan Pekerja Migran Indonesia (GENTA SERDADU PMI) Plus	78
Sedekah Jamban	82
PELANDUK CEPAT (Pelayanan Administrasi Kependudukan Cetak DiTempat)	76
BALADA AKHIR 3 in 1 (Bayi baru lahir dapat KK, KIA dan Akte Kelahiran)	76
PERMATA HATI (Perhatian–Bersama BALITA Sehat Insani)	80
OTT SINGA SABER (Operasi Tegur di Tempat dan Siap Mengawal Sungai Bersih)	81
PERISAI MAS (Pelayanan Sehari Selesai Masyarakat Senang)	78
PELANDUK CEKATAN (Pelayanan Administrasi Kependudukan Cetak di Kecamatan)	81
MALATE POTE (Masyarakat terLATih, Tanggap, Efisien, PrOfesional, dan TEpat)	80
POS PAKHSA PASWAN (Pelayanan Kesehatan Hewan Satu Atap)	74
Mobil Kutilang (Ukur Ulang, Tepat, dan Anti Curang)	84
Pajak Catering Online	98
EMPOK IMUT (KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI IMUNISASI UNTUK GENERASI SEHAT)	93
KOBESAHH (Komunitas Berak Anti Susah Payah)	96
SIDARA CANTIK (Sikat DemAm daRAh dengan CegAh Nyamuk dan jenTIK)	91
LENTERA (Layanan Elektronik Telemedicine Rawat Jalan RSAR) Tahun 2019	74
PUSGAR (PUSAT KEBUGARAN)	85
AMBUGELLU (Ambulan Gerak Langsung Layanan Umum)	72
PAGUYUBAN TB PLUS 2020	85
BARBEL (BERMAIN DAN BELAJAR) MONOPOLI "ISI PIRINGKU"	81
Labeng Settong (Pelayanan Kesehatan RSUD Besuki Terintegrasi Satu Pintu)	85
Bumil Silat di Kafe (Ibu Hamil Konsumsi Tablet Tambah Darah Melalui Kalender Fe)	73
Gunting Mitos Hipertensi (Penggunaan Kartu Monitoring Minum Obat Secara Teratur pada Penderita Hipertensi)	73
Klik-On Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	95
SISMIOP	90
SIMPADA	101
E - ARSIP	95
EMASDA	71

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PROGRAM SAPO SADHISA (SAMPAH PORNA SAMPAI DHISA)	106
KOBESSA	93
SiDul (sistem informasi schedule)	84
DC2T (Dinkes Command Centre and Theatre)	78
SIAB (Sistem Informasi Absensi)	78
BERKAT SI KEPANG (Pemberdayaan Masyarakat Atasi Kerawanan Pangan)	82
RATU KEMBANG (Perawatan Tumbuh Kembang) Puskesmas Panji	93
BILY Ber-KB KONDOM - Mobil Pelayanan Berkeliling KB dan Konseling ke Desa oleh Tim DPPKB	78
SILAO (Sistem Informasi Layanan Admindak Online)	101
PELAYANAN E-KTP KETERBATASAN KHUSUS (PESANKHU)	81
MASERBIL (Mari Sehat Bersama Ibu Hamil)	87
PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	106
SISTEM INFORMASI PERKEMBANGAN PERIKANAN (SI KEMBAR IKAN)	95
BPUM Online	107
Siaga Covid-19	110
Elektronik Barang Inventaris (EBI) Sehati dengan Masyarakat Bersahabat dengan Corona	97
SITUBONDO TERA'	97
APLIKASI RPMT (Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi)	95
SIMESSEM (Sistem Informasi Manajemen Elektronik Sehat Mantab)	76
DATA TUNGGAL DAERAH - ANALISIS KEMISKINAN PARTISIPATIF (DTD-AKP)	94
SITUBONDO INKLUSI TERINTEGRASI (SINERGI)	80
RUMAS (Rumah Kemasan)	71
DILAN MELAR (Diversifikasi Nelayan Melalui Usaha Garam Rakyat)	77
PELARI (Pelayanan Malam Hari)	92
Program Inovasi Berlian Melalui OKOB (One Kader One Bumil)	74
SPAM-BERGAYA (SPAM - BERENERGI TENAGA SURYA)	78
eSurat	91
IDAMAN HTI (endoskopi Dijamin AMAN dengan HipnoTerapi)	82
JEBOL E-KTP	85
WebGIS	83
JEMPOL PATEN MAPAN (JEMPUT BOLA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN MASA PANDEMI)	102
kripek paru (Kita Perangi Penyakit paru-paru)	78
JEBOL IMB PLUS	77
Apel Tenda Akuntabilitas Kinerja Pemkab Situbondo	75
PERI CANTIK ("PERlakukan Istimewa pada CALON Ibu Untuk Turunkan Kematian Ibu dan Kematian Bayi ")	82
SIGARDU (sistem siaga terpadu)	85

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Penerapan Road Transport and Traffic Management Center (RTTMC) dan Area Traffic Control System (ATCS)	71
Program Anti Kemiskinan/ Anti Poverty Program (APP)	76
HALLO BUNDA	81
E-AGENDA	80
WISATA KK26	87
Kelas Produktivitas Pekerja Perempuan Desa Gelung (KP3)	69
TREKS (tim reaksi cepat kecamatan situbondo)	78
KONSERVASI WISATA EDUKASI DI KAMPUNG BLEKOK DUSUN PESISIR TIMUR DESA KLATAKAN KEC. KENDIT KABUPATEN SITUBONDO	88
BLT DAJEK	85
LAKONTANWA 2.0 (Layanan Komprehensif Kesehatan Jiwa)	72
AIR LIMUN (APRESIASI IBU PINTAR PEDULI IMUNISASI)	75
ARGOPURO WALIDA (KOPI LERENG ARGOPURO)	92
PONDOK KOPI	71
Aplikasi Belanja	83
MERONA (Melawan Corona)	76
VIA LAIN (Video Animasi dalam Pembelajaran Interaktif)	75
SEMPOL (Sistem Elektronik Manajemen Perpustakaan Online) SMPN 2 PANARUKAN	73
CBT ONLINE SPENSA BERSINAR SMPN 1 ASEMBAGUS	87
Checkpoint	77
MENUMBUHKAN MINAT BACA SISWA MELALUI PROGRAM E-BACA DI SMPN 4 SATU ATAP ASEMBAGUS	70
LOGISTIK COVID-19	92
Aplikasi Karantina	83
LIPSTIK SPEGAS (Layanan Inovatif Publik Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi SMPN 3 Situbondo)	73
CENTING MELATI (CEGAH STUNTING MELALUI OPTIMALISASI PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH REMAJA PUTRI)	72
PENDATAAN POTENSI EKONOMI KEBERSAMAAN (KOBESSA)	93

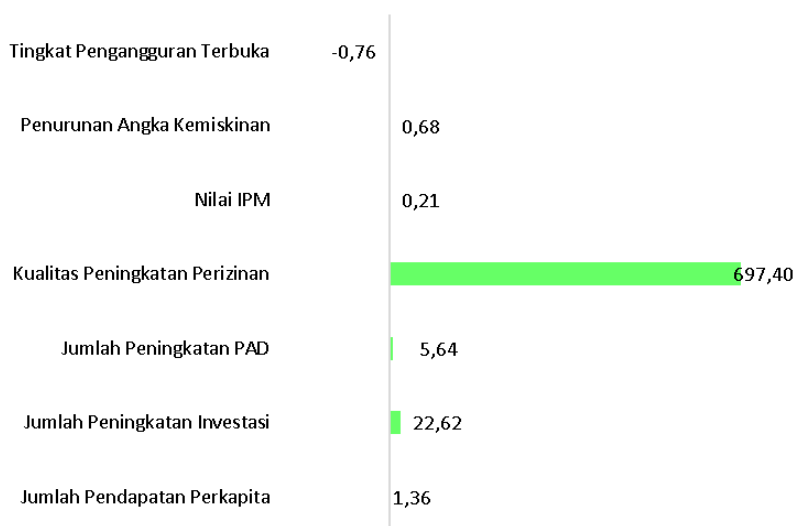
G. KABUPATEN SUMENEP



Gambar 66 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Sumenep

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sumenep memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu sebesar 100%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Kecanggihan Produk masih cukup rendah, yaitu sebesar 46.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 67. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumenep

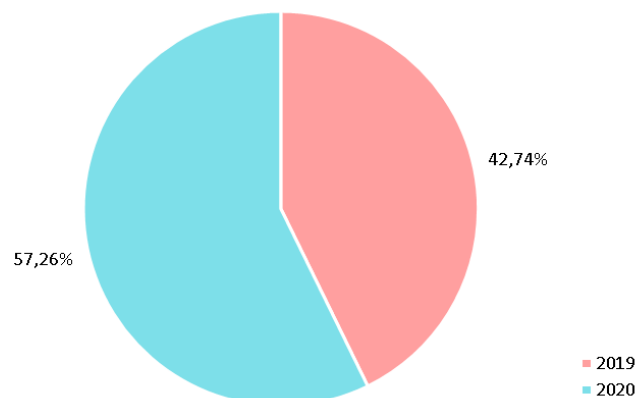
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah

Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Sumenep belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.76%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 0.76% dibandingkan tahun 2019. Namun hal ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang juga mengalami penurunan sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0.68%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin turun sebesar 0.68% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hal itu telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang juga mengalami kenaikan sebesar 0.02% bagi jumlah penduduk miskin. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan sebesar 0.21% dimana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan ternyata mengalami kenaikan sebesar 697.40%, namun nilai tersebut sangat tinggi jika dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 5%. Sehingga, kemungkinan data yang diinput tersebut tidak sesuai dengan data yang diminta oleh sistem aplikasi indeks inovasi daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 5.64% dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menunjukkan kenaikan sebesar 8%. Sama halnya dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang juga mengalami kenaikan sebesar 22.62% dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.45%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Sumenep yang mengalami kenaikan sebesar 1.36%, dimana nilai tersebut masih lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang ternyata turun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

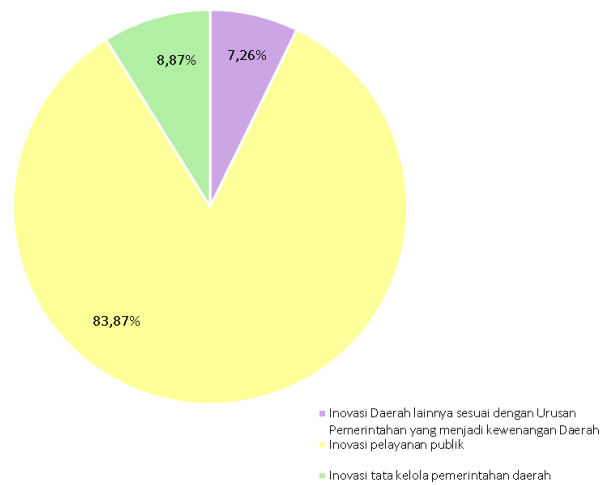


Gambar 68. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Sumenep

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumenep telah diterapkan pada tahun 2020 dan 2019. Terdapat 53 (42.74%) inovasi dari 124 inovasi yang

dilaporkan tersebut telah diterapkan sejak tahun 2019 dan sisanya 71 (57.26%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

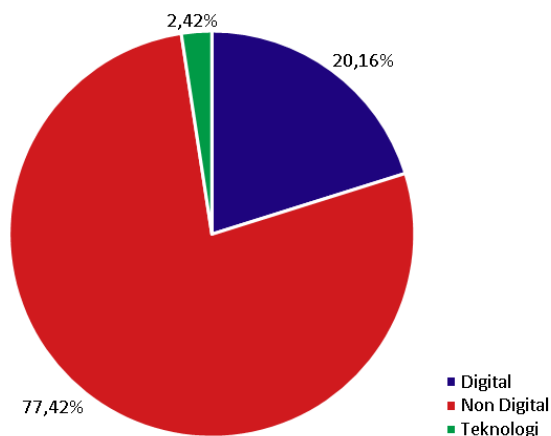
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Sumenep

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 (tiga) bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumenep, yaitu inovasi pelayanan publik sejumlah 104 (83.87%) inovasi, inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sejumlah 9 (7.26%) inovasi serta inovasi tata kelola pemerintahan daerah sejumlah 11 (8.87%) inovasi.

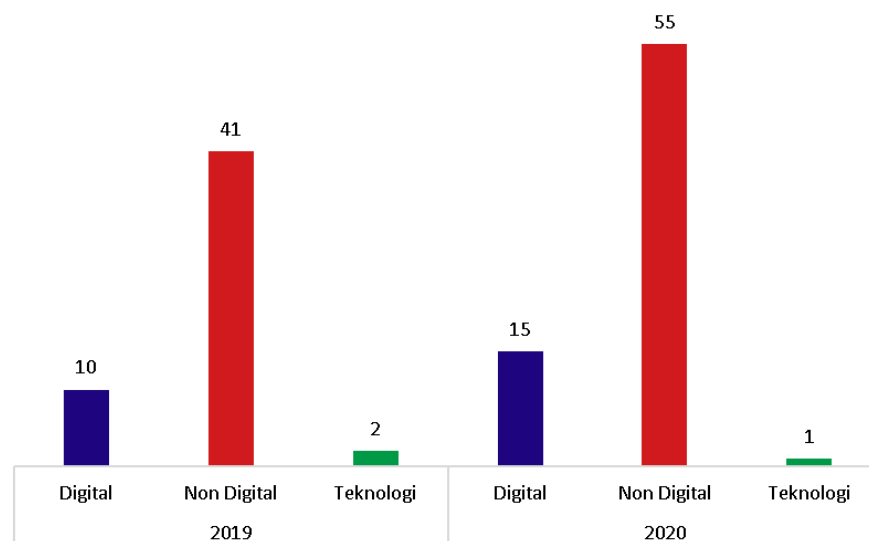
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Sumenep

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 25 (20.16%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumenep merupakan inovasi digital, kemudian 96 (77.42%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital dan sisanya sejumlah 3 (2.42%) inovasi merupakan inovasi teknologi.

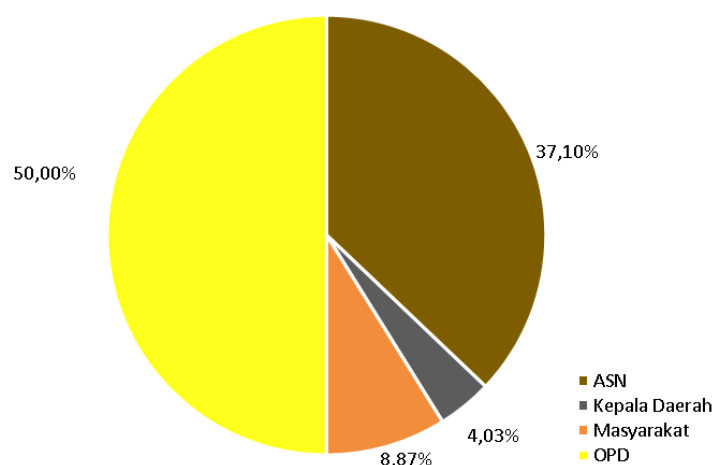
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 71. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Sumenep

Secara umum jumlah inovasi mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya untuk inovasi digital dan non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat yaitu pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan hanya sejumlah 10 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 15 inovasi. Sedangkan untuk inovasi non digital juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan hanya sejumlah 41 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 55 inovasi. Sedangkan, untuk inovasi teknologi mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi kemudian pada tahun 2020 berkurang menjadi 1 inovasi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

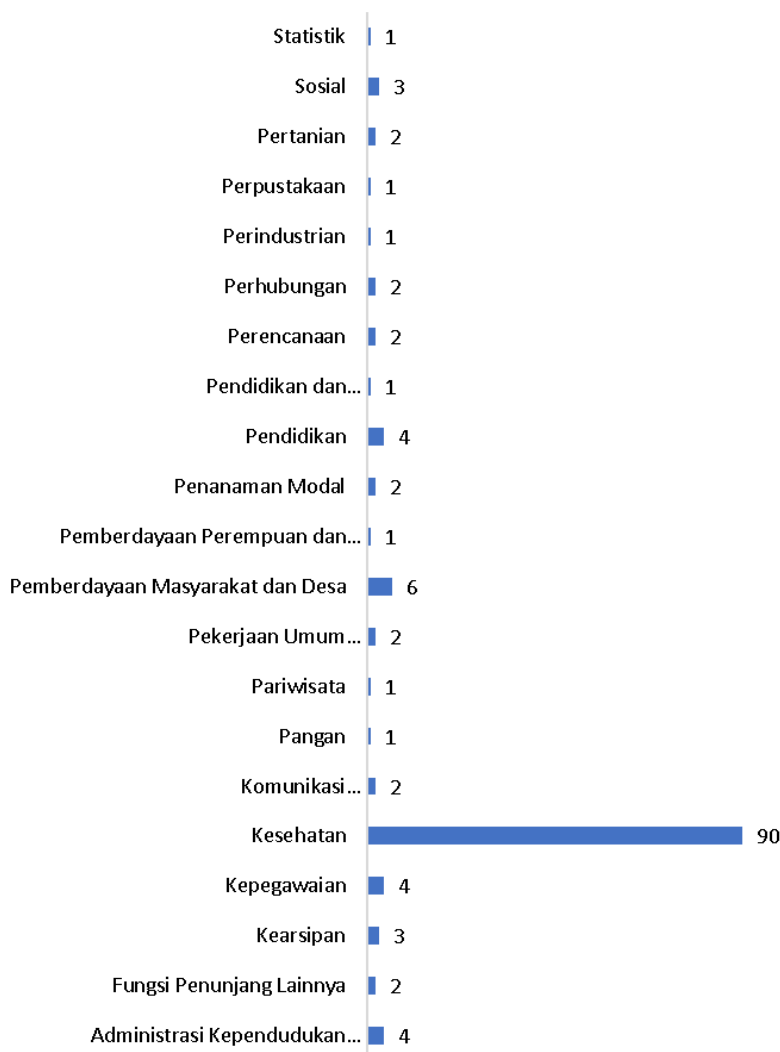


Gambar 72. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Sumenep

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah yaitu sejumlah 62 (50.00%) inovasi, 5 (4.03%) inovasi diinisiasi oleh

Kepala Daerah, 11 (8.87%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat dan sisanya 46 (37.10%) inovasi diinisiasi oleh ASN. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

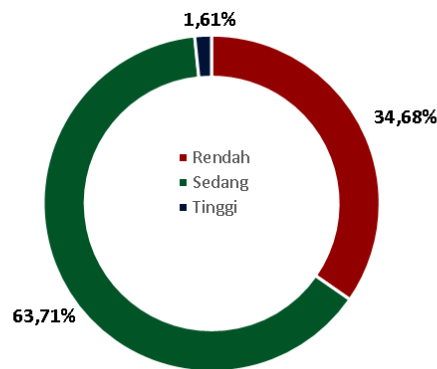
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 73. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Sumenep

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Sumenep berdasarkan urusan pemerintahan sudah cukup merata karena mencakup 21 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Sebagian besar urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan yaitu sejumlah 90 inovasi kemudian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sejumlah 6 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 4 (empat) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 90 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan 2 inovasi, urusan pendidikan dengan 4 inovasi, dan urusan sosial dengan 3 inovasi.

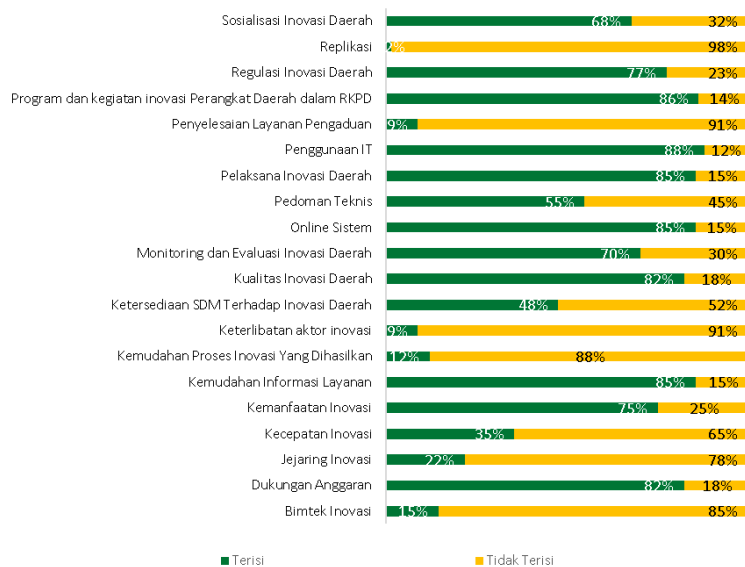
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 74. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Sumenep

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumenep sejumlah 43 (34.68%) inovasi memiliki skor kematangan yang rendah, kemudian 79 (63.71%) inovasi memiliki skor kematangan sedang serta 2 (1.61%) inovasi memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



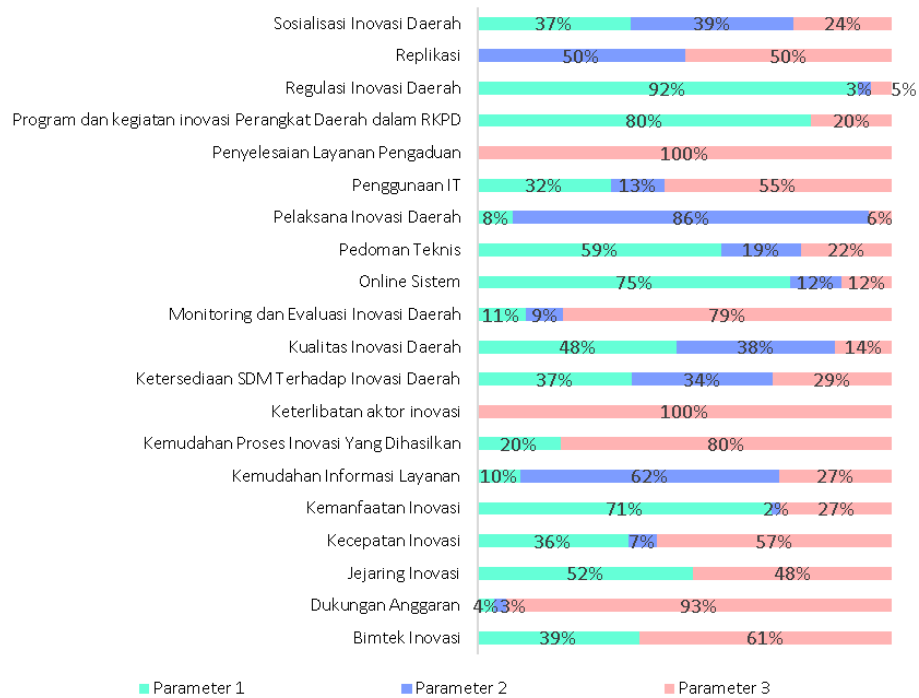
Gambar 75. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep

Dari 124 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumenep, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 45.44% sedangkan 54.46% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang

memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar adalah indikator Penggunaan IT yaitu sebesar 88%. Hal tersebut berarti bahwa semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumenep telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi sebesar 2% yang artinya hanya terdapat 2 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Sumenep telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Keterlibatan Aktor Inovasi dan Penyelesaian Layanan Pengaduan yaitu sebesar 100%. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah yaitu sebesar 86%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah yaitu sebesar 92%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Sumenep beserta Skor Kematangannya

Tabel 8. Daftar Inovasi Kabupaten Sumenep beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Layanan Mobil Perpustakaan Keliling	62
SIMAS PRO (SISTEM INFORMASI PRODUK HUKUM)	64
PENINGKATAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) MELALUI APLIKASI SIMBANGLUH	83
SJDIH (SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM)	37
SISTEM APLIKASI HITUNG DAN LAPORAN OBAT	36
JEMARI PTM (Jelajah Bersama Mencari Penyakit Tidak Menular)	48
SIKAP RUHAN PHBS (AKSI KADER PEDULI RUMAH TANGGA PERCONTOHAN)	51
SIMANTAP	33
Datuk Emas Berchating (Dari Dan Untuk Masyarakat Bersama Kita Cegah Stunting)	62
SAKURA SANTIK (Bersama Kurangi Sampah Plastik)	53
JALIN RAGA & JALIN RASA (Jalan-Jalan Lihat Garam Warga & Jalan-Jalan Lihat Garam di Sekolah)	44
KANCIL KABBI ASAPOK (Kader Cilik Keluarga untuk Bebas Asap Rokok)	44
BERSAMA KA' MUGI (BELAJAR SAMBIL BERMAIN KESEHATAN MULUT DAN GIGI)	47
DAPUR KAMPUNG (Pendampingan Dan Kunjungan Rumah Kepada Keluarga Tidak Mampu Untuk Blita Kurang Gizi)	40
SAMPER BUMILA (Bersama Perhatikan Ibu Hamil Dan Melahirkan)	42
POS TAWADU (POSYANDU KESEHATAN JIWA TERPADU)	37
EDI TANSIL (Emo Demo Kreasi PMT sehat dan bergizi lengkap)	38
Gardu Cemara Udang (Gerakan Terpadu Cek Kesehatan Masyarakat Legung Demi Masa Depan Gemilang)	44
PAK CAMAT SERBU KETUPAT (Pantau Kilat Calon Mama Terpadu serta Kunjungan Ibu Hamil dengan Ketuk Periksa & Catat)	38
GARDU TURIS (Gerakan Terpadu Turunkan Risiko Tinggi AKI & AKB)	51
SIC (Smart ID Card)	47
SINERGI (Sistem Informasi Kinerja Pegawai)	71
Wayang Profesi	37
SATGAS PENTING (satuan petugas pencegahan dan pengendalian stunting)	35
JEMPUT BOLA PASIEN PROLANIS (JEBOL PAKANIS)	36
(KELIPP) Kelompok Ibu Pintar dan Peduli Balita Stunting, Gizi Kurang, dan Gizi Buruk	40
PDKT (Pengobatan Darah Tinggi Dengan Kartu Berobat)	39

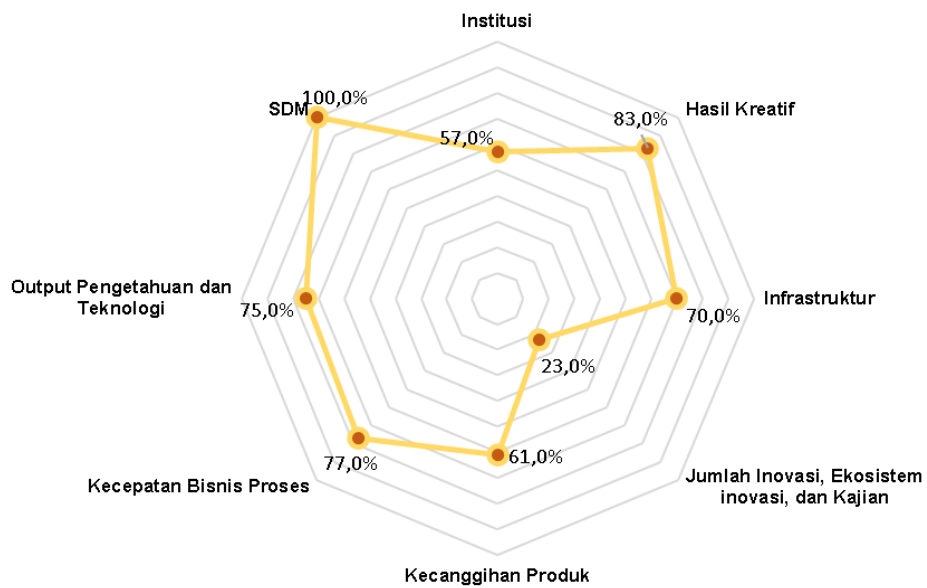
NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
JUM'AT MENABUNG (Menebar Nasi Bungkus) Oleh SDIT Al-Wathoniyah	32
KASIH SEIBA	27
AKSI GAGAS SEHAT (Aplikasi Keluarga Sehat)	51
PETANDA (Pemberdayaan kader untuk penjemputan dahak)	37
Sistem Informasi Manajemen Pengendalian, Evaluasi, dan Laporan Pembangunan Daerah (SIMPEL) Sumenep	66
Posyandu Remaja Plus dengan Tase' Andhik Raga (Tabungan Sehat dan Pendidikan Remaja Gapura)	56
JUNINGSI (Jum'at Skrening Hipertensi)	39
KERAPAN FESTIVAL CARE	42
PAPA OK di Dapur (Pelayanan Kepangkatan yang Optimal dan Akurat di Wilayah Daratan dan Kepulauan Secara Responsive)	63
SAPE KERAB (Sistem Aplikasi Penyakit Tidak Menular dengan Remember Call Puskesmas Bluto)	64
Cabbhi Peddas (Cegah Anemi Pada Ibu Hamil untuk Peningkatan Bayi Balita Sehat dan Cerdas - Solusi Penurunan Kasus Stunting)	66
Gerdu Elit (Gerakan Terpadu Eliminasi Tuberkulosis)	65
Penaku Sakti (Pesantrenku Indah Sehat Santriku)	60
Kampung KB	84
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng (PUSYANGATRA Potre Koneng)	69
Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	79
Ayututinting (Ayo Turunkan Tingginya Angka Stunting)	65
Gertak Pelan (Gerakan Serentak Pengelola Lansia)	64
PSL (Puskesmas Sahabat Lansia)	48
Siti Tukul	57
SEJATI (Sehat Jiwa dan Produktif)	48
Dapur Data	48
Aplikasi Akanca Tani.com untuk pemasaran produk Pertanian Sumenep	107
SAMANTIK (SANTRI PEMANTAU JENTIK)	76
DAMGAMIL (PENDAMPINGAN KELUARGA DENGAN IBU HAMIL)	79
LAKONEMA (Layanan Konseling Prima)	69
Warung ASCIK (Anak Sehat Cerdas Ibu Kuat)	88
SIG Jaringan Jalan Kabupaten Sumenep	53
GEMAR SEMARAK (Gerakan Masyarakat Semangat Tanpa Asap Rokok)	63
GERBANG SALAM AYUMI (Gerakan Bareng Masyarakat Selamatkan Bayi dan Ibu Hamil Resti)	77
Gempitaku	82
Gema Dusun	66

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Mitra Dadu (Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi)	45
TERATASI (Temukan, Antar, Obati, Awasi sampai sembuh)	68
USMAN IBU LIMA (Usaha Pemantauan dan Penanganan Ibu Hamil dengan Anemia)	89
DANSA WAMIL (Bidan Desa Whatsapp Ibu Hamil)	80
PATM POMPA AIR TANPA MOTOR	55
MODAL LARI COVID (Modifikasi Alur Pelayanan dan Screening Pada Masa Pandemi Covid - 19)	70
BERANDA TBC (BERangkat ANtar DAhak)	70
GAK RUGI (Gerakan Ayo Ke RUMah Gizi)	69
Berdonor Darah Sayang Ibu (BERDASI)	33
PERJAKA 1 M (PERangi geJAla batuK selama 1 Minggu)	64
"Si Duta Tensi" (OPTIMALISASI POSBINDU UNTUK PEMANTAUAN HIPERTENSI)	83
MEDICINE NETWORK (Jaringan Obat)	49
Calter (Call Center Puskesmas nonggunong)	47
Si Cantik Penting (Aksi Calon Pengantin Dalam Pencegahan Stunting)	62
Sukma Unti (Masuk Rumah Puntung Mati)	70
Dagu Lina Santik : Pemberdayaan Guru Peduli Anak Agar Sehat Andal Terampil Inovatif dan Kreatif	58
Pertiwi IVA (Pertiga Bulan Wajib Ikut Pemeriksaan IVA)	45
Beraksi (Berantas Anak Kurang Gizi)	67
Kasi Bulin (Kader Siaga Ibu Bersalin)	57
Jaga Hati Mas (Jamban Keluarga Sehat Idaman Masyarakat)	53
GRAAVITASI BUKIA (Gerakan Revitalisasi Buku Kesehatan Ibu dan Anak) untuk Pencegahan Stunting	68
Debat Simanis (Deteksi Dini & Pengobatan Hypertensi dan Kencing Manis)	60
Mapala (Masyarakat Peduli Demam Berdarah)	61
MANTEN BELI AIR MATENG (Manajemen Kontrol Hypertensi dan Diabetes militus Bersama Puskesmas Lenteng)	68
RUSIGA (RUMAH SINGGAH JIWA)	65
EKZIS (Entaskan Kekurangan Gizi dan Stunting)	63
GERANDA (Gerakan Antisipasi Demam Berdarah)	76
CAK NO PASUNG	71
RABBANI (Remaja Bebas Narkotika)	53
PROGRAM IKTP (INVESTIGASI KONTAK TB PARU)	40
CASING 1000 (CEGAH STUNTING PADA 1000 HPK)	64
GERAKAN PEDULI REMAJA SEHAT,PRODUKTIF,BEBAS ASAP ROKOK DAN NARKOTIKA di WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATANG-BATANG (GEPE'ER SPBN)	69
DESA SIAGA TB PUSKESMAS GAPURA	24

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
GERMAS SEJI BATANG-BATANG (GERAKAN MASYARAKAT SEHAT JIWA DI BATANG-BATANG)	81
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumenep	87
CAKAS BLEWAH (Pelacakan Balita Dibawah Garis Merah)	105
SIMPONI (Sistem Pendaftaran Online)	66
EXCELLENT SERVICE "ES DEBU "(Datangi, Edukasi, Berikan izin Usaha)	67
Gemas Cemara Ceria (Gerakan Puskesmas Kangayan cegah balita dibawah garis merah (BGM) Dan cegah remaja anemia)	72
Susi Damila (Suami Siaga Dampingi Ibu Hamil dan Melahirkan)	77
PAS VASELINE I9 (PASUKAN VAKSIN KELILING COVID I9)	64
PUSKESMAS RAMAH ANAK	76
JJS KE MANTAN	54
Warung PTM	53
safe berlianku	61
MASKER PELINDUNG MASYARAKAT (Bersama Lakukan Gerakan Peduli Lindungi Lingkungan Melalui Pemberdayaan Masyarakat).	50
SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor)	29
Model Save Arsip Digital	64
CALLING BASIC (CALL CENTER SAYANG BAYI IMUNISASI BCG DAN CAMPAK)	59
Pusling Terpadu	32
PEDULI RASA (PELAYANAN TERPADU LANSIA RAMAH DAN SANTUN)	84
siproja (Eliminasi Problematika Remaja) dengan PKPR	74
CITA SAMAWA (Cepat, Inovatif, Tepat, Akurat, Setelah Akad Memperoleh Akta Nikah dan Dokumen Kependudukan Warga Negara Indonesia)	53
Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Via WhatsApp	33
GenRe elegan	28
KAPAL TONGKANG (Unit usaha penyeberangan laut BUMDes Gersik Putih)	29
SAMSAT ONLINE YANFA'U LINNAS DESA GAPURA TIMUR	92
BALADA (Basis Layanan Terpadu Desa) Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep	69
WISATA ALAM DAN EDUKASI MANGROVE DESA KEBUNDADAP TIMUR KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP	44
JEBOL (Jemput Bola)	90
SIDIGI (Sistem Informasi Desa Digital)	66
OpenSID (Sistem Informasi Desa)	61

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
WISATA PERTANIAN BUMDES JAYA SAMUDRA PASONGSONGAN	37
SEKOLAH DESA POSBANGDES (Posko Bangun Desa) Kecamatan LENTENG	44
SIKEMAS online (Surat Ijin Surat Masuk Online)	44

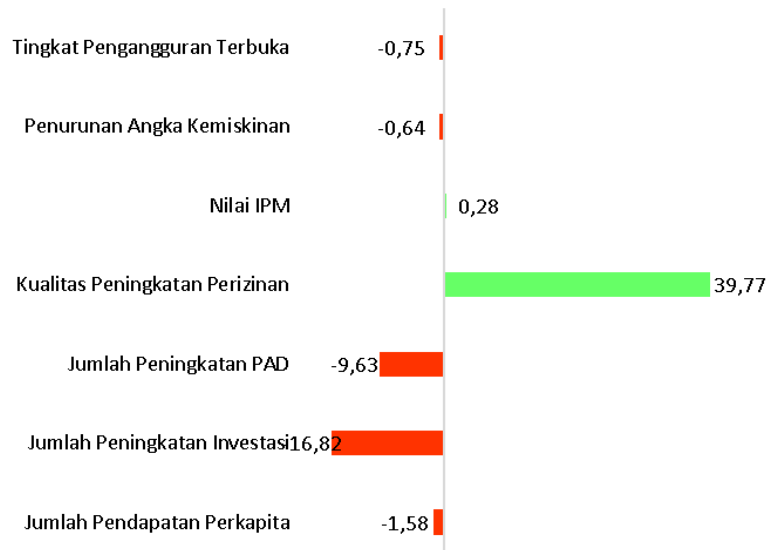
H. KABUPATEN TRENGGALEK



Gambar 77 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Trenggalek memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu sebesar 100%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 23.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



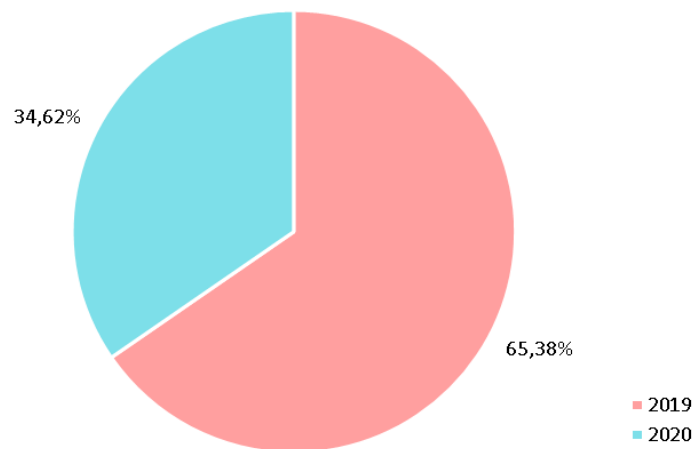
Gambar 78. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Trenggalek

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Trenggalek belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.75%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 0.75% dibandingkan tahun 2019. Namun hal ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang juga mengalami penurunan sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 0.64%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 0.64% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.28% dimana nilai tersebut sedikit lebih besar dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan juga mengalami kenaikan sebesar 39.77%, dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 9.63% dimana nilai tersebut jauh lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 8%. Sedangkan, indikator Jumlah Peningkatan Investasi juga mengalami penurunan sebesar 16.82% dimana nilai tersebut jauh lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.45%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Trenggalek yang menunjukkan penurunan sebesar 1.58%, dimana nilai tersebut hampir mendekati standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang juga turun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

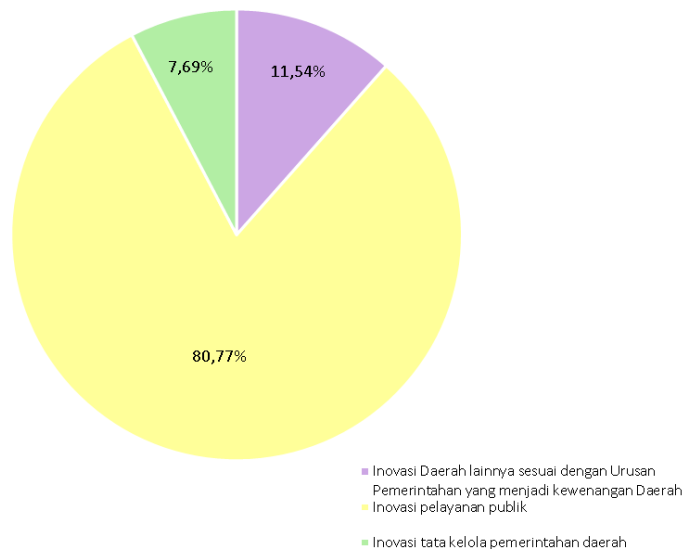
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 79. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Trenggalek

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Trenggalek telah diterapkan pada tahun 2020 dan 2019. Terdapat 17 (65.38%) inovasi dari 26 inovasi yang dilaporkan tersebut telah diterapkan sejak tahun 2019 dan sisanya 9 (34.62%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

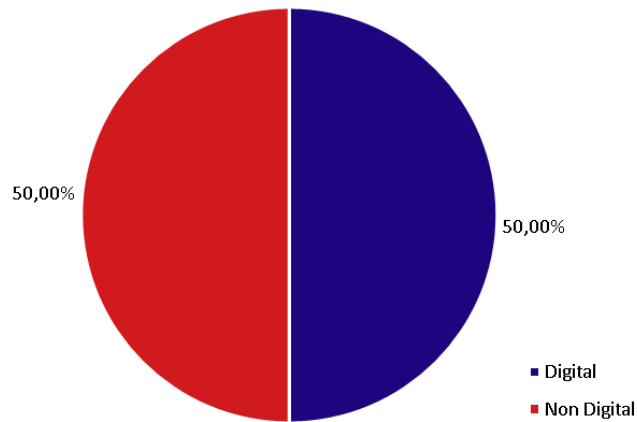


Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 (tiga) bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Trenggalek, yaitu inovasi pelayanan publik sejumlah 21 (80.77%) inovasi, inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

sejumlah 3 (11.54%) inovasi serta inovasi tata kelola pemerintahan daerah sejumlah 2 (7.69%) inovasi.

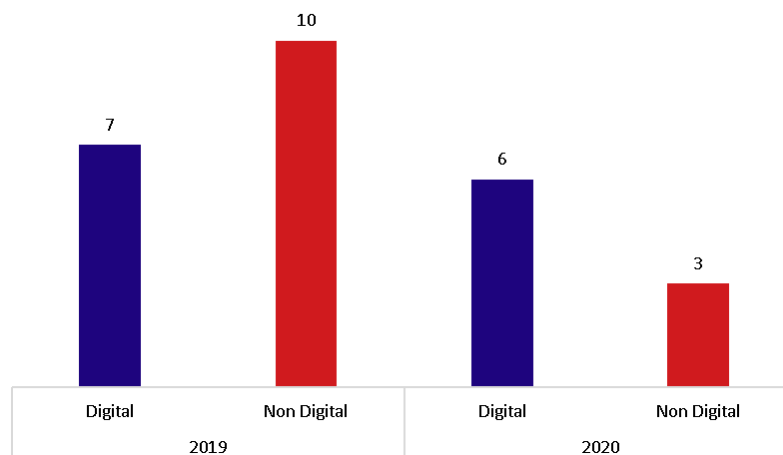
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Trenggalek

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 13 (50.00%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Trenggalek merupakan inovasi digital, kemudian 13 (50.00%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital sedangkan untuk jenis inovasi teknologi belum dilaporkan.

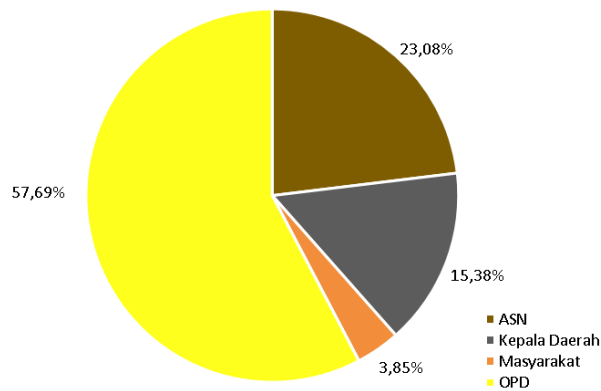
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 82. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Trenggalek

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya untuk inovasi digital dan non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun yaitu pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 7 inovasi kemudian pada tahun 2020 berkurang menjadi 6 inovasi. Sedangkan untuk inovasi non digital juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 10 inovasi kemudian pada tahun 2020 berkurang menjadi 3 inovasi.

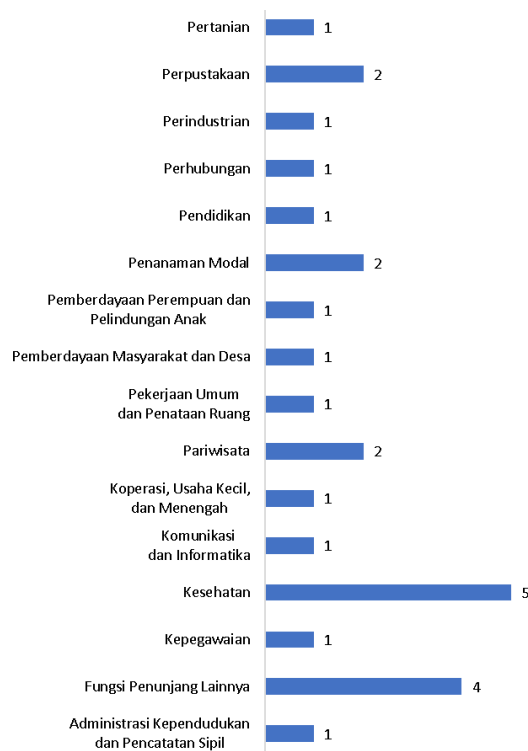
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 83. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Trenggalek

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah yaitu sejumlah 15 (57.69%) inovasi, 4 (15.38%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah, 1 (3.85%) inovasi diinisiasi oleh Masyarakat dan sisanya 6 (23.08%) inovasi diinisiasi oleh ASN. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

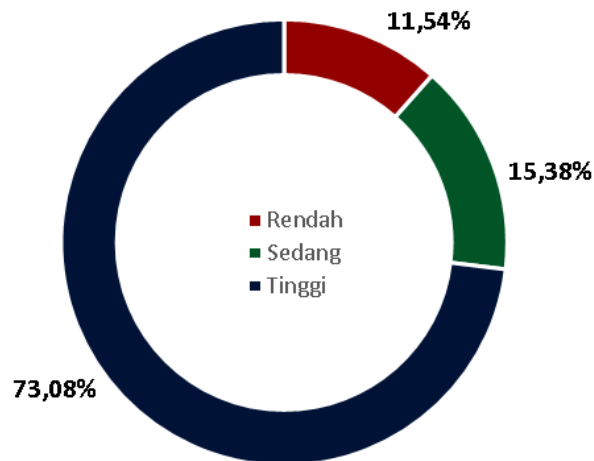


Gambar 84. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Trenggalek

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Trenggalek berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata karena mencakup 16 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Sebagian besar

urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan yaitu sejumlah 5 inovasi kemudian diikuti dengan urusan fungsi penunjang lainnya sejumlah 4 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 3 (tiga) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 5 inovasi, urusan pendidikan serta pekerjaan umum dan penataan ruang masing-masing dengan 1 inovasi.

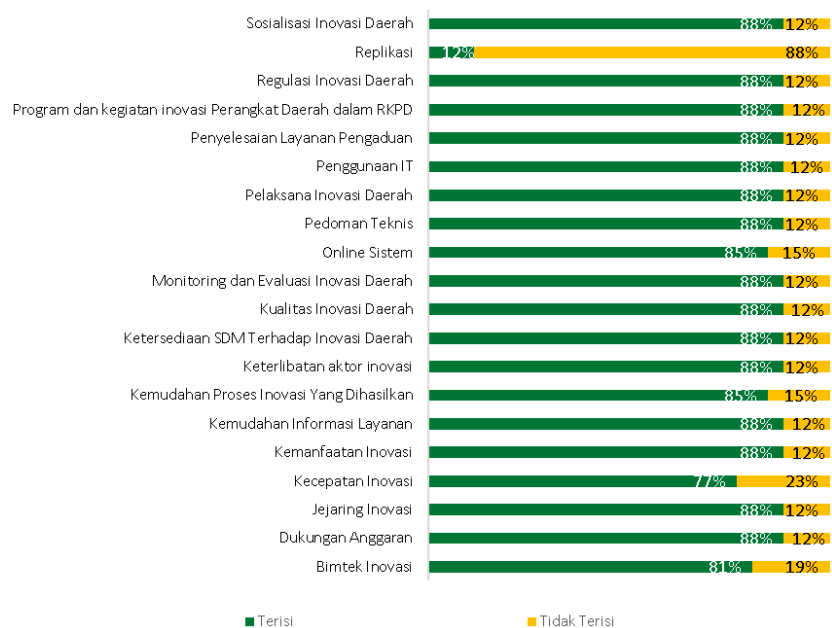
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 85. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Trenggalek

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Trenggalek sejumlah 3 (11.54%) inovasi memiliki skor kematangan yang rendah, kemudian 4 (15.38%) inovasi memiliki skor kematangan sedang serta 19 (73.08%) inovasi memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

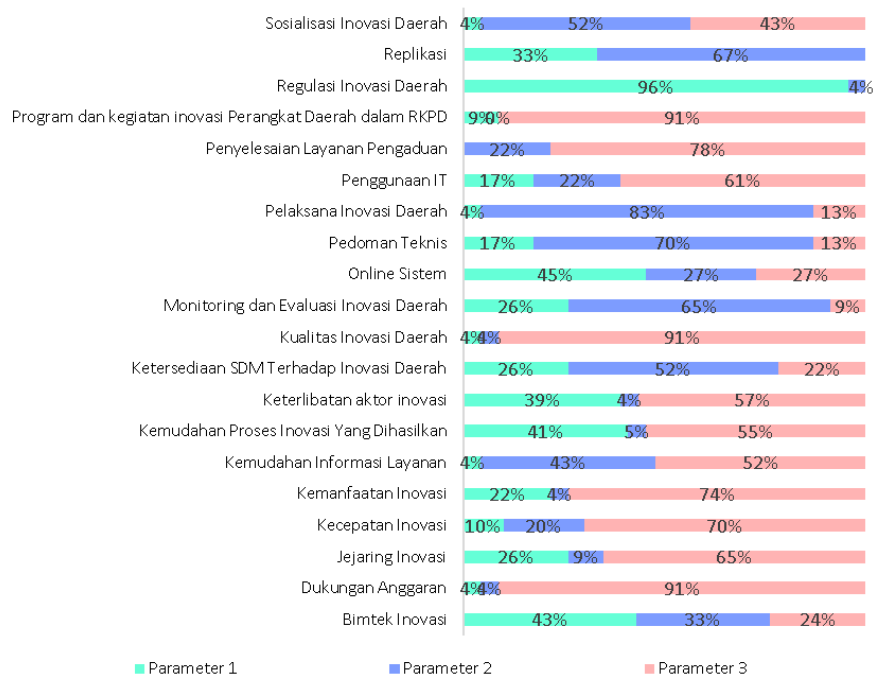


Gambar 86. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek

Dari 26 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Trenggalek, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 16.73% sedangkan 83.27% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar adalah hampir semua indikator kecuali indikator Bimtek Inovasi, Kecepatan Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Online Sistem, dan Replikasi yaitu sebesar 88%. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Trenggalek telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi sebesar 12% yang artinya hanya terdapat 3 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Trenggalek telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Program dan Kegiatan INovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Kualitas Inovasi Daerah, dan Dukungan Anggaran yaitu sebesar 91%. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah yaitu sebesar 83%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah yaitu sebesar 96%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

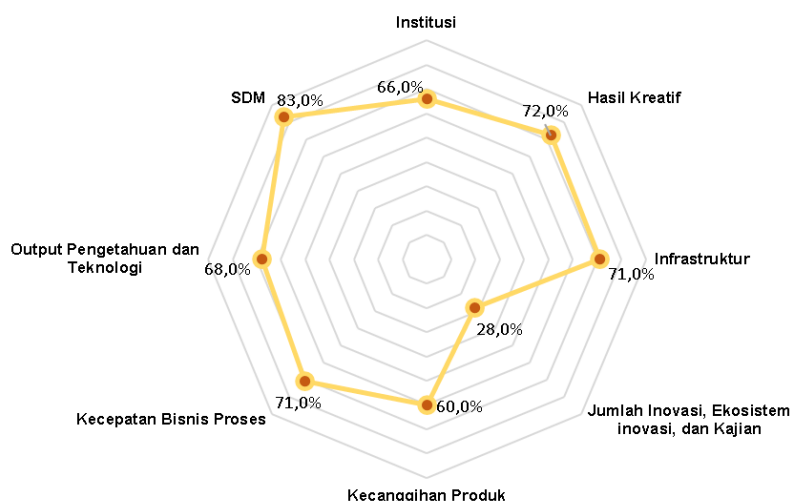
j. Daftar Inovasi Kabupaten Trenggalek beserta Skor Kematangannya

Tabel 9. Daftar Inovasi Kabupaten Trenggalek beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
On Demand CHS tourism Desa Wisata Durensari	0
NEW NORMAL RUMAH MAKAN PRODUKTIF HIGIENIS	0
NEW NORMAL MACOIN AJA PTSP	0
PENGANUGERAHAN SOETRAN AWARD	126
LELANG INVESTASI	101
TURDESS OSS UMKM	100
JEMPOL PERAK	104
PETUNGADADI (Pelayanan Tunggal Dengan Sepenuh Hati)	111

TAPP (Trenggalek Atsiri App)	102
SIKUDA LARI CEPATT (Sistem Informasi Kependudukan Desa Layanan Sehari Cetak Ditempat dan Tepat)	110
NASTAR (Nunggu Asyik Tambah Ilmu Tidak Stres)	107
SIP OK (Sistem Integrasi Pelayanan Online Kir)	124
SONJO DESO MULANG DESO (Sonjo Deso Monitoring Langsung Dengan Solid)	96
MOCO KORAN (Modifikasi Core Drill Untuk Konstruksi Jalan)	78
KENEK BERAKSI (Kakek Nenek Bersama Awasi Kesehatan Generasi)	104
SOWAN CODAM (Sosialisasi Melawan Covid-19 Dalam Damai)	113
Café DITA	125
CILEN (Pelayanan Cerita Online)	117
PENTAS PELUKAN (Pendampingan Tuntas Pelaku UMKM Munjungan)	86
SEPEDA KEREN (Suara Perempuan dan Kelompok Rentan)	103
SIDALAYAK (Sistem Informasi Daring Layanan Kepegawaian)	113
IPUSTAGA (I Perpustakaan Trenggalek)	129
BERSINAR (Bersama Deteksi Penyakit Tidak Menular)	98
PECAH BATU (Penghapusan Cacah Siswa yang Buta Baca Tulis)	112
LAPAK - 215 (Layanan Administrasi dan Perizinan berbasis Komunitas - Watulimo)	117
GELANG SILASTRI (Trenggalek Gemilang Sistem Pelayanan Standarisasi Industri)	107

I. KABUPATEN TUBAN

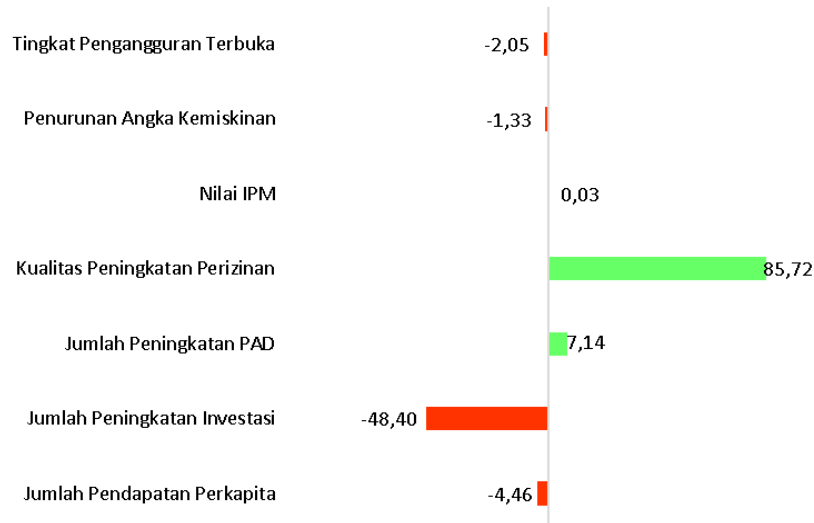


Gambar 88 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tuban

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu sebesar 83.00%. Artinya secara

umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 28.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 89. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tuban

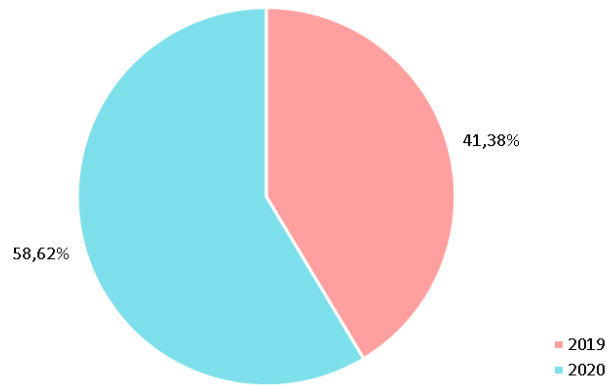
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tuban belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 2.05%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 2.05% dibandingkan tahun 2019. Namun hal ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang juga mengalami penurunan sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 1.33%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 1.33% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.03% dimana nilai tersebut sedikit lebih besar dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan ternyata juga mengalami kenaikan sebesar 85.72%, dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Tuban mengalami kenaikan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 7.14% dimana nilai tersebut sedikit lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 8%. Sedangkan, indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan sebesar 48.40% dimana nilai tersebut jauh lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 0.45%. Terakhir,

indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Tuban yang menunjukkan penurunan sebesar 4.46%, dimana nilai tersebut masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya turun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

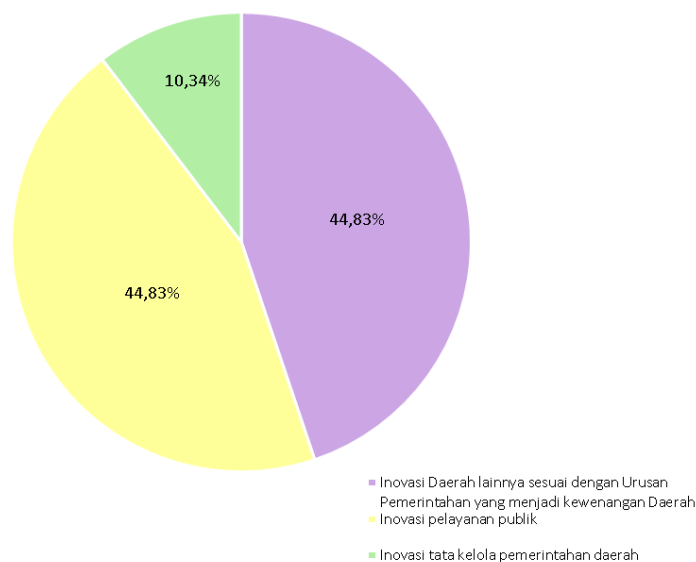
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 90. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tuban

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tuban telah diterapkan pada tahun 2020 dan 2019. Terdapat 12 (41.38%) inovasi dari 29 inovasi yang dilaporkan tersebut telah diterapkan sejak tahun 2019 dan sisanya 17 (58.62%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

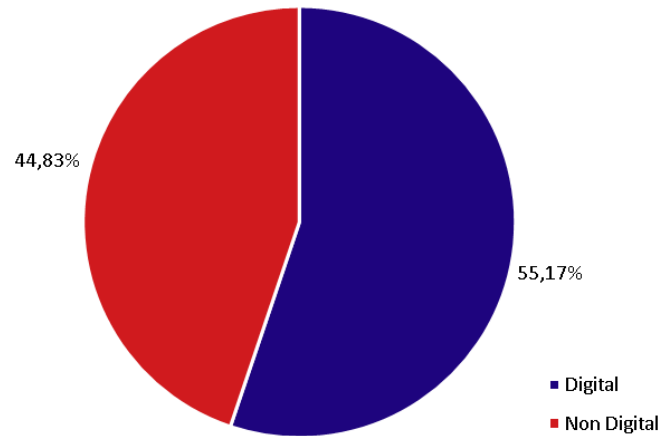


Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tuban

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 (tiga) bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tuban, yaitu inovasi pelayanan publik sejumlah 13 (44.83%) inovasi, inovasi

daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sejumlah 13 (44.83%) inovasi serta inovasi tata kelola pemerintahan daerah sejumlah 3 (10.34%) inovasi.

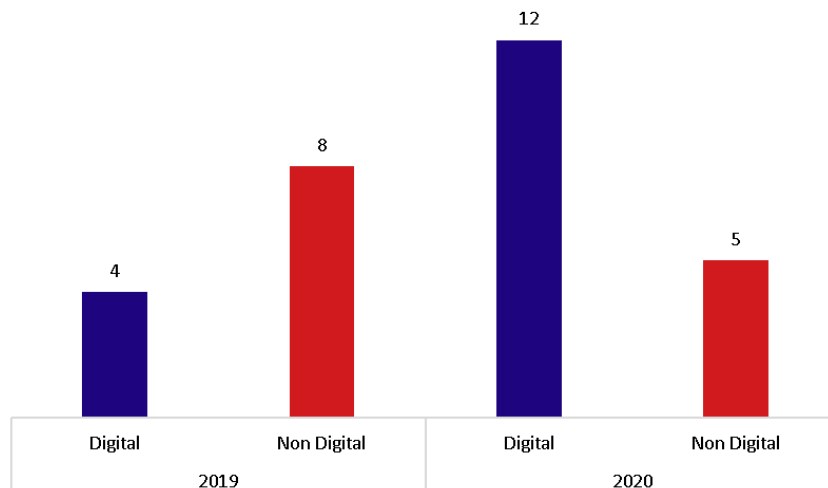
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tuban

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 16 (55.17%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tuban merupakan inovasi digital, kemudian sisanya sejumlah 13 (44.83%) inovasi merupakan inovasi non digital sedangkan untuk jenis inovasi teknologi belum melaporkan.

d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi

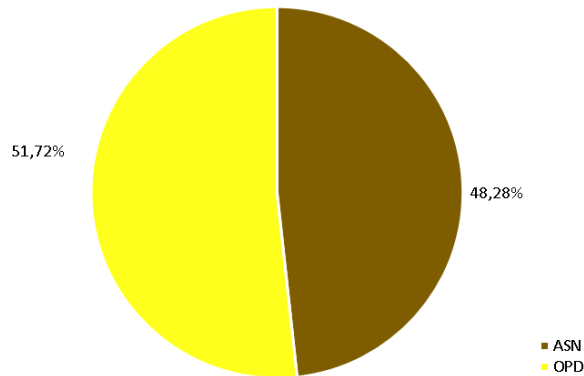


Gambar 93. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tuban

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya untuk inovasi digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan hanya sejumlah 4 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 12 inovasi. Sedangkan untuk inovasi non digital mengalami

penurunan, dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 8 inovasi kemudian pada tahun 2020 berkurang menjadi 5 inovasi.

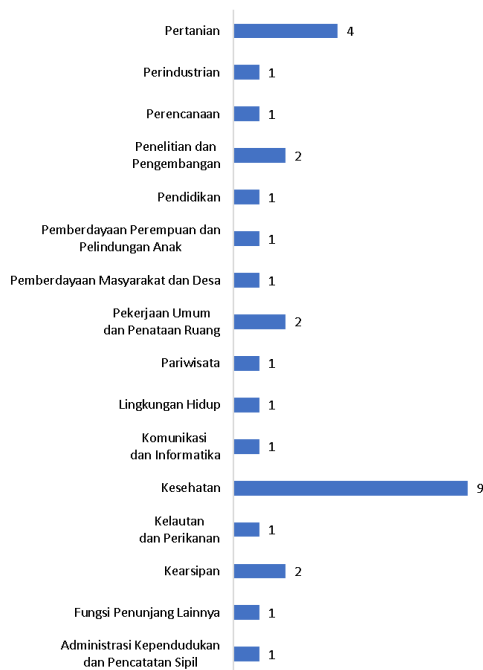
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 94. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tuban

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tuban pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah yaitu sejumlah 15 (51.72%) inovasi dan sisanya sejumlah 14 (48.28%) inovasi diinisiasi oleh ASN. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, Masyarakat, dan DPRD belum dilaporkan pada tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

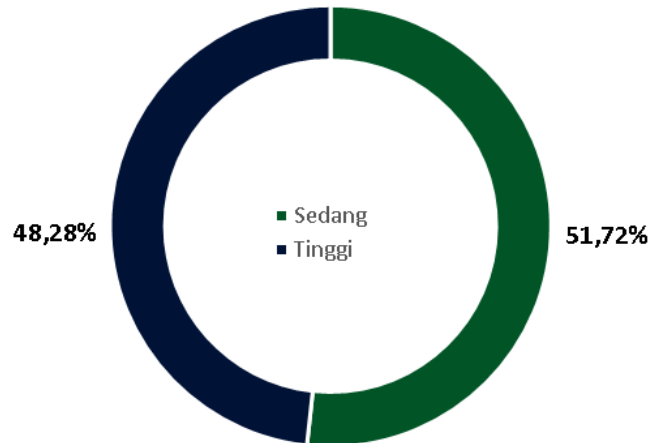


Gambar 95. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tuban

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Tuban berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata karena mencakup 16 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Sebagian besar urusan

inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan yaitu sejumlah 9 inovasi kemudian diikuti dengan urusan pertanian sejumlah 4 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 3 (tiga) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 9 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan 2 inovasi dan urusan pendidikan dengan 1 inovasi.

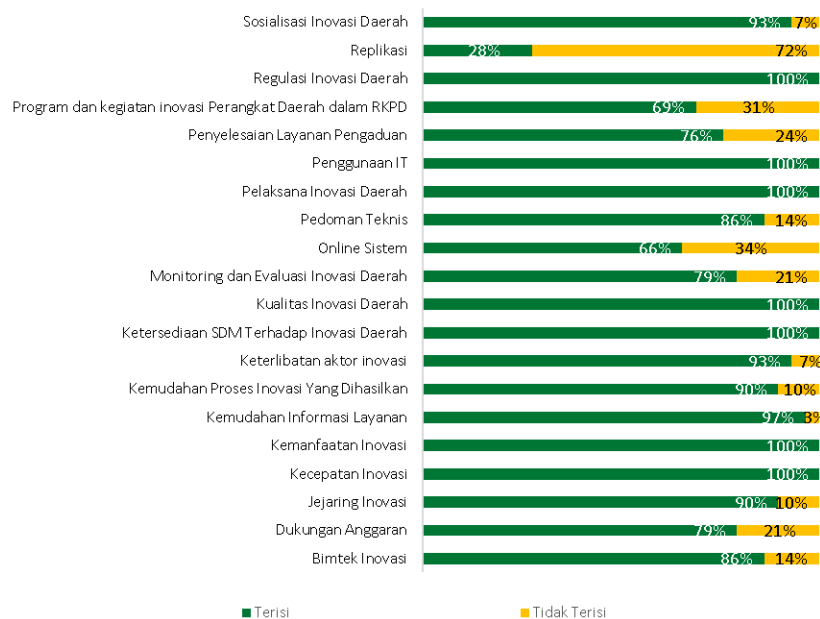
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 96. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tuban

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tuban sejumlah 15 (51.72%) inovasi memiliki skor kematangan sedang serta sisanya 14 (48.28%) inovasi memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

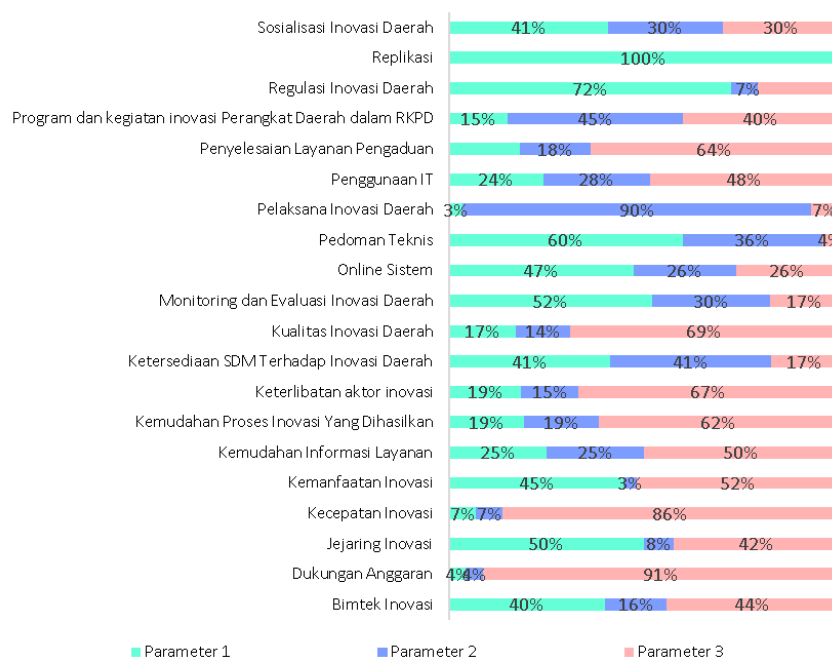


Gambar 97. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tuban

Dari 29 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tuban, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 13.45% sedangkan 86.55% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar adalah indikator Kecepatan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Pelaksana Inovasi Daerah, Penggunaan IT, dan Regulasi Inovasi Daerah yaitu sebesar 100%. Hal tersebut berarti bahwa semua inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tuban telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi sebesar 28% yang artinya hanya terdapat 8 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tuban telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Dukungan Anggaran yaitu sebesar 91%. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah yaitu sebesar 91%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 100%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

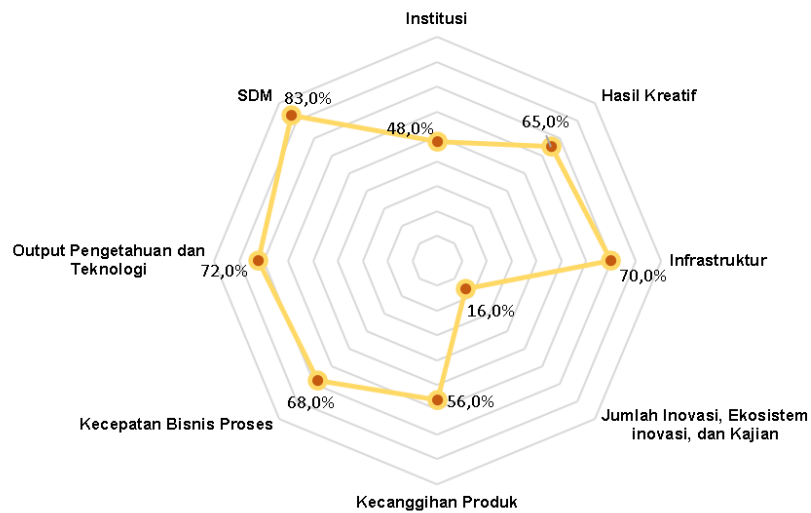
j. Daftar Inovasi Kabupaten Tuban beserta Skor Kematangannya

Tabel 10. Daftar Inovasi Kabupaten Tuban beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
WIDANG PRITY (Pelayanan Prima Berbasis Technology)	88
PAGUYUBAN STROKE "OBAH SITHIK JOSS"	84
TUBERNOVA - Tuban Berinovasi	107
JAGA TIRTA	123
KONFERENSI KAWAN (KOLABORASI ANTAR PROFESI UNTUK KELUARGA RAWAN)	98
SIKUPAS DEWA (SURVEI KEPUASAN PASIEN DENGAN WA/WHATSAPP)	59
TEMPELAN JIN	54
BELI MADU TB (Bersama Peduli Masyarakat Dukung TB)	86

SIPATIL HAPE	81
SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA (SIPUSPITA)	102
Optimalisasi Layanan Rumah Kemasan melalui aplikasi Si RUKEM (Aplikasi Pelayanan Rumah Kemasan)	85
KEMO HT (Kepatuhan Minum Obat Hipertensi)	72
PERNAH MUDA (Pendamping Arsip Dinas Harus Masuk Desa)	88
MODELING (Mobil Dongeng Keliling)	62
PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN MELALUI KASPER JOGET	92
JAGA GIGI SI UDIN	53
GERTAK MISTIK (Gerakan Serentak Membasmi Jentik) dengan Ikan Cupang	75
Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Tuban (SI DASI JABATAN)	121
SISTEM INFORMASI KELITBANGAN (SI ELIT)	110
Aplikasi sistem informasi gaji berbasis online (Si lga On Line)	93
PUAS DI HATI (Pupuk Asli Di Hasilkan Petani)	104
APLIKASI SISTEM INFORMASI PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP (SIPLaH)	106
DILAN (Digitalisasi pengendalian data Nelayan)	113
SITASMAN DILAMAR (SISTEM TANAM SISIP TANAMAN DI LAHAN MARJINAL)	107
SABUK HIJAU BUAT PETANI RING 1	108
SI PINTAR (aplikasi Pelayanan dan INformasi penaTAan Ruang)	112
SIPAJALEKA (Sistem Informasi Pelaporan Pertanian Tanaman Pangan)	105
Pendamping Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (Dayung Sampan)	114
APMD (SISTEM INFORMASI ANJUNGAN PELAYANAN MANDIRI DESA)	110

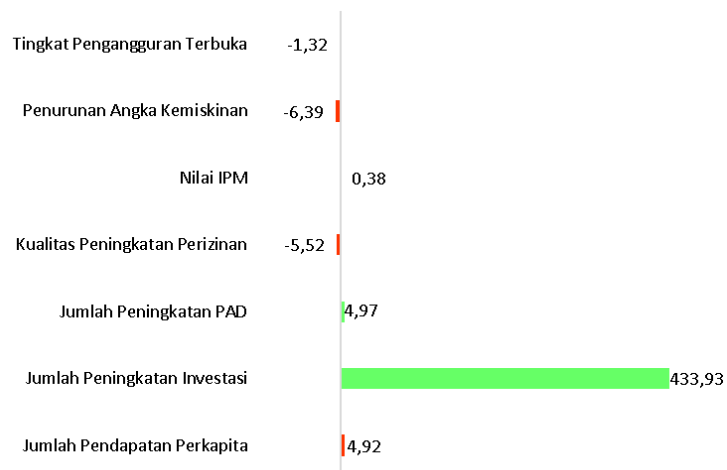
J. KABUPATEN TULUNGAGUNG



Gambar 99 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Sumbawa Barat memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu sebesar 83.00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 16.00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 100. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tulungagung

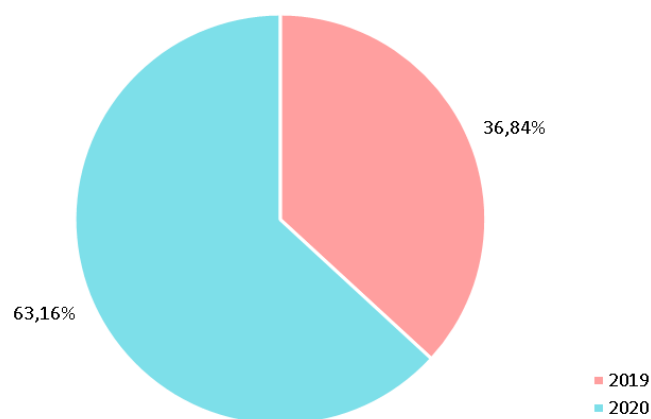
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah

Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tulungagung belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 1.32%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 1.32% dibandingkan tahun 2019. Namun hal ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang juga mengalami penurunan sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 6.39%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 6.39% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.38% dimana nilai tersebut sedikit lebih besar dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan ternyata mengalami penurunan sebesar 5.52%, dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 4.97% dimana nilai tersebut masih lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 8%. Sedangkan, indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami kenaikan sebesar 433.93% dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya naik sebesar 0.45%. Namun, kemungkinan data yang diinput pada indikator tersebut tidak sesuai dengan data yang diminta pada sistem aplikasi indeks inovasi daerah. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kabupaten Tulungagung yang menunjukkan kenaikan sebesar 4.92%, dimana nilai tersebut lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi

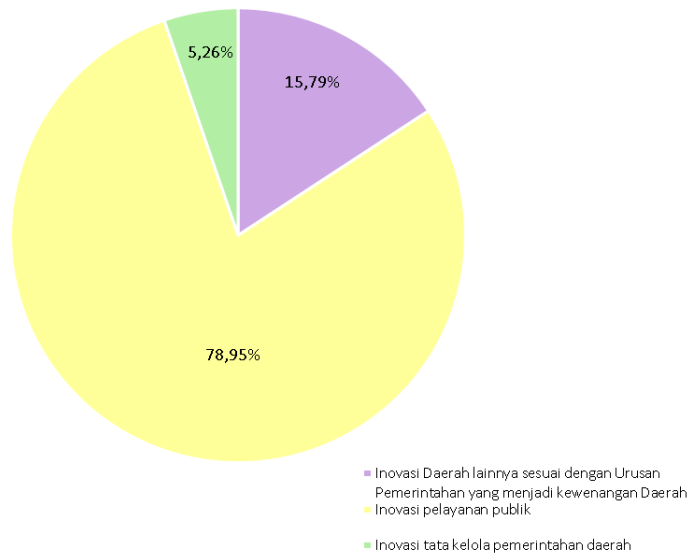


Gambar 101. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tulungagung

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tulungagung telah diterapkan pada tahun 2020 dan 2019. Terdapat 7 (36.84%) inovasi dari 19 inovasi yang

dilaporkan tersebut telah diterapkan sejak tahun 2019 dan sisanya 12 (63.16%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

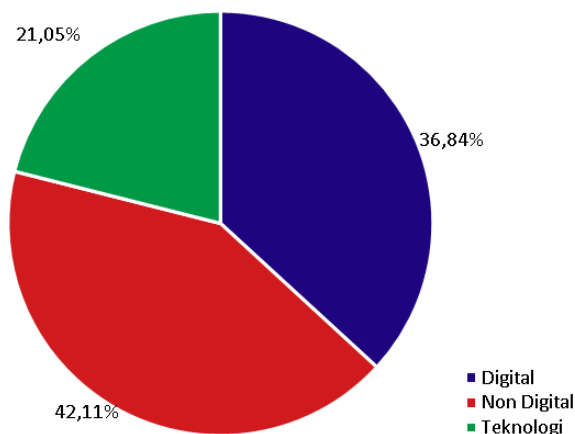
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 (tiga) bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tulungagung, yaitu inovasi pelayanan publik sejumlah 15 (78.95%) inovasi, inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sejumlah 3 (15.79%) inovasi serta inovasi tata kelola pemerintahan daerah sejumlah 1 (5.26%) inovasi.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

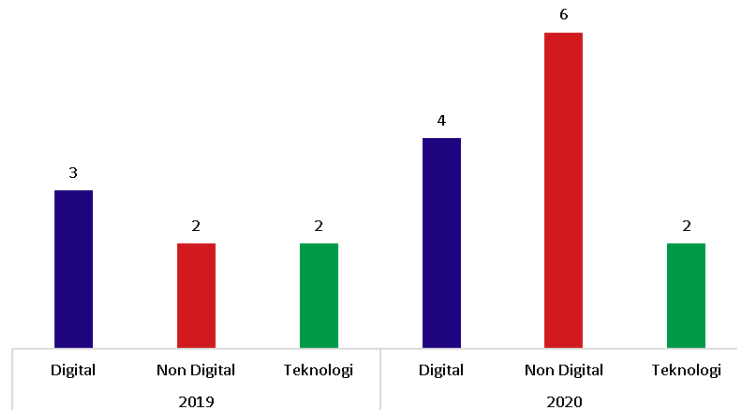


Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tulungagung

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 7 (36.84%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tulungagung merupakan inovasi digital,

kemudian 8 (42.11%) merupakan inovasi non digital sedangkan 4 (21.05%) inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

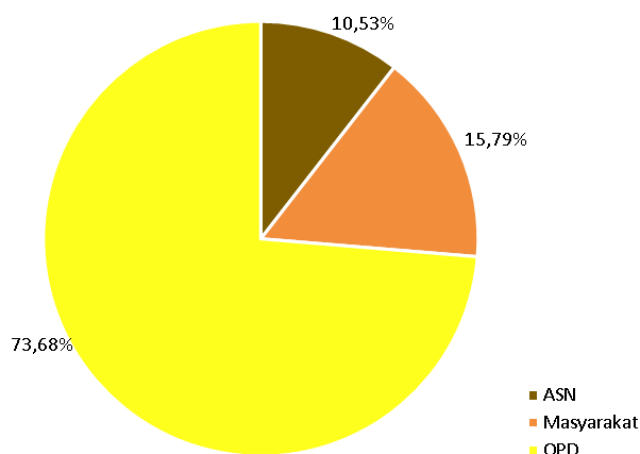
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 104. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tulungagung

Secara umum jumlah inovasi mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya untuk inovasi digital dan non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat yaitu pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan hanya sejumlah 3 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 4 inovasi. Sedangkan untuk inovasi non digital juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan hanya sejumlah 2 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 6 inovasi. Sedangkan, untuk inovasi teknologi tidak mengalami penurunan maupun kenaikan pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi kemudian pada tahun 2020 tetap sama yaitu sejumlah 2 inovasi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

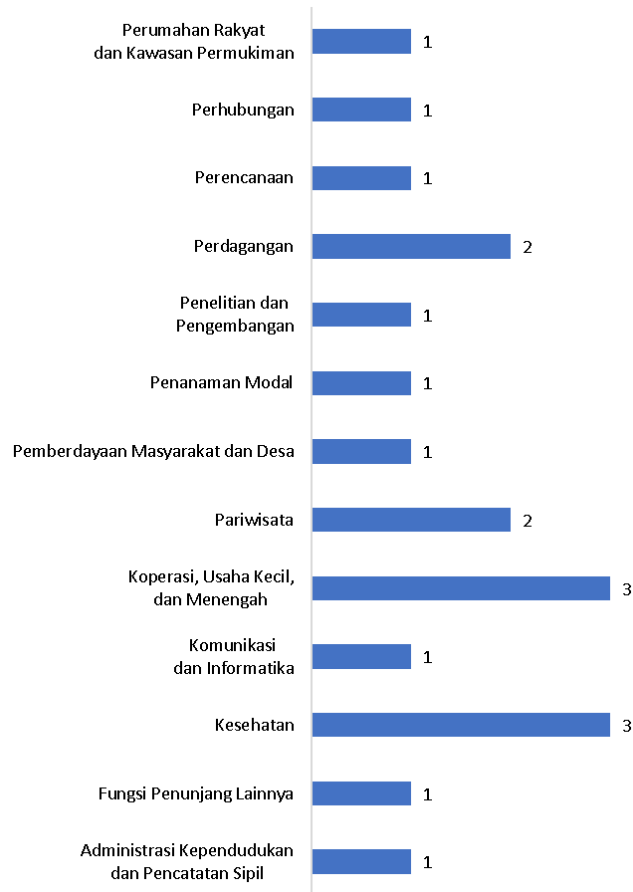


Gambar 105. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tulungagung

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah yaitu sejumlah 14 (73.68%) inovasi, kemudian 3 (15.79%) inovasi diinisiasi

oleh Masyarakat dan sisanya sejumlah 2 (10.53%) inovasi diinisiasi oleh ASN. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah dan DPRD belum dilaporkan pada tahun 2021.

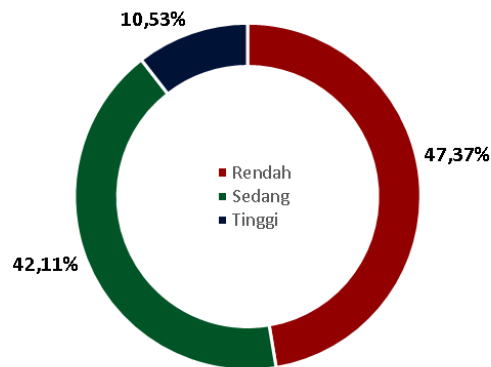
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 106. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tulungagung

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Tulungagung berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata karena mencakup 13 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Sebagian besar urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan yaitu sejumlah 3 inovasi kemudian diikuti dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah sejumlah 3 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 2 (dua) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan kesehatan dengan 3 inovasi serta urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan 1 inovasi.

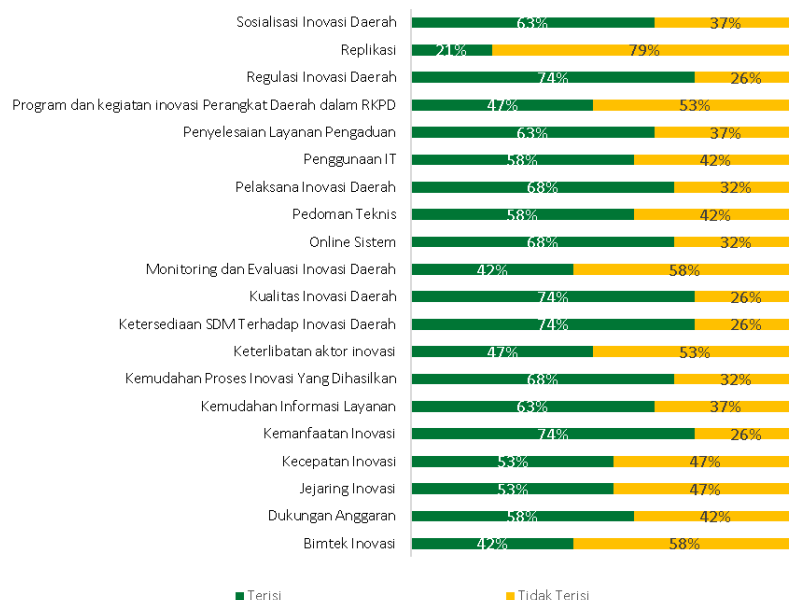
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 107. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tulungagung

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tulungagung sejumlah 9 (47.37%) inovasi memiliki skor kematangan yang rendah, kemudian 8 (42.11%) inovasi memiliki skor kematangan sedang serta 2 (10.53%) inovasi memiliki skor kematangan yang tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



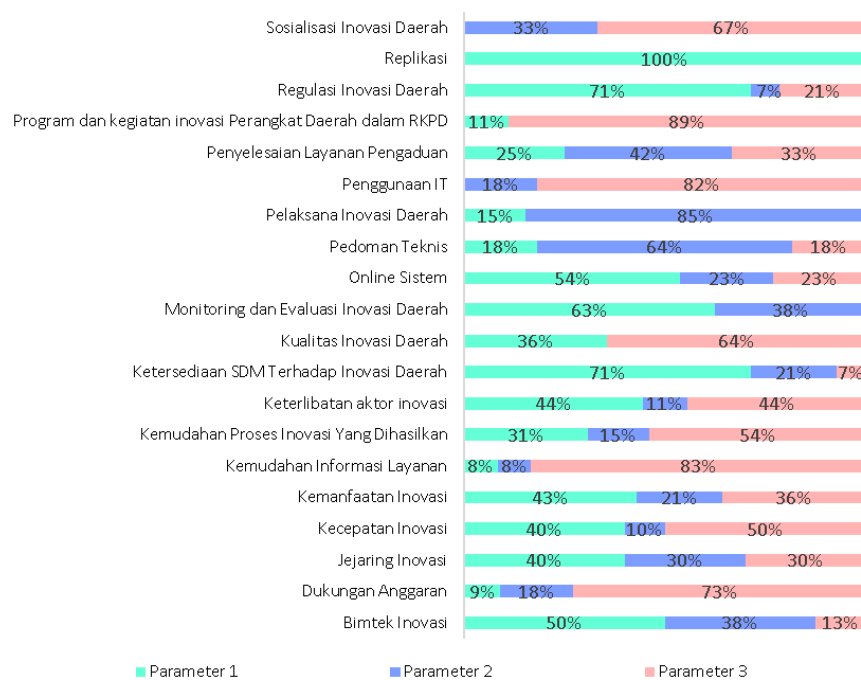
Gambar 108. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung

Dari 19 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tulungagung, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar

41.58% sedangkan 58.42% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar adalah indikator Kemanfaatan Inovasi, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, dan Regulasi Inovasi Daerah yaitu sebesar 74%. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tulungagung telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi sebesar 21% yang artinya hanya terdapat 4 inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tulungagung telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kabupaten Tulungagung

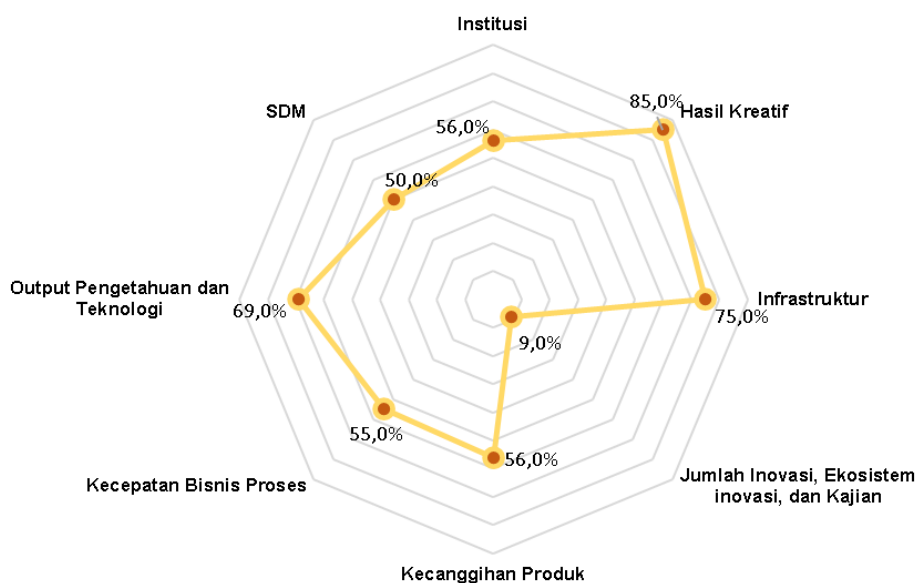
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD yaitu sebesar 89%. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah yaitu sebesar 85%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 100%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

j. Daftar Inovasi Kabupaten Tulungagung beserta Skor Kematangannya

Tabel II. Daftar Inovasi Kabupaten Tulungagung beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Belanja Tradisional Gaya Millenial	0
Pelayanan Prima di Tengah Corona	0
Menginap Aman di Hotel Nyaman	0
Nongkrong Asyik di Kala Pandemi	0
The New Normal Mall Millenial Gaya Baru - 1	0
GOENDALA (Google Form Untuk Mengatasi Kendala) - RSUD Dr Iskak	44
SI POETRI (SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN ONLINE TANPA ANTRI) - RSUD dr. Iskak	61
FIVE TRANSFORM (Lima Perubahan Sistem Layanan Masyarakat) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	49
MODISTA (Media Sosial Setda Kab.Tulungagung) - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	62
Lomba Kreativitas dan Inovasi (Kasanova) - BAPPEDA	68
Klik SI UMI (Klinik Layanan Koperasi dan Usaha Mikro) dan SI LAKU (Konsultasi Laporan Keuangan Koperasi)	84
Aplikasi e-Planning	38
JUDIKA (Jukir ID Card) - Dinas Perhubungan	67
PANDU KELING (Pelayanan Administrasi Kependidikan Keliling) - Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	59
PETA KU (Pelayanan Terpadu Koperasi dan UMKM) - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	98
Aplikasi Pemasaran Online LapakUMKM - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	120
"GERAK PERUBAHAN GENCAR" (Gerakan Desa Peduli Perempuan, Ibu dan Anak untuk Mewujudkan Generasi Cerdas) - DPMD	29
Sistem Informasi Administrasi Terpadu Kecamatan Terintegrasi Komputer - Kec. Tulungagung	68
SIKESTA (Sistem Informasi Kesehatan Tulungagung)	112

K. KOTA BATU



Gambar 110 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Batu

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Batu memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu sebesar 85,00%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 9,00% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 111. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Batu

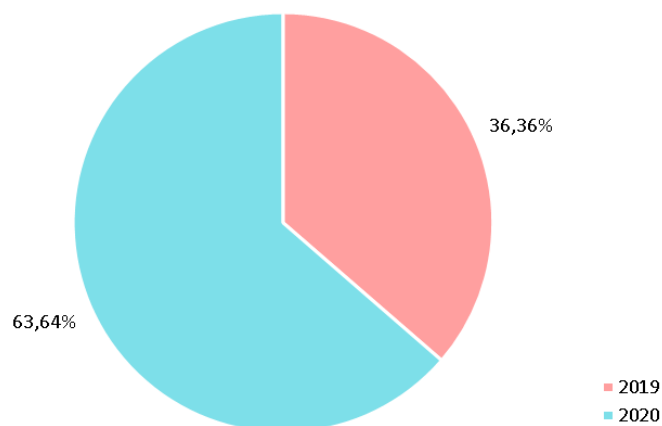
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah

Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Batu belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 4258.00%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 4258.00% dibandingkan tahun 2019. Namun, kemungkinan data yang diinput tersebut tidak sesuai dengan data yang diminta oleh sistem aplikasi indeks inovasi daerah. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 0.23%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 0.23% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.02% dimana nilai tersebut hampir mendekati standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang hanya sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan ternyata mengalami penurunan sebesar 0.28%, dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 5%.

Pemerintah Kota Batu mengalami penurunan pada indikator Jumlah Peningkatan PAD sebesar 25.56% dimana nilai tersebut jauh lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 8%. Sedangkan, indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan sebesar 75.40% dimana nilai tersebut jauh lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.45%. Terakhir, indikator Jumlah Pendapatan Perkapita pada Kota Batu yang menunjukkan kenaikan sebesar 9.53%, dimana nilai tersebut jauh lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang turun sebesar 1.85%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

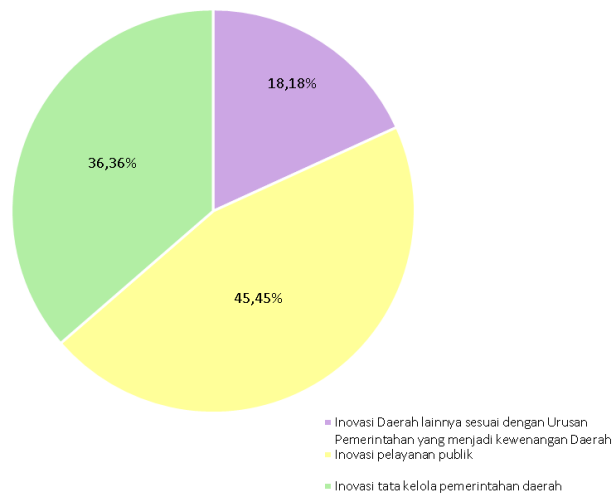
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 112. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Batu

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Batu telah diterapkan pada tahun 2020 dan 2019. Terdapat 8 (36.36%) inovasi dari 22 inovasi yang dilaporkan tersebut telah diterapkan sejak tahun 2019 dan sisanya sejumlah 14 (63.64%) inovasi lainnya diterapkan pada tahun 2020.

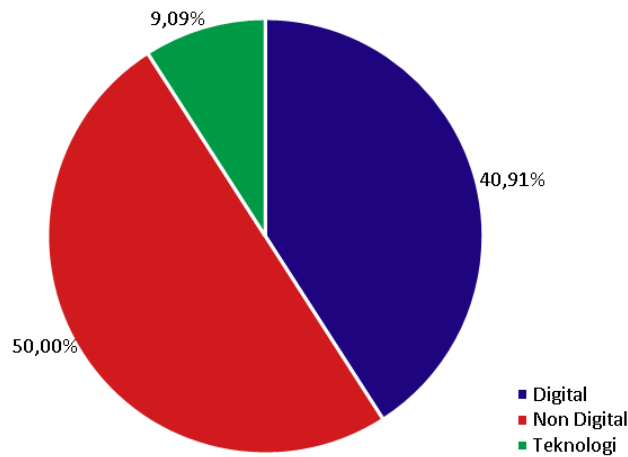
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 113. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Batu

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 (tiga) bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Batu, yaitu inovasi pelayanan publik sejumlah 10 (45.45%) inovasi, inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sejumlah 4 (18.18%) inovasi serta inovasi tata kelola pemerintahan daerah sejumlah 8 (36.36%) inovasi.

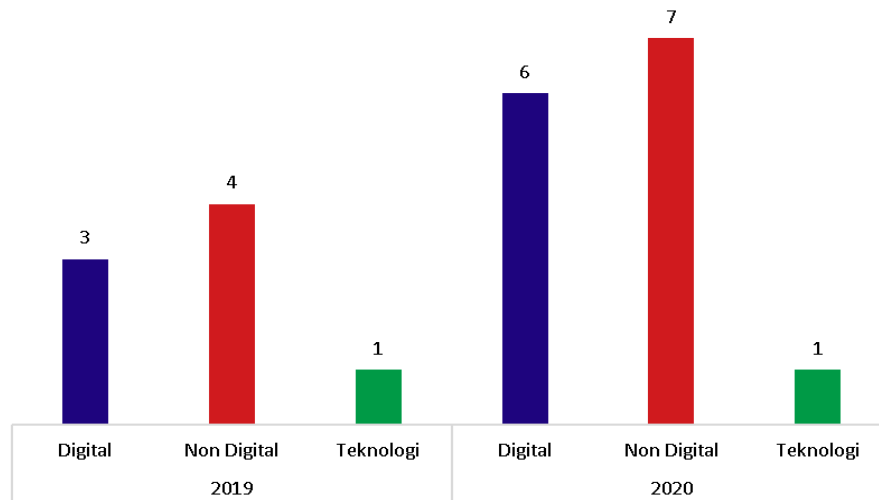
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 114. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Batu

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 9 (40.91%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Batu merupakan inovasi digital, kemudian 11 (50.00%) merupakan inovasi non digital sedangkan 2 (9.09%) inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

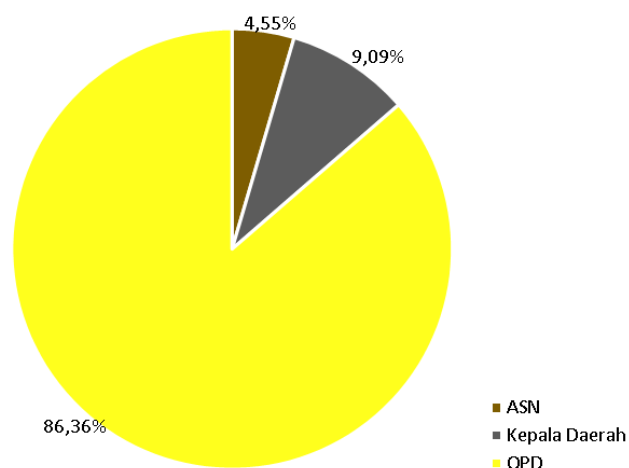
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 115. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Batu

Secara umum jumlah inovasi mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, khususnya untuk inovasi digital dan non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat yaitu pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan hanya sejumlah 3 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 6 inovasi. Sedangkan untuk inovasi non digital juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan hanya sejumlah 4 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 7 inovasi. Sedangkan, untuk inovasi teknologi tidak mengalami penurunan maupun kenaikan pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 1 inovasi kemudian pada tahun 2020 tetap sama yaitu sejumlah 1 inovasi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

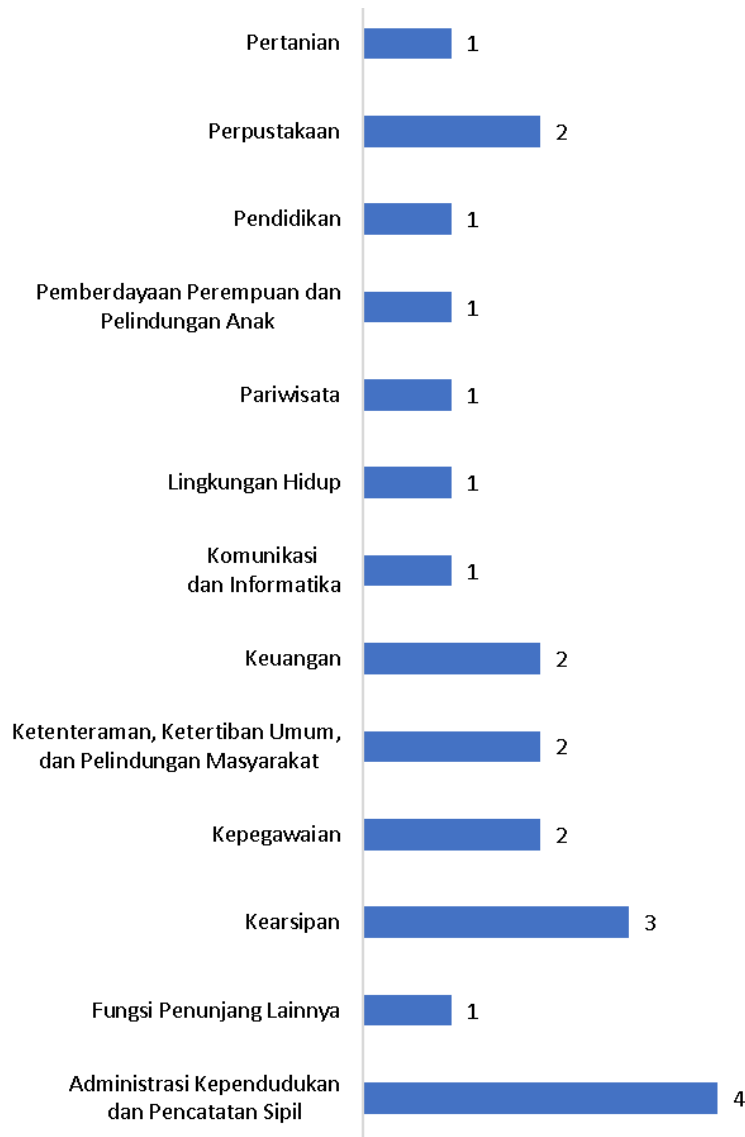


Gambar 116. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Batu

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Batu pada tahun 2021 diinisiasi oleh Perangkat Daerah yaitu sejumlah 19 (86.36%) inovasi, kemudian diinisiasi oleh Kepala Daerah sejumlah

2 (9.09%) inovasi, serta diinisiasi oleh ASN sejumlah 1 (4.55%) inovasi. Sementara untuk inovasi yang diinisiasi oleh Masyarakat dan DPRD belum dilaporkan pada tahun 2021.

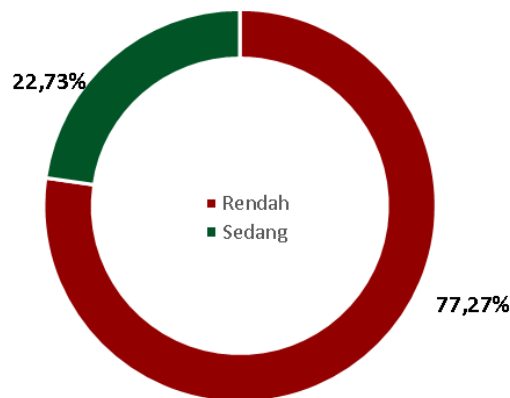
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 117. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Batu

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Tulungagung berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata karena mencakup 13 dari 32 urusan pemerintahan yang ada. Sebagian besar urusan inovasi adalah inovasi pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sejumlah 4 inovasi kemudian diikuti dengan urusan kearsipan sejumlah 3 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat 1 (satu) dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 1 inovasi.

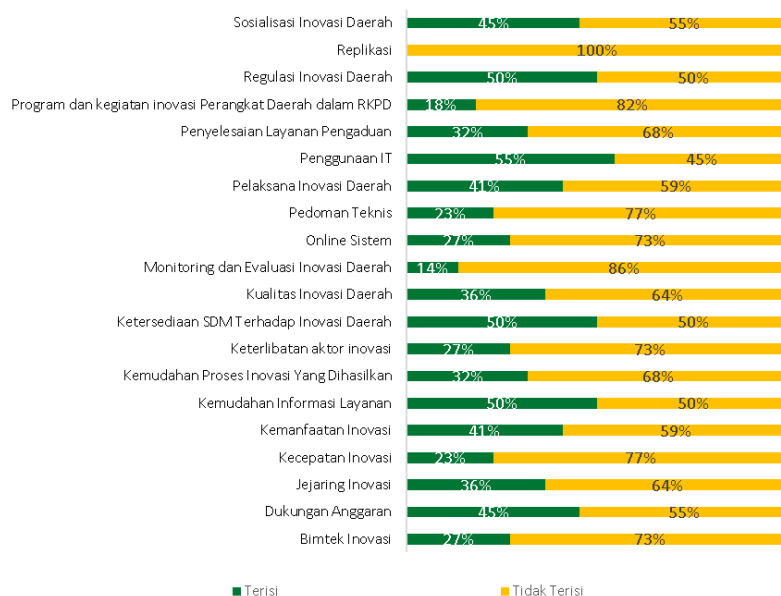
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 118. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Batu

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi yang dilaporkan oleh Kota Batu sejumlah 17 (77.27%) inovasi memiliki skor kematangan yang rendah, dan sisanya 5 (22.73%) inovasi memiliki skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



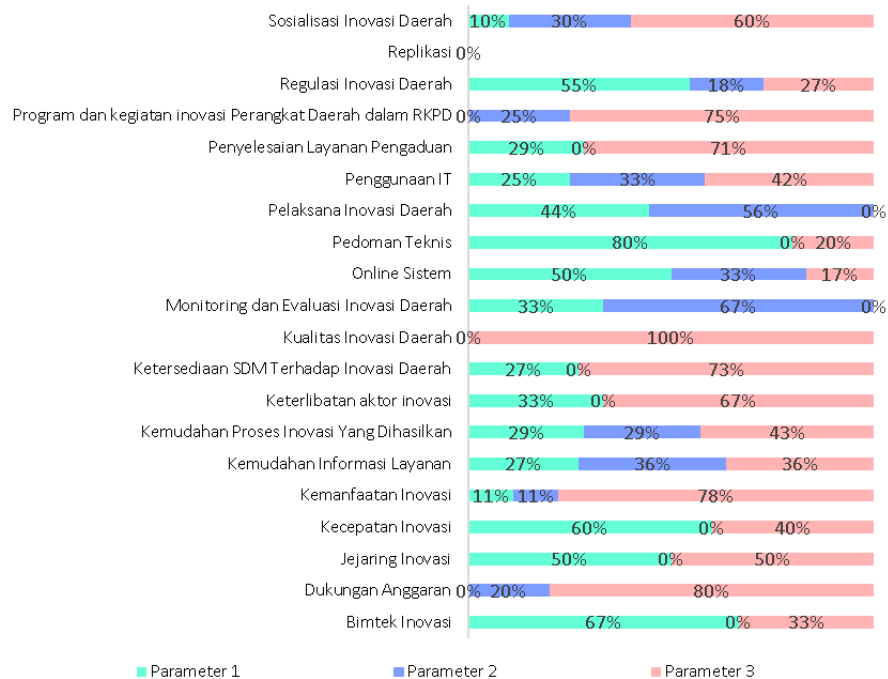
Gambar 119. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Batu

Dari 22 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Batu, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 66.36% sedangkan

33.64% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator satuan inovasi daerah yang memiliki tingkat keterisian data pendukung yang paling besar adalah indikator Penggunaan IT yaitu sebesar 55%. Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kota Batu telah terisi data pendukung pada indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah yaitu indikator Replikasi sebesar 0% yang artinya tidak ada inovasi yang dilaporkan oleh Kota Batu yang telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 120. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah Kota Batu

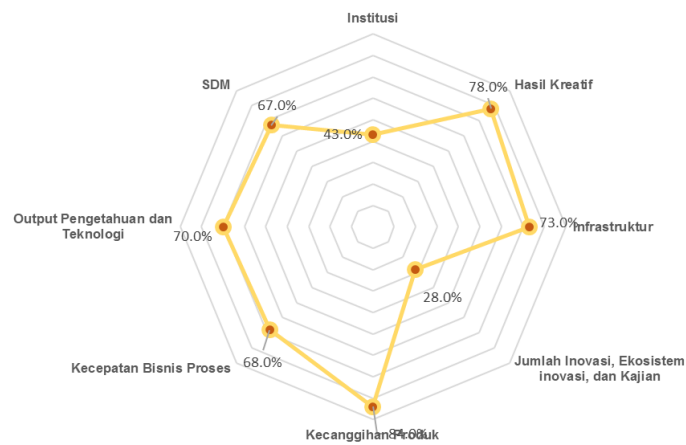
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa terdapat indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi yaitu indikator Kualitas Inovasi Daerah yaitu sebesar 100%. Artinya bahwa inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah yaitu sebesar 67%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Pedoman Teknis yaitu sebesar 80%, artinya inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter pertama.

j. Daftar Inovasi Kota Batu beserta Skor Kematangannya

Tabel 12. Daftar Inovasi Kota Batu beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
E-SURAT	54
Fasilitasi Penguatan Kota Layak Anak	55
Among Abdi Praja	91
kerajinan daur ulang sampah	0
E SURAT	0
INOVASI SIAGA DARMA	78
WISATA PENDIDIKAN DAN PEALTIHAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS EXPERIENTAL LEARNING	0
WEBSITE DISPENDUK CAPIL	0
PETIK APEL MANALAGI "Pelayanan Perekaman Biometrik Dan Pencetakan KTP Elektronik Bagi Manula, dan Penyandang Disabilitas"	15
Penak PKK "Pelayanan Akta Kelahiran Kolektif Oleh TP PKK"	0
Pak Bahir	0
Peningkatan Rescue Fisik Bagi Aparatur Dinas Penanggulangan Kebakaran	27
KAFETARIA PELAYANAN	34
e- Gas	38
INOVASI ADIARTA (ALIH MEDIA ARSIP TANAH)	42
Ada Kelas Di ATV	12
SISTEM MANAJEMEN ASET KOTA BATU	24
SIKD (SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH) E-BUDGETING	30
WISATA BUMIAJI ASYIK	27
TV Desa	24
SATUAN TUGAS CEPAT RESPON OPINI PUBLIK (CROP) DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGGAN KOTA BATU	86
Among Abdi Praja	0

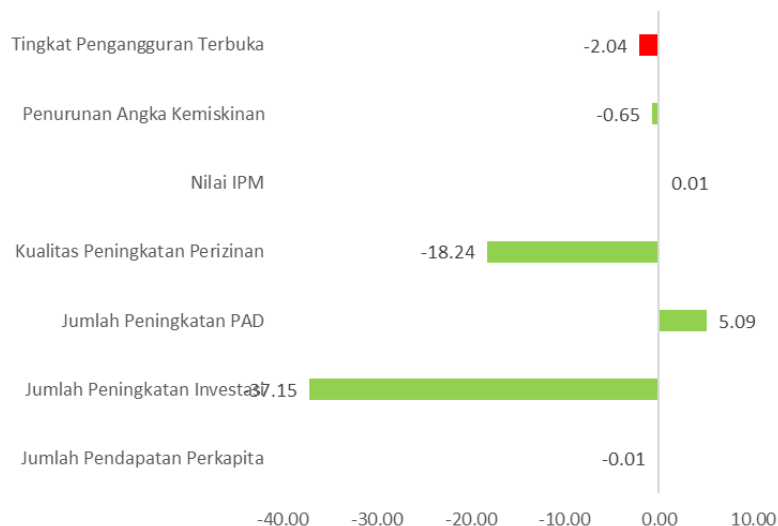
L. KOTA BLITAR



Gambar 121. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Blitar

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Blitar memiliki skor tertinggi pada variabel Kecanggihan Produk, yaitu 84.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Kecanggihan Produk sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 28.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 122. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Blitar

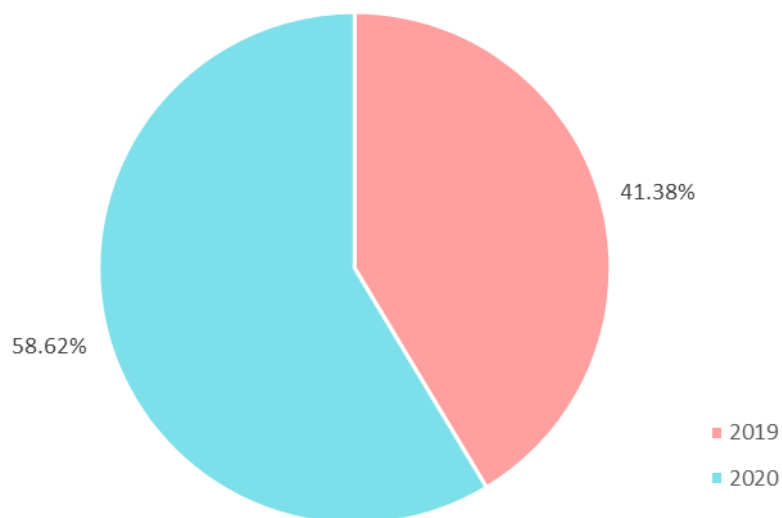
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Blitar belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data

menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2.64%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 2.64% dibandingkan tahun 2019. Namun hal ini sudah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Selanjutnya, indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 18.24% dimana nilai tersebut belum mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Sedangkan indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami peningkatan sebesar 5.09% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%. Pemerintah Kota Blitar juga mengalami penurunan pada Jumlah Investasi sebesar 37.15% dimana masih belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%.

Jumlah Pendapatan Perkapita Kota Blitar turun sebesar 0.01%, namun nilai tersebut sudah lebih baik dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%. Demikian pula dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami kenaikan sebesar 0.01% dimana nilai tersebut juga sedikit lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Terakhir, indikator Penurunan Angka Kemiskinan pada Kota Blitar menunjukkan angka 0.65%, artinya nilai tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 0.02%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

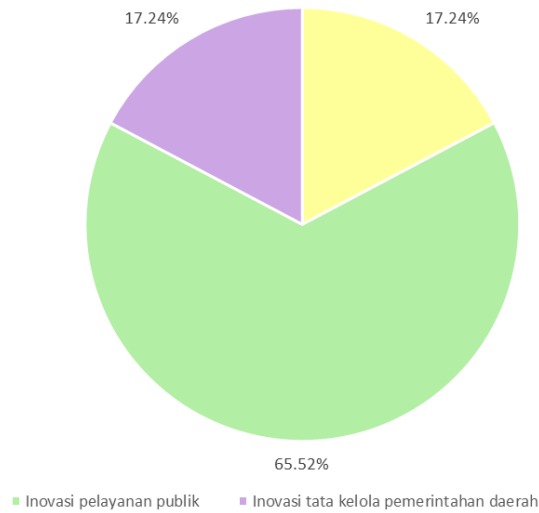
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 123. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Blitar

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Blitar telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 12 (41.38%) inovasi dari 29 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 17 (58.62%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

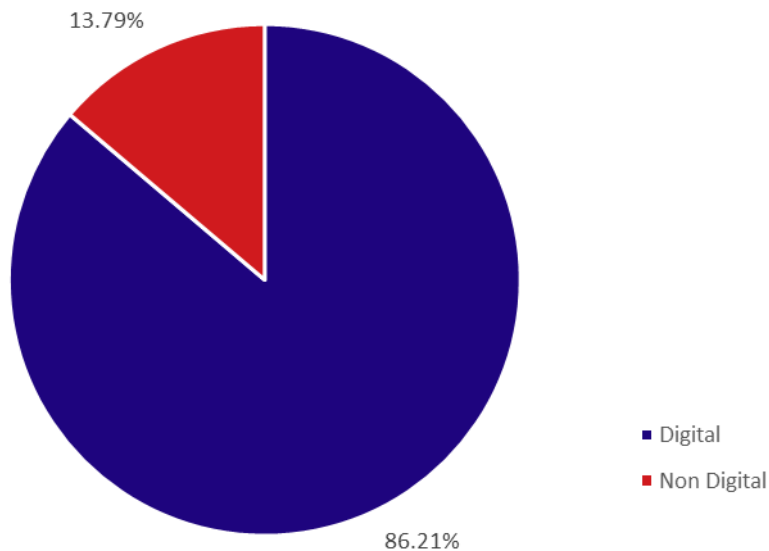
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 124. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Blitar

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah berturut-turut, yaitu terdapat 19 (65.52%) inovasi pelayanan publik dan 5 (17.24%) inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Sementara 5 (17.24%) inovasi lainnya adalah inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Blitar merupakan inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

c. Berdasarkan Jenis Inovasi

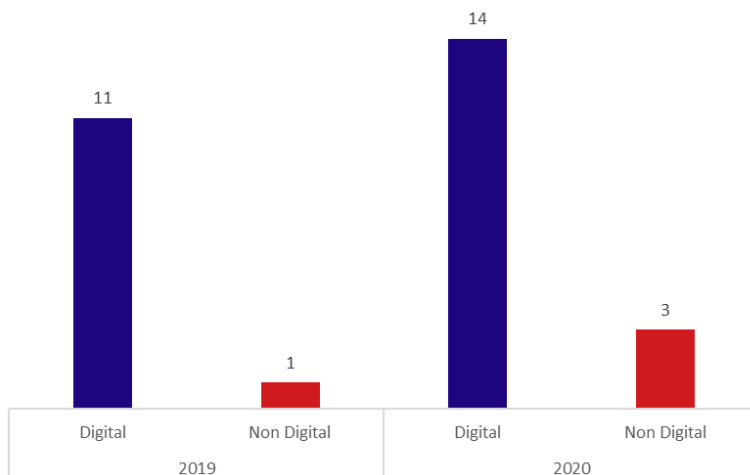


Gambar 125. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Blitar

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 25 (86.21%) dari 29 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Blitar merupakan inovasi digital dan

sisanya 4 (13.79%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital. Sementara jenis inovasi teknologi belum dilaporkan oleh Kota Blitar.

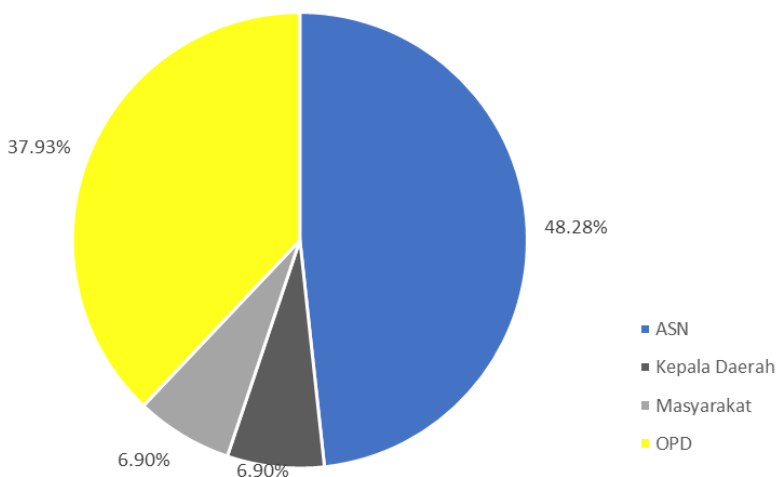
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 126. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Blitar

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 11 inovasi namun pada tahun 2020 naik menjadi 14 inovasi. Demikian pula pada inovasi non digital mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 1 inovasi namun pada tahun 2020 naik menjadi 3 inovasi teknologi.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

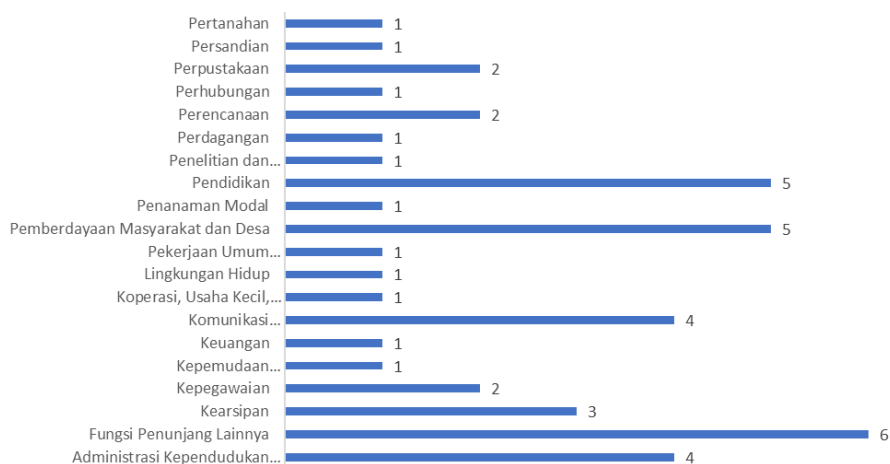


Gambar 127. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Blitar

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Blitar pada tahun 2021 diinisiasi oleh ASN, yaitu sejumlah 14 (48.28%) inovasi, 11 (37.93%) inovasi diinisiasi oleh Perangkat Daerah. Sementara jumlah inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah dan Masyarakat sama, yaitu

sejumlah 1 (6.90%) inovasi. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

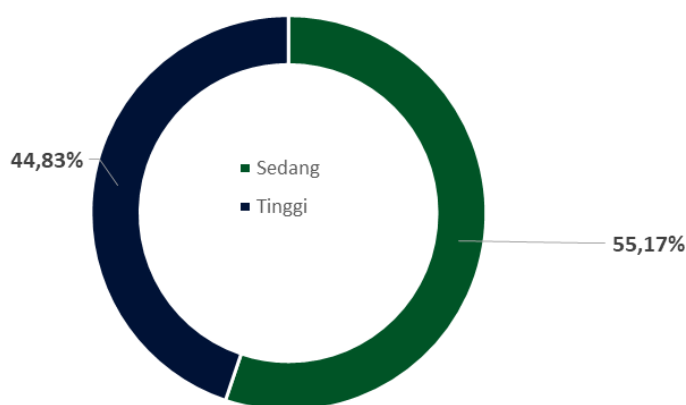
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 128. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Blitar

Sebaran inovasi daerah pada Kota Blitar berdasarkan urusan pemerintahan cukup beragam. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan fungsi penunjang lainnya dengan 6 inovasi dari 29 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat beberapa urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 5 inovasi dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan 1 inovasi.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

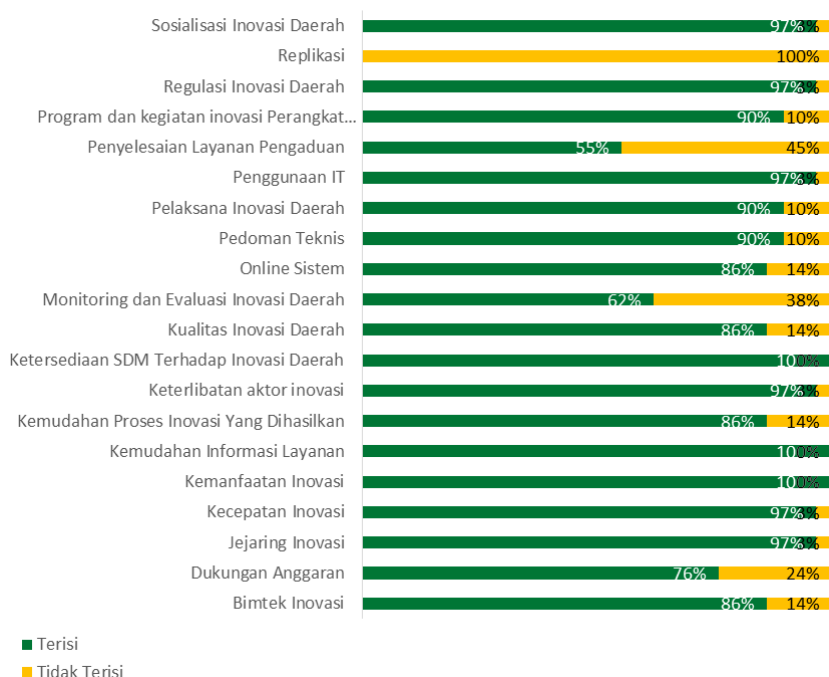


Gambar 129. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Blitar

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi, yaitu sejumlah 13 (44.83%) inovasi. Selain itu, terdapat 16 (55.17%) inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor

kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

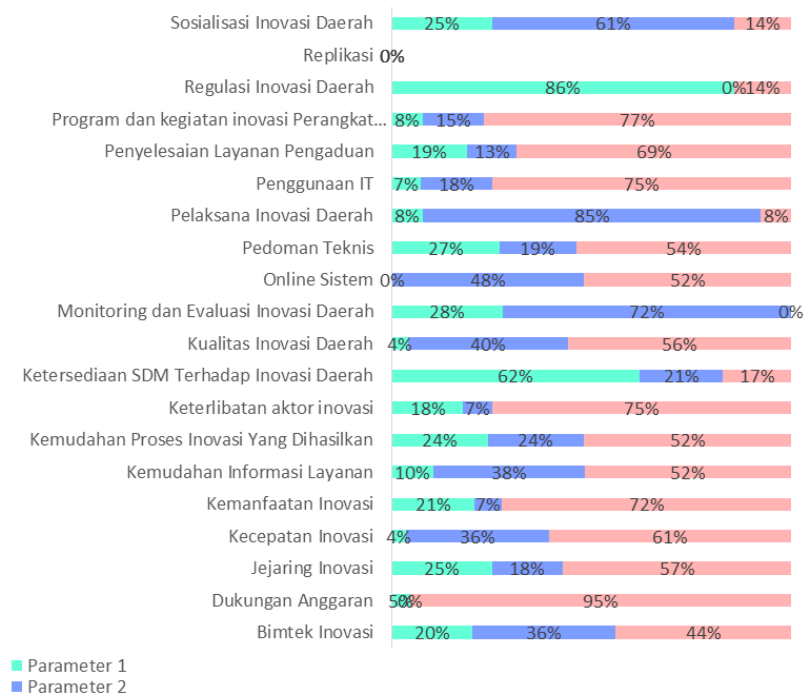
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 130. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Blitar

Dari 29 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Blitar, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 15.69% sedangkan 84.31% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kemudahan Informasi Layanan, dan Kemanfaatan Inovasi memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 100% artinya 29 dari 29 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Blitar telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 0% artinya tidak ada inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 131. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran sebesar 95%, artinya 95% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Dukungan Anggaran termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 85% artinya 85% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 86% artinya 86% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Regulasi Inovasi Daerah.

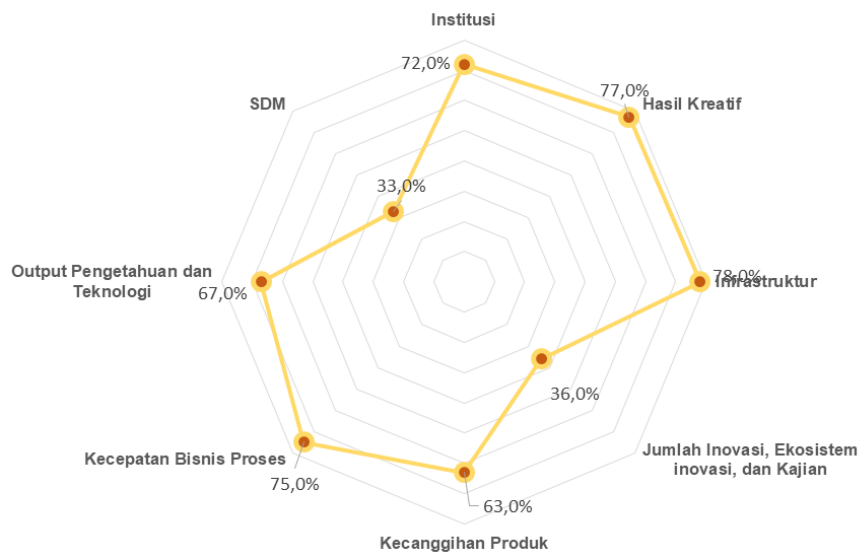
j. Daftar Inovasi Kota Blitar beserta Skor Kematangannya

Tabel 13. Daftar Inovasi Kota Blitar beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
e-Lampion (Layanan Mandiri Peminjaman Online)	109
A-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	94
BAGASIGRA (Abang Petugas Pengantar Surat Izin Gratis)	97
Pacar Keren (Permohonan Cukup dari Rumah Kirim Persyaratan Lewat Online)	114
SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah)	64
PADAMOVEON (Pelayanan Pajak Daerah Melalui Sistem Dan Transaksi Elektronik)	102

Buku Pedoman Pelayanan Waris "INHERITANCE GUIDE"	96
LAYADA (Layanan Anak Dalam Jaringan)	83
i.k-lor	89
Kampung Tangguh Open Dulur	72
SARMIGI (Pasar Minggu Pagi)	63
GERAKAN BACK TO MRACANGAN	88
MANDAT ULAMA (Pemanfaatan Data untuk Layanan masyarakat)	119
SISKOI (Sistem Informasi Fasilitas Olahraga)	92
SIDOTI (Sistem Informasi Sedot Tinja Terintegrasi)	112
SIKETAN (Sistem Informasi Kepuasan Pelayanan Kecamatan Sananwetan)	76
e-Litbang Kota Blitar	118
BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik) SMART CARD	107
Penerimaan Peserta Didik Baru melalui aplikasi online (Aplikasi PPDB)	103
E - PAK (Penilaian Angka Kredit Guru On - Line)	87
SUPERSONIK	92
SI - ANDIK (Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	100
Penerapan digital signature dan notifikasi berbasis whatsapp pada aplikasi pelayanan publik SILPUSITRON	111
SI-KOI (Sistem Informasi Kepegawaian Online dan Terintegrasi)	116
PAMAN SAM (Pengantar Berkas Pelayanan Sampai Rumah)	113
i-sentul	75
SI MAYA PERGI	83
Penanggulangan Kerusakan Jalan Dengan Share Location And Post A Picture	80
AKSI (Aplikasi Presensi Berbasis Lokasi)	121

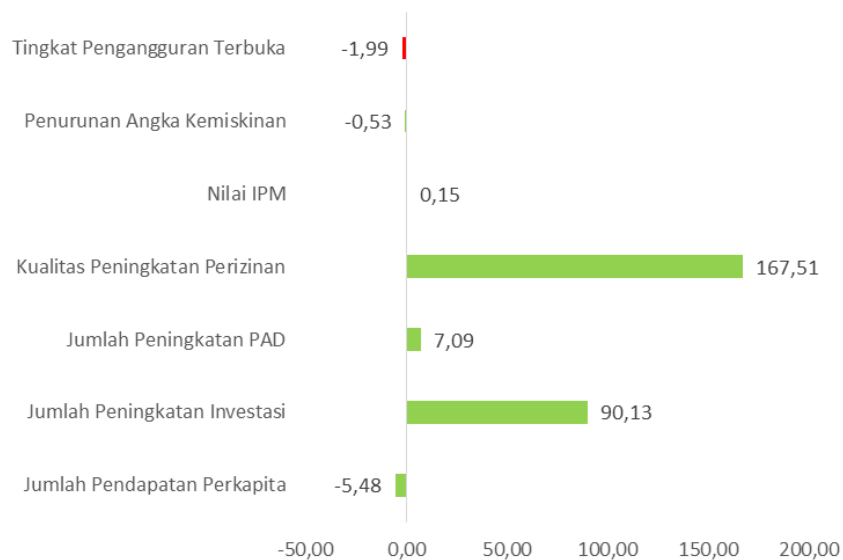
M. KOTA KEDIRI



Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Kediri

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Kediri memiliki skor tertinggi pada variabel Infrastruktur, yaitu 78.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Infrastruktur sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel SDM masih cukup rendah, yaitu 33.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 132. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Kediri

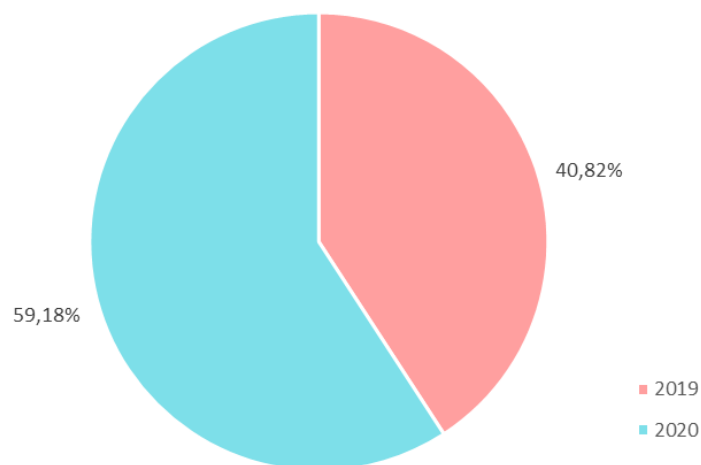
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Kediri

sudah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1.99%, dimana nilai tersebut belum mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0.53%, angka tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya naik 0.02%. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami kenaikan sebesar 0.15% dimana nilai tersebut masih lebih besar dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 167.51%, nilai tersebut sudah melebihi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kota Kediri mengalami penurunan pada Jumlah Pendapatan Perkapita sebesar 5.48% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan hanya sebesar 1.85%. Sedangkan, pada indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang mengalami kenaikan sebesar 90.13% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir, indikator Jumlah Peningkatan PAD pada Kota Kediri menunjukkan kenaikan sebesar 7.09%, namun nilai tersebut masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

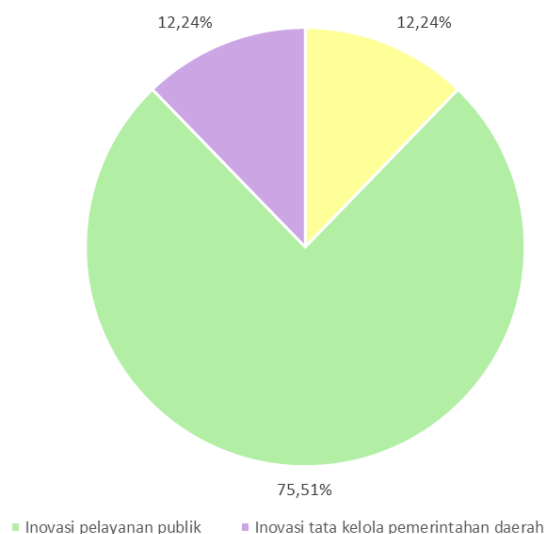
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 133. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Kediri

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Kediri telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 29 (59.18%) inovasi dari 49 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 20 (40.82%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

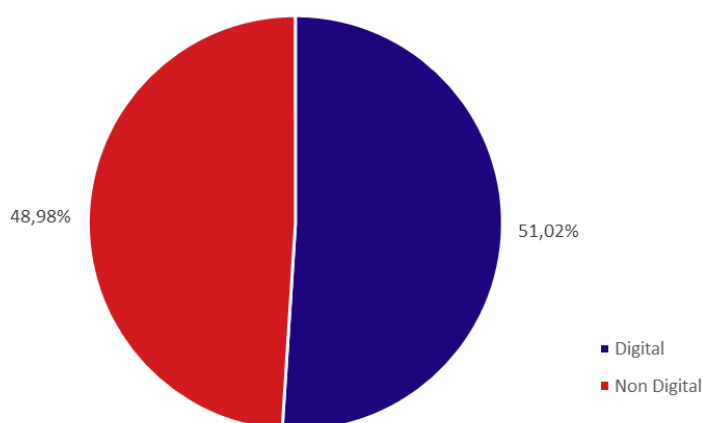
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 134. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Kediri

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi inovasi pelayanan publik dan inovasi inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berturut-turut, yaitu terdapat 37 (75.51%) inovasi pelayanan publik dan 6 (12.24%) inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara 6 (12.24%) inovasi lainnya adalah inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Kediri merupakan inovasi tata kelola pemerintahan.

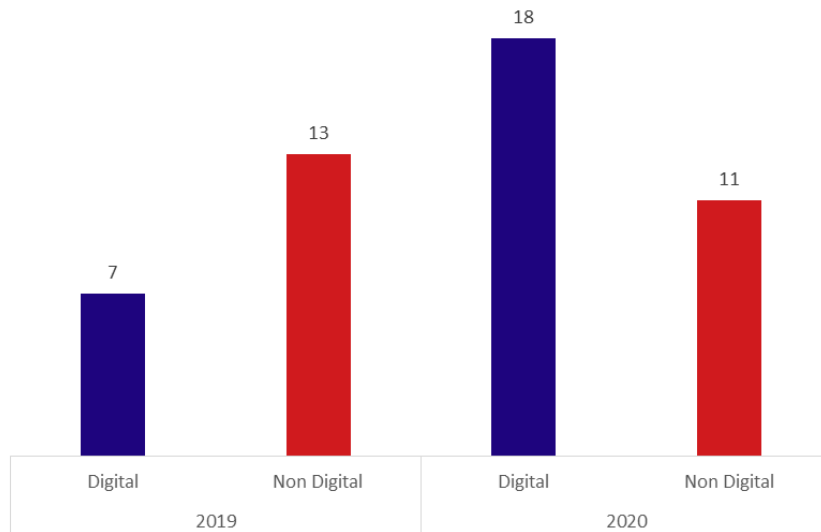
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 135. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Kediri

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 25 (51.02%) dari 49 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Kediri merupakan inovasi digital dan 24 (48.98%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

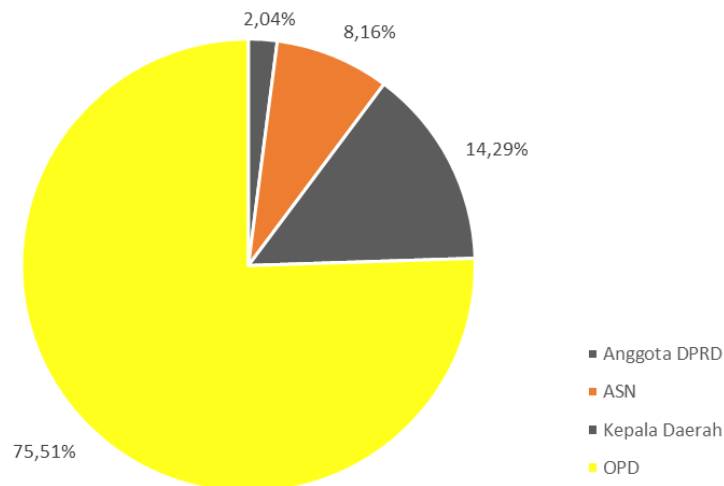
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 136. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Kediri

Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 7 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 18 inovasi. Sedangkan pada inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 13 inovasi kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 11 inovasi digital.

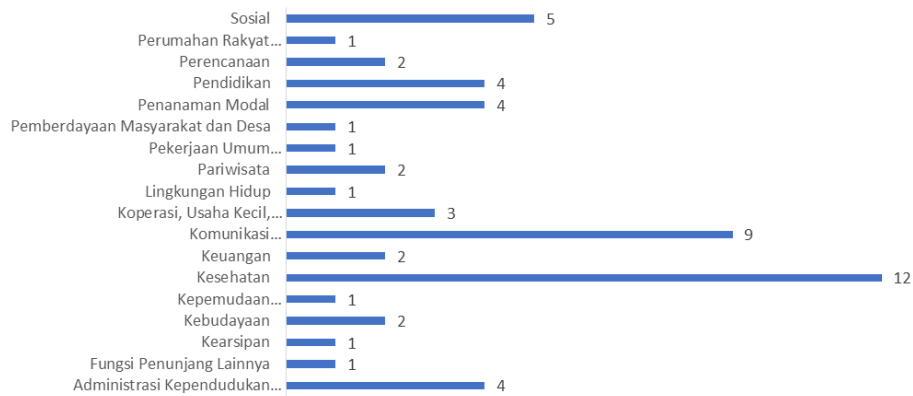
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 137. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Kediri

Inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Kediri pada tahun 2021 mayoritas diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 37 (75.51%) inovasi, sementara 7 (14.29%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah, 4 (8.16%) inovasi diinisiasi oleh ASN. Sisanya untuk inovasi yang diinisiasi oleh Anggota DPRD sebesar 1 (2.04%) inovasi.

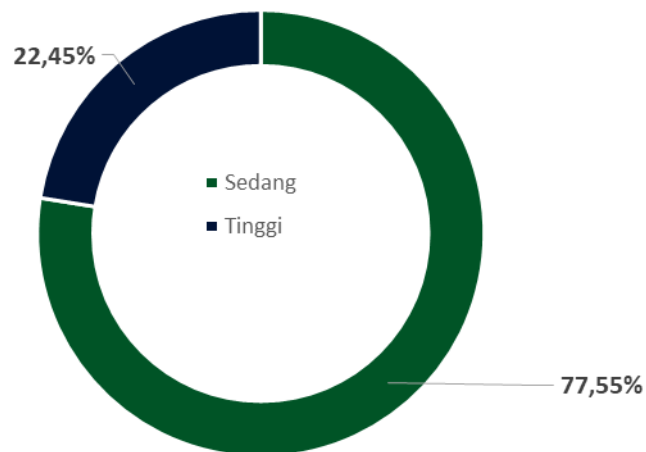
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 138. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Kediri

Sebaran inovasi daerah pada Kota Kediri berdasarkan urusan pemerintahan cukup beragam. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 12 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat beberapa urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 4 inovasi, urusan kesehatan dengan 12 inovasi, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan 1 inovasi, dan urusan sosial dengan 5 inovasi.

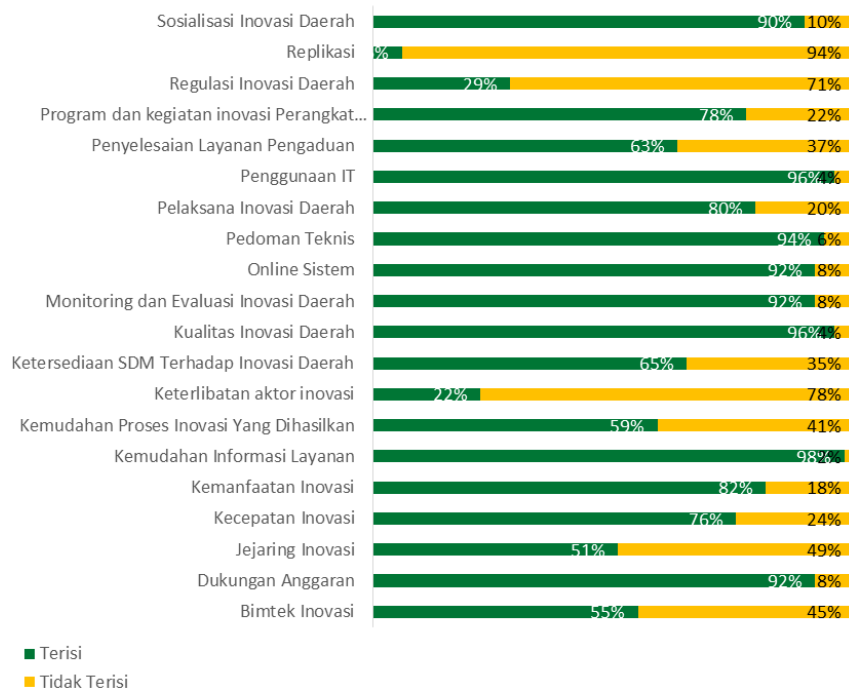
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 139. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Kediri

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang dan tinggi, dimana terdapat 38 (77,55%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang. Terdapat 11 (22,45%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

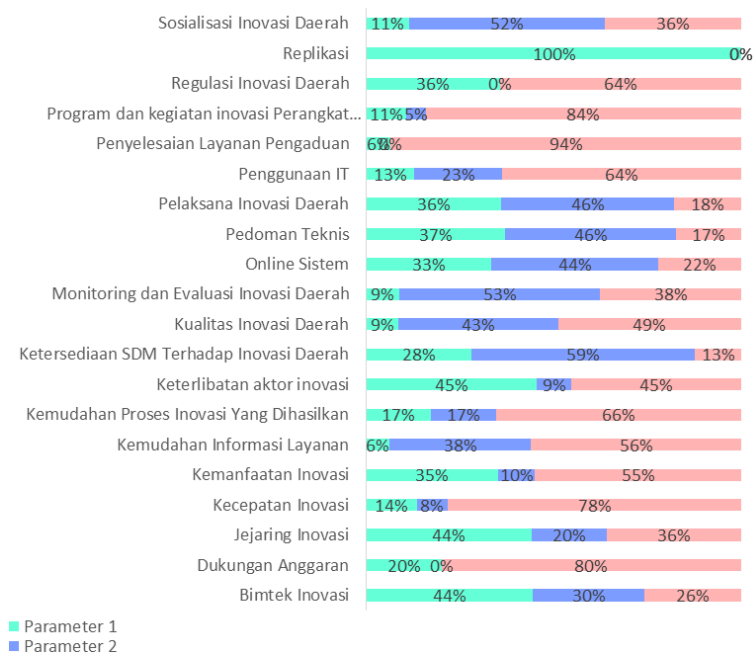
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 140. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Kediri

Dari 49 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Kediri, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 29.29% sedangkan 70.71% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Kemudahan Informasi Layanan terhadap Inovasi Daerah merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 98% artinya 48 dari 49 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Kediri telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 6% artinya 2 dari 49 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Kediri telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 141. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan sebesar 94%, artinya 94% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah sebesar 59% artinya 59% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Bimtek Inovasi.

j. Daftar Inovasi Kota Kediri beserta Skor Kematangannya

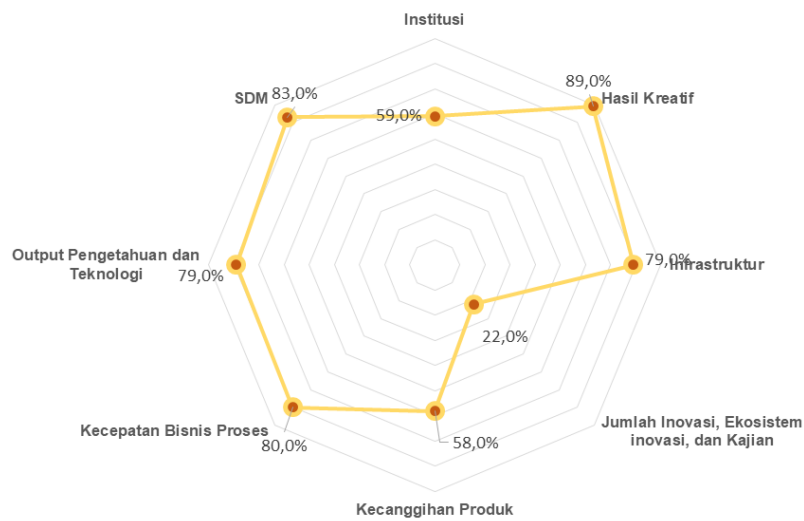
Tabel 14. Daftar Inovasi Kota Kediri beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
SISBRO, Sistem Booking Online Rawat Jalan RSUD Gambiran Kota Kediri	75
GO KLING (Go Keliling)	65
3 IN 1, 4 IN 1, 5 IN 1	73
PENCAK SILAT (Pencatatan Akta Pencatatan Sipil bagi yang Terlambat)	71
DUKCAPIL AGENT	84
Kursus Bahasa Inggris Gratis English Massive (E-MAS)	124
Sistem Informasi Basis Data Terpadu (Sinbad)	112

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Aplikasi CC	100
Website Si Jamal	100
Aplikasi Esuket	107
Website Kota Kediri Tanggap Covid-19	98
Aplikasi Surga	96
Aplikasi Cek Bansos Kota Kediri	101
Website Smart City Kota Kediri	95
Aplikasi Pecut	80
Aplikasi Padat Karya	96
Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR)	96
Prodamas Plus	86
POS UPAYA KESEHATAN KERJA " PASAR PAHING SEHAT "	82
GEMAPASI (GERAKAN MASYARAKAT PEDULI AIR SUSU IBU)	76
PUTRI LESTARI	68
Homecare PEDULI	69
OPTIMALISASI PEMILAHAN SAMPAH OLEH PETUGAS GEROBAK LANGSUNG PADA SUMBERNYA	90
INTEGRATED DIRECT CONTROL SYSTEM (Sistem Pengawasan Langsung Terintegrasi)	74
CINTA MAS SUKO (Cari Tau Informasi mengenai obat, obat Tradisional, Kosmetik, Makanan Sehat Tanya Apoteker Puskesmas Sukorame)	73
PENINGKATAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MELALUI SOCIAL TO VISIT SERVICE (SVS)	81
Monitoring Capaian RPJMD (MONCAR)	67
MEDIA "KITA KEREN" (APLIKASI PARIWISATA KOTA KEDIRI KREATIF DAN INDEPENDEN)	86
"KURNIA" (Kredit Usaha Melayani Warga Kota Kediri)	88
KLINIK UMKM	98
PENCEGAHAN BULLYING MELALUI CLA (CHILD LOVE ACTION)	65
PENATAUSAHAAN RISALAH RAPAT MELALUI COLLECTION REPORT SYSTEM	104
GARDA SELAMAT (KELUARGA CERDAS BERSWAMEDIKASI DENGAN LEBIH AMAN DAN TEPAT)	83
ATM IBU HAMIL (ANTENATAL TERPADU MOBILE BAGI IBU HAMIL)	107
SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI (SIPITAK)	71
Aplikasi Bansos Mahasiswa	60
EFEKTIVITAS PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DENGAN MEDIA E-UTILITAS	82
ANC THE BEST (Pemeriksaan ANC Ibu Hamil Secara Mobile)	113
POSYANDU BERGIGI (Pemeriksaan Gigi Untuk Anak Balita di Posyandu)	74
SI DINI SEHAT (Deteksi Dini Agar Sehat)	105

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Satu RW Satu Koperasi	66
APELIN PACAR (Asistensi Pengisian LKPM Online Dibantu Sampai Lancar)	98
RELA DATANG (Respon Cepat Layanan Pembinaan Usaha Mendatangi Tempat Kegiatan Usaha)	75
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN DENGAN DESAIN INTEGRASI UTILITAS	71
ISTRI PINTAR (Integrated System untuk User dan Instansi dengan Persyaratan Diambil dan Izin Diantar)	60
MPS BERDAYA (Mobile Publik Service Bekal Perizinan Bagi Disabilitas agar Makin Jaya)	66
APRESIASI WAJIB PAJAK DAERAH KOTA KEDIRI	67
PAGELARAN SELOMANGLENG	121
OPTIMALISASI PELAYANAN PEMBAYARAN PBB DENGAN MEDIA APLIKASI E REVENUE POLLING BERBASIS ANDROID	79

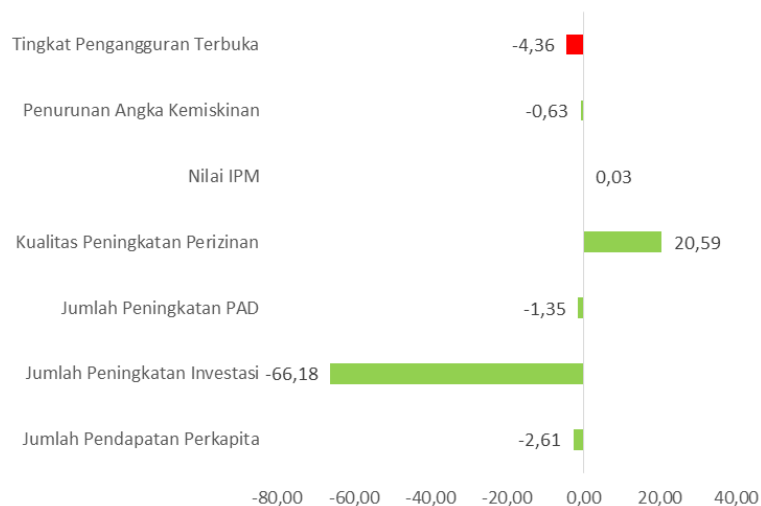
N. KOTA MADIUN



Gambar 142. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Madiun

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Madiun memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 89.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih sangat rendah, yaitu 22.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih sangat rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 143. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Madiun

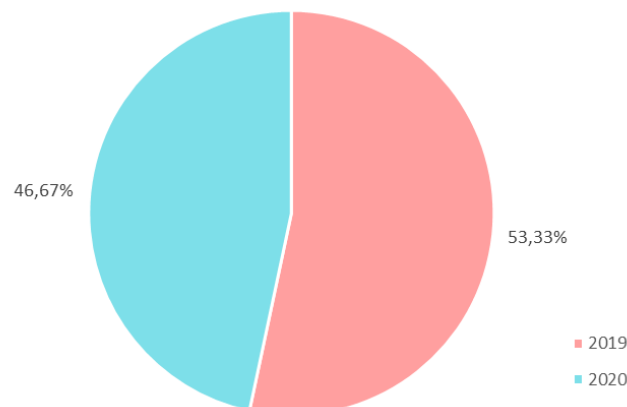
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Madiun belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka turun sebesar 4.36%, dimana nilai tersebut masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 0.63%, angka tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya naik 0.02%. Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan sebesar 0.03% dimana nilai tersebut telah mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 20.59% nilai tersebut sudah lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kota Madiun mengalami penurunan pada Jumlah Pendapatan Perkapita sebesar 2.61% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan hanya sebesar 1.85%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi yang mengalami penurunan sebesar 66.18% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir, indikator Peningkatan PAD pada Kota Madiun menunjukkan penurunan sebesar 1.35% dimana nilai tersebut masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

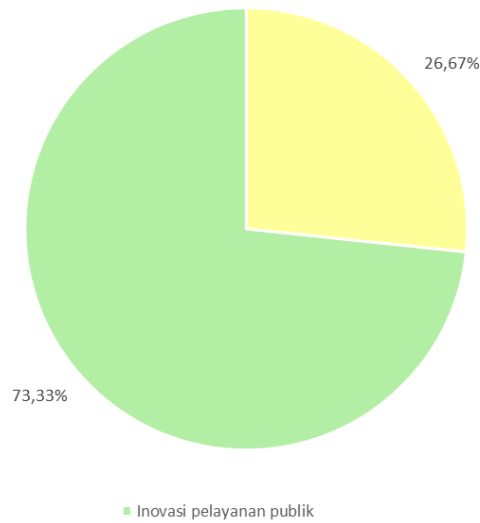
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 144. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Madiun

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Madiun telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 16 (53.33%) inovasi dari 30 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2019 dan 14 (46.67%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

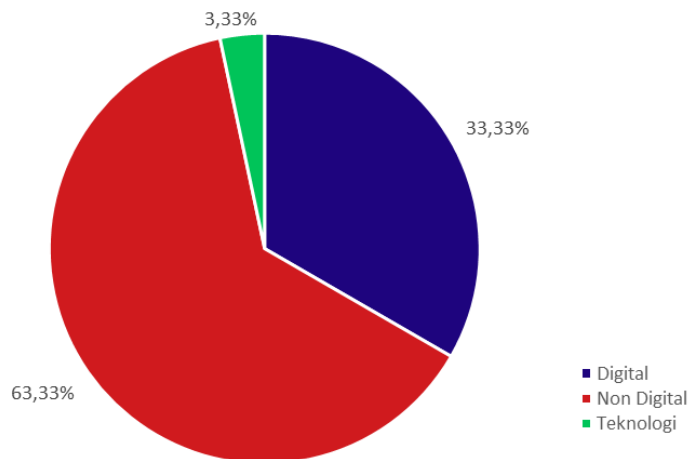
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 145. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Madiun

Berdasarkan bentuk inovasi, hanya terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Madiun, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sementara inovasi tata kelola pemerintahan belum terlapor. Mayoritas inovasi adalah inovasi pelayanan publik sejumlah 22 (73.33%) inovasi dan 8 (26.67%) inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan.

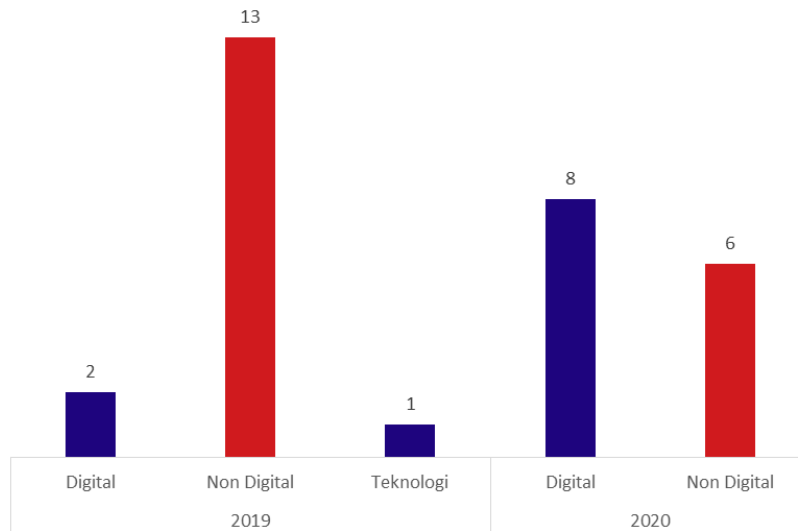
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 146. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Madiun

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 19 (63.33%) dari 30 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Madiun merupakan inovasi non digital, 10 (33.33%) inovasi merupakan inovasi digital dan 1 (3.33%) inovasi lainnya merupakan inovasi teknologi.

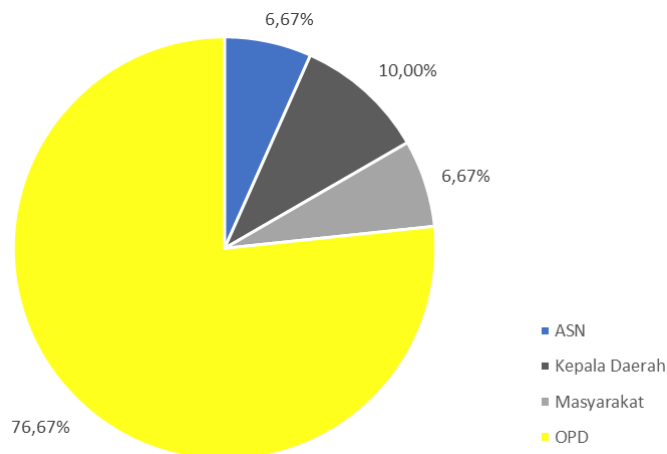
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 147. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Madiun

Dapat dilihat bahwa jumlah inovasi digital mengalami peningkatan di mana pada tahun 2019 inovasi digital yang diterapkan sejumlah 2 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 8 inovasi. Sementara parameter inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi non digital yang diterapkan sejumlah 13 inovasi lalu pada tahun 2020 turun menjadi 6 inovasi non digital. Sedangkan, jumlah inovasi teknologi yang dilaporkan pada tahun 2019 sejumlah 1 inovasi kemudian pada tahun 2020 tidak ada inovasi teknologi yang dilaporkan.

e. Berdasarkan Inisiator Inovasi

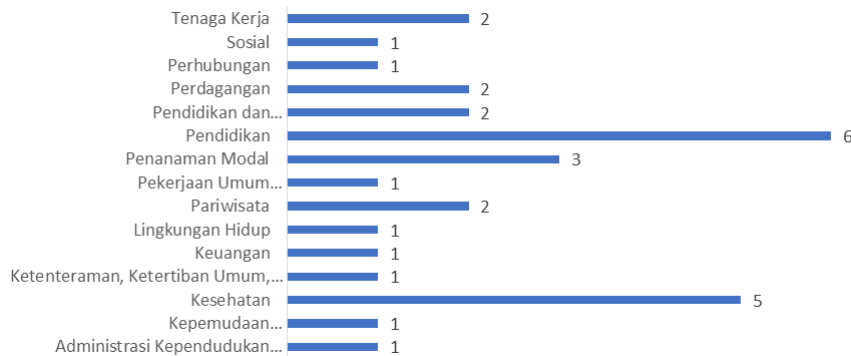


Gambar 148. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Madiun

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Madiun pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 23 (76.67%) inovasi. Sementara 3 (10.00%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah dan 2 (6.67%) inovasi diinisiasi oleh ASN. Sisanya sebanyak 2

(6.67%) inovasi lainnya diinisiasi oleh Masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

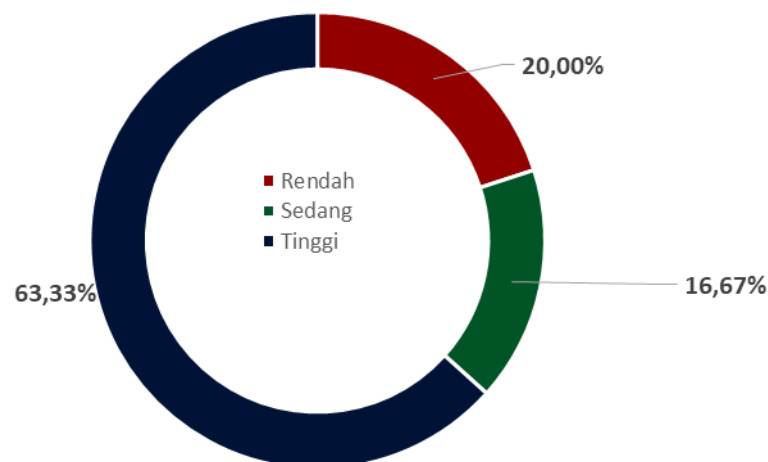
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 149. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Madiun

Sebaran inovasi daerah pada Kota Madiun berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan pendidikan dengan 6 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, hanya terdapat beberapa urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 6 inovasi dan urusan kesehatan dengan 5 inovasi, urusan sosial dengan 1 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan

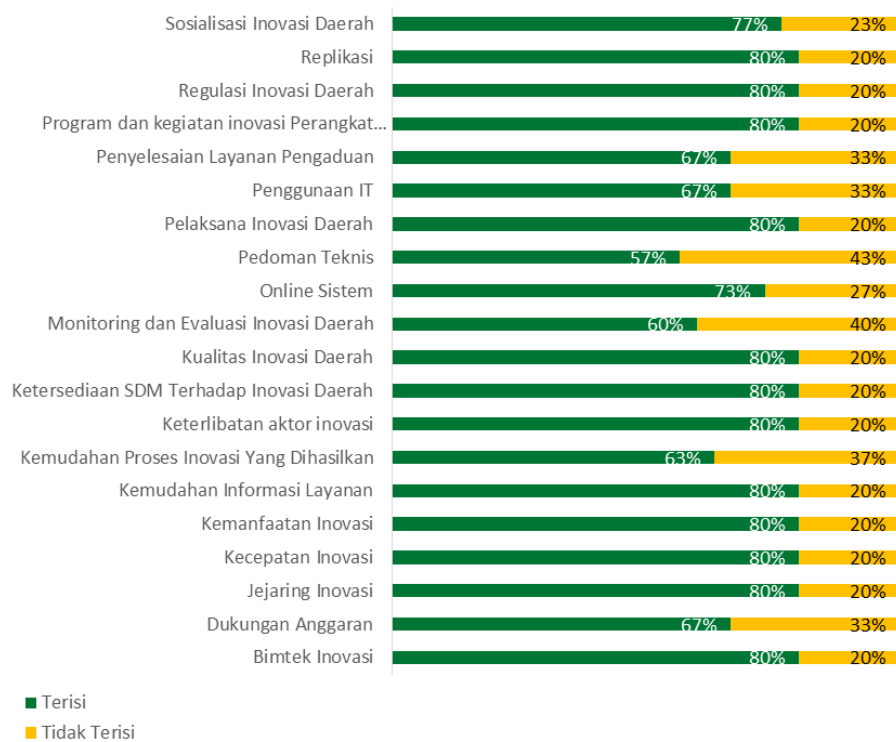


Gambar 150. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Madiun

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi sudah mencapai skor kematangan rendah, sedang, dan tinggi, dimana terdapat 5 (16.67%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang. Terdapat 19 (63.33%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi. Sisanya terdapat 6 (20.00%) inovasi termasuk kategori skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang

mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

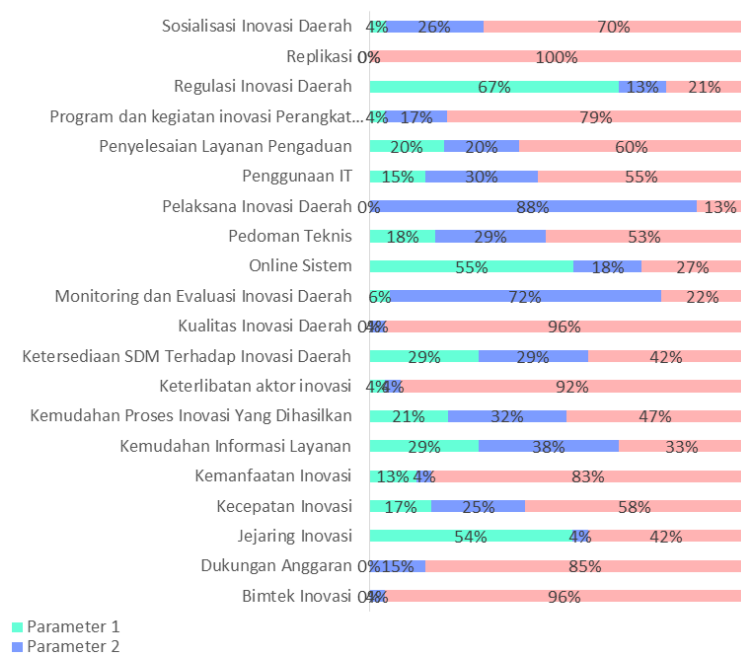
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 151. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Madiun

Dari 30 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Madiun, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 25.50% sedangkan 74.50% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Replikasi, Regulasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Pelaksana Inovasi Daerah, Kualitas Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Inovasi, Jejaring Inovasi, dan Bimtek Inovasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 80% artinya 24 dari 30 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Madiun telah terisi data pendukung pada indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Pedoman Teknis yaitu sebesar 57% artinya 17 dari 30 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Madiun telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 152. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100%, artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 88% artinya 88% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 67% artinya 67% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Online Sistem.

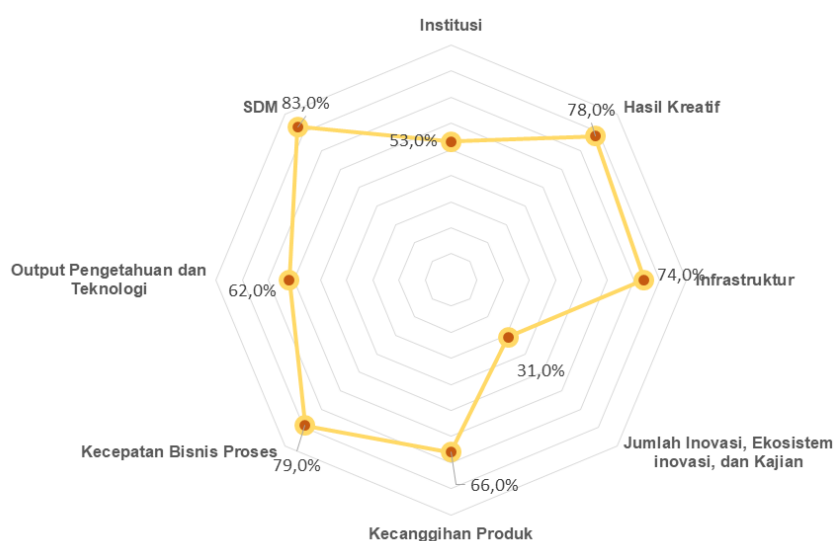
j. Daftar Inovasi Kota Madiun beserta Skor Kematangannya

Tabel 15. Daftar Inovasi Kota Madiun beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
ANGKUTAN BENAVID (Bebas dan Aman Covid 19) – Transportasi Umum Kota Madiun Pada Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020	0
My “CEESE” My Adventure : CLEANLINES, HEALT, SAFETY	0
SANDARAN MARTAMU “Pesan dan Bayar Online Satu Kamar Satu Tamu” Inovasi pada hotel Mataram Baru	0
Pasukan Pecel “Pasar Minggu Kali Bantaran Pembayaran Cepat Online” Inovasi di Sunday Market	0
RAOS ECO “Penerapan Protokol Kesehatan Bebas Covid-19” Inovasi pada Caffé	0
Pelayanan Mall SIKATUP “Pelayanan Mall Sistem Buka Tutup”	0

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
SiCaker "Sistem Cari Kerja"	119
SIP JSM (Satpol PP Inovatif Penertiban Covid-19 Jum'at Sabtu Minggu)	115
BOTANA (BOCAH TANGGAP BENCANA)	105
PENDEKAR OBAT (PElayanan Dalam Kota AntaR Obat)	113
Tebar Pesona (Teras Baca Rengkuh Peran Serta Orangtua dan Anak) untuk Meningkatkan Minat Baca Siswa di SDN 01 Kartoharjo Kota Madiun	99
SI MBOK AYU (Pelukis Tembok Katon Ayu)	101
Lorong Kebangsaan SDN 05 Madiun Lor	122
SOUPABA PBB (Souvenir Payung Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan)	129
Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Madiun	116
HELPDESK GASPPOL C-19 (Siaga Sigap Pendampingan Perizinan Secara Online)	129
Pahlawan Stret Center (PSC)	125
RUMAH DONGENG MODUTA	106
LIONTIN MAS KAWIN	92
SEGAR SARI	96
SEKUTER SI BETI	92
SEPEDA SI BADU	94
RAMEN BU MASI	102
GADJAH MADA (Petugas Adminduk Berkunjung Ke Rumah, Masyarakat Kota Madiun Bahagia)	133
WANITA MULIA (Wadah Komunikasi Kesehatan Mulai hamil, Bayi, dan Anak)	101
TASGANA (KOMUNITAS TANGGAP BENCANA)	115
BU LIS RA MENDO	134
SIAGA KITA (Asuransi Tenaga Kerja Sektor Informal)	131
SAPA LKPM (SiAp Pandu PermAsalahan LKPM)	117
DAMPINGI AKU (penDAMPINGan bagi pelaku Usaha mikro)	107

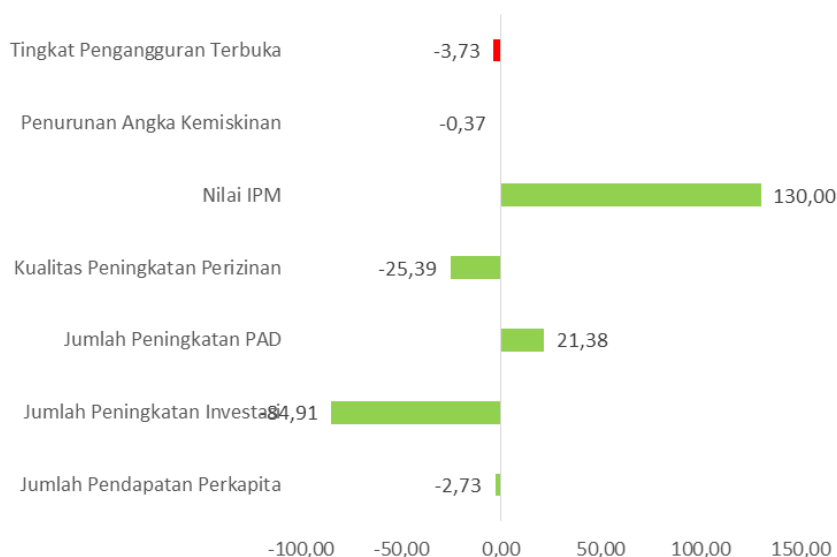
O. KOTA MALANG



Gambar 153. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Malang

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Malang memiliki skor tertinggi pada variabel SDM, yaitu 83.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel SDM sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian dan Kecanggihan Produk masih cukup sedang, yaitu 31.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup sedang atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 154. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Malang

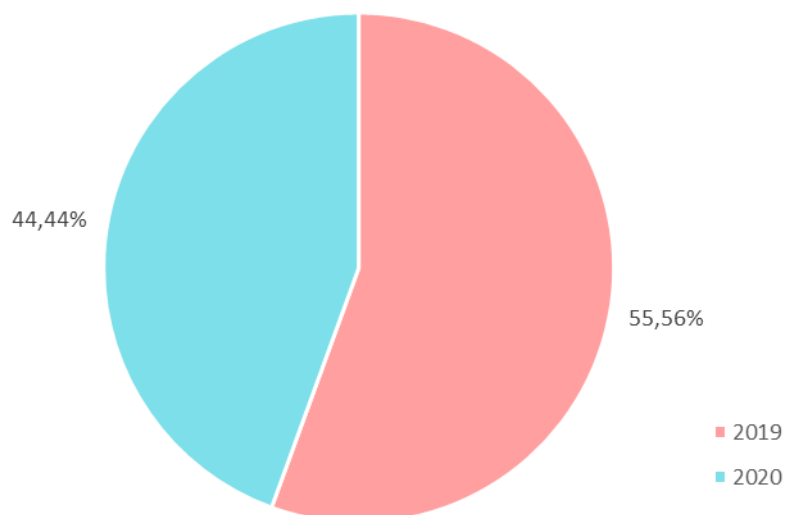
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas

dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Malang belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3.73%, dimana nilai tersebut masih lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya turun sebesar 0.92%. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 0.37%, angka tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya naik 0.02%. Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan sebesar 130.00% dimana nilai tersebut lebih besar dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 25.39% nilai tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kota Malang mengalami penurunan pada Jumlah Pendapatan Perkapita sebesar 2.73% dimana seharusnya standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan hanya sebesar 1.85%. Sedangkan indikator Jumlah Peningkatan Investasi juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 84.91% dimana standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir, indikator Peningkatan PAD pada Kota Malang menunjukkan kenaikan sebesar 21.38%, dimana nilai tersebut masih lebih tinggi dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

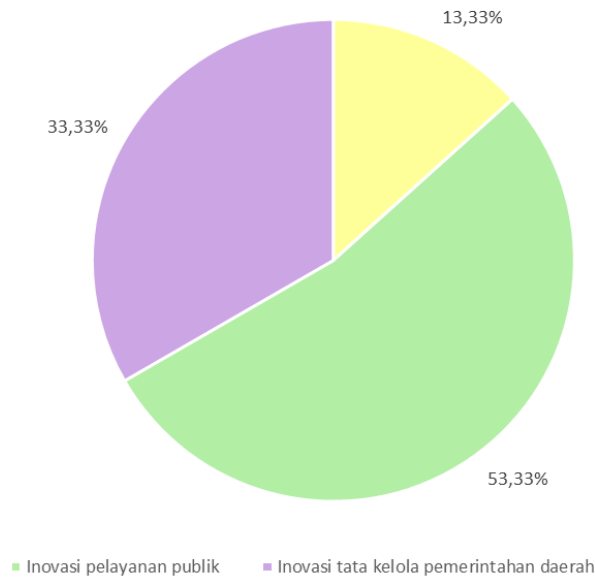
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 155. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Malang

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Malang telah diterapkan sejak tahun 2019. Terdapat 20 (44.44%) inovasi dari 45 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 25 (55.56%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

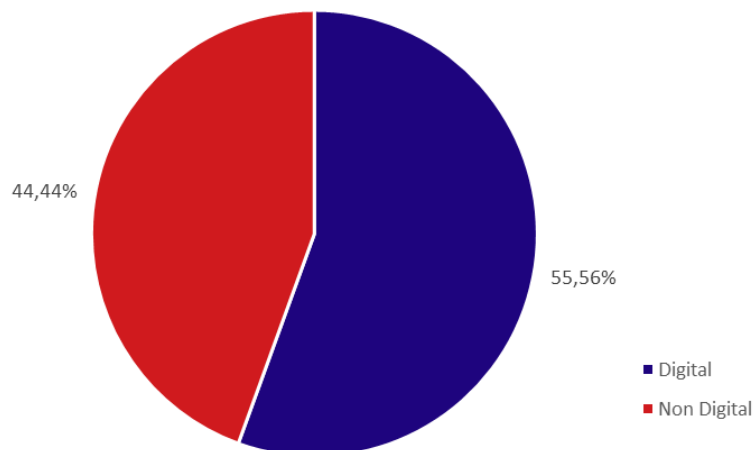
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 156. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Malang

Berdasarkan bentuk inovasi, mayoritas bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Malang yaitu inovasi pelayanan publik sejumlah 24 (53.33%) inovasi. Sedangkan 15 (33.33%) inovasi merupakan inovasi tata kelola pemerintahan dan 6 (13.33%) inovasi lainnya adalah inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan daerah.

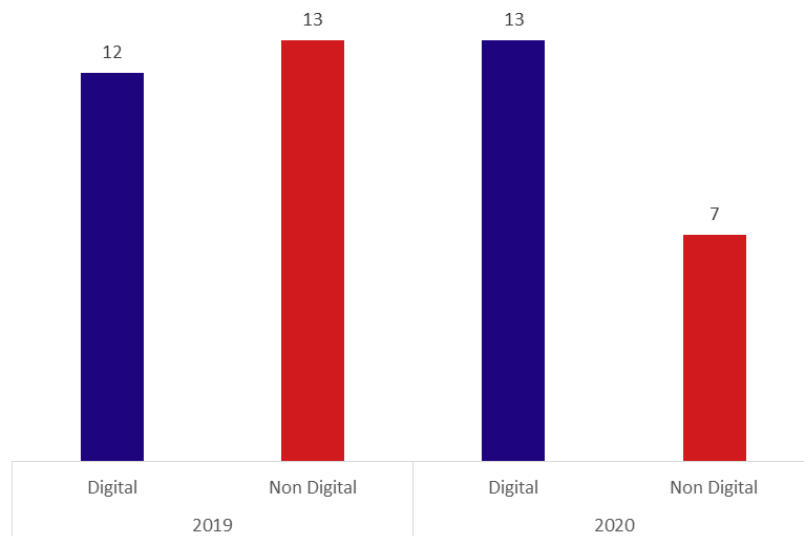
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 157. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Malang

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 25 (55.56%) dari 45 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Malang merupakan inovasi digital dan 20 (44.44%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

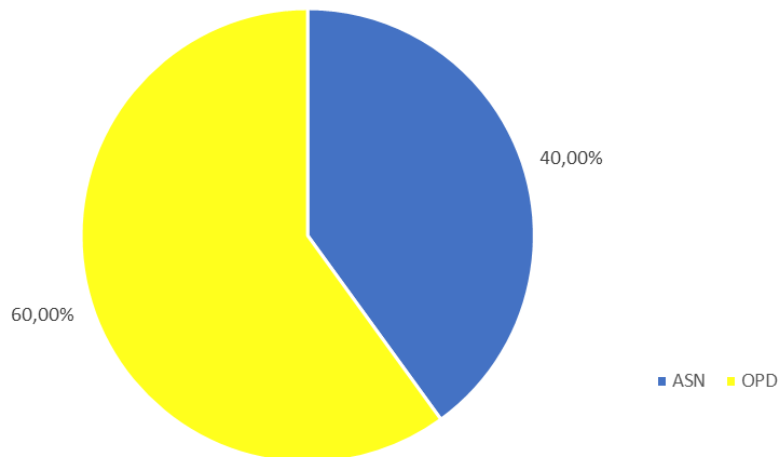
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 158. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Malang

Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 12 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 13 inovasi. Sedangkan jumlah inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 13 inovasi kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 7 inovasi.

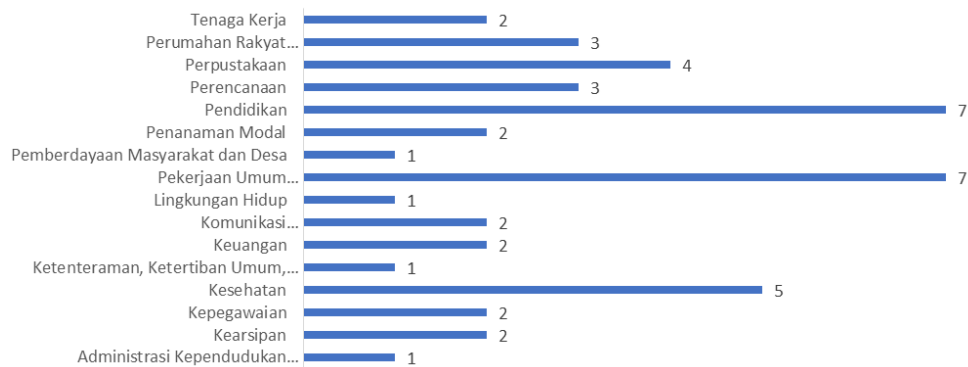
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 159. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Malang

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Malang pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 27 (60.00%) inovasi sementara 18 (40.00%) inovasi lainnya diinisiasi oleh ASN. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

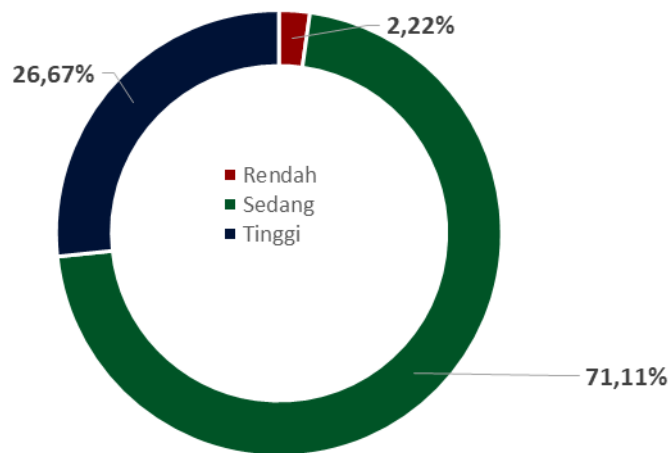
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 160. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Madiun

Mayoritas urusan inovasi pada Kota Malang adalah inovasi pada urusan pendidikan dan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan masing-masing berjumlah 7 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat beberapa urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 3 inovasi, urusan kesehatan dengan 5 inovasi, dan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan 3 inovasi.

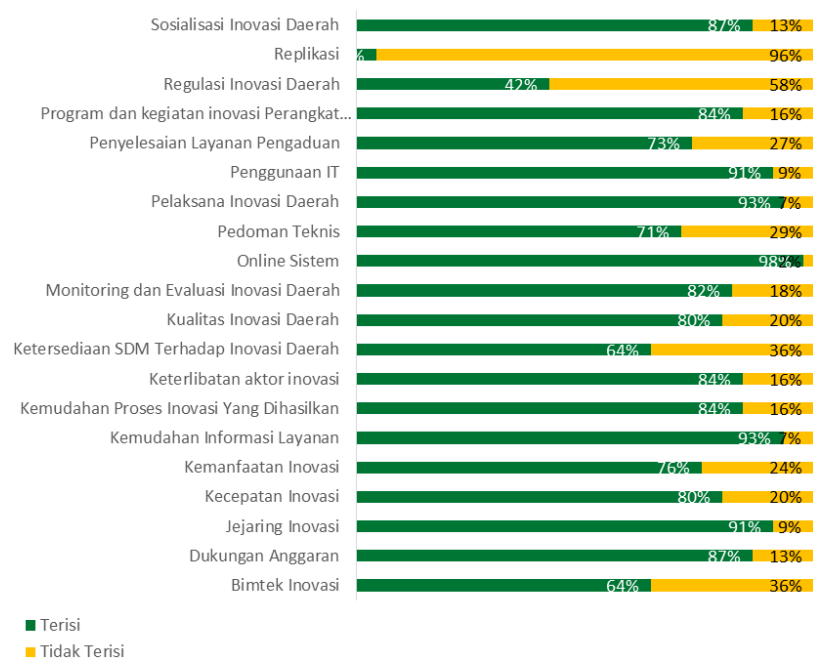
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 161. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Malang

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi sudah mencapai skor kematangan rendah, sedang, dan tinggi, dimana terdapat 32 (71.11%) inovasi termasuk kategori skor kematangan sedang dan terdapat 12 (26.67%) inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi. Sedangkan, sisanya terdapat 1 (2.22%) inovasi masih mencapai skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

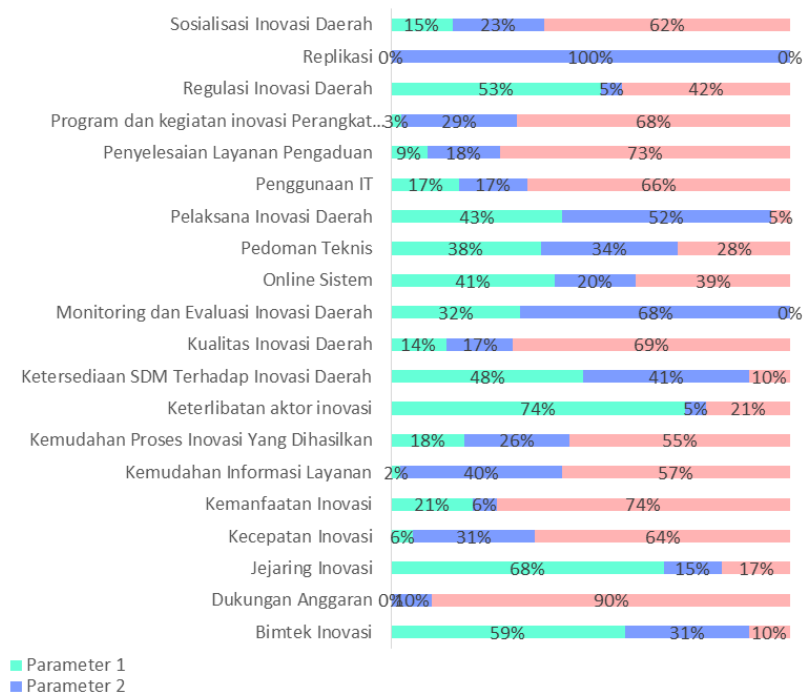


Gambar 162. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Malang

Dari 45 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Malang, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 23.44% sedangkan 76.56% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Online Sistem merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 98% artinya 44 dari 45 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Malang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator Replikasi yaitu sebesar 4% artinya hanya 1 dari 45 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 163. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Dukungan Anggaran sebesar 90% artinya 90% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter ketiga untuk indikator Dukungan Anggaran. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter kedua pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Keterlibatan Aktor Inovasi sebesar 74% artinya 74% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kota Malang beserta Skor Kematangannya

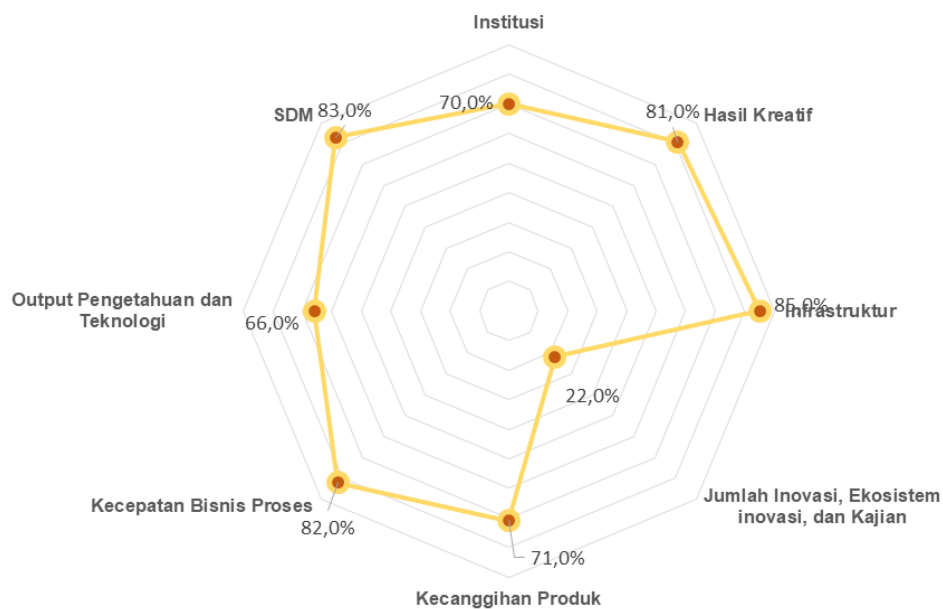
Tabel 16. Daftar Inovasi Kota Malang beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
SI IZOL	98
Penatausahaan Arsip Melalui "SINAYAR" (Sistem Informasi Pelayanan Arsip) Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima	78
Pelayanan Informasi pelaksanaan APBD melalui aplikasi "SAM-AAN" Berbasis TRAFFIC LIGHT SYSTEM	79
PENERAPAN DMS(DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM) PADA PENGELOLAAN ARSIP SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG	63
PENYUSUNAN DATABASE PRASARANA DAN SARANA UMUM DI KELURAHAN JATIMULYO MELALUI APLIKASI DASPRAJATIMYO	67

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
OPTIMALISASI PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LAHAN IPAL KOMUNAL DI WILAYAH KELURAHAN TANJUNGREJO	64
peningkatan kualitas layanan administrasi nikah melalui penerapan aplikasi berbasis microsoft office excell / microsoft office word pada seksi pemerintahan dan ketertiban umum di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang	75
BOM (Bargaining On Mall)/ BOA (Bargaining On Air)	79
Ruang Alumni/Go Leg/ Go Legalisir	67
SAS (Sistem Akademik Satwimaba)	91
Musrenbang Tematik	106
SI-PALDI (Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Air Limbah Domestik)	129
Pentas Pronas (Peran Teman Sebaya untuk Program Zonasi)	85
SIMAS	101
SURADI (Surat Digital) Versi Android	112
Anugerah Inovasi dan Kreativitas Informasi Digital (AIKID)	108
"Arjuno Nonggo"	106
"GERDU ES MAMBO" (Gerakan Terpadu Edukasi Masyarakat : Mampu, Berdaya dan Optimis)	102
BATMAN (BARcode tanaMAN) SD SDN SUKUN 2 Malang	101
Pemberdayaan Kader PSM Dalam Pendataan Masyarakat Miskin Untuk Memenuhi 3 T Dalam Pendistribusian Raskin	71
Pengelolaan Barang Milik Daerah Melalui Pemusnahan Dan Penghapusan Aset Tidak Bernilai Ekonomi Di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen	56
LASKAR PERENCANA	84
SI-PETARUNG v.2	33
Mantep (Pemanfaatan Terintegrasi Padlet)	59
Si Raja Air (Sistem Rekayasa Jaringan Air)	76
SEGAR KAGEMI (SEMUA BUGAR DENGAN KANTIN GEMAR MAKAN IKAN)	60
MALANG CILIN (Malang City Library and Information)	56
DOTSKOM (Layanan Sedot Tangki Septic Kota Malang)	84
E BPHTB BAPENDA KOTA MALANG	99
BLIMBING SINAM Information System and Networking	81
Peningkatan Kualitas IPAL Komunal Berbasis Masyarakat Kelurahan Sukun Kota Malang	80
Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Bimbingan Teknis Memenangkan Peluang Kerja	85
Srikandi Setara (Srikandi Pemantau Seminggu Sekali Tambah Darah)	78
PATROL TARU	78
M-Mobilib	99
Gemas Si Keling (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Bersama Kelurahan Siaga Keliling)	79

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
DRAB (Datang Antarkan Buku)	109
LAYANAN PERPUSTAKAAN DRIVE THRU	109
SIPRETI (Sistem Informasi Presensi Terkini) Versi Android	132
DONAT (Donasi Jelantah)	73
Layanan Info Kerja Kota Malang melalui metode Job Canvassing	92
SEDASA GANGSAL ALON (SDN 5 Sawojajar Malang)	93
SIBAMA (Sistem Informasi Banyu Malang)	101
e-RTLH	88
Si Cakep	90

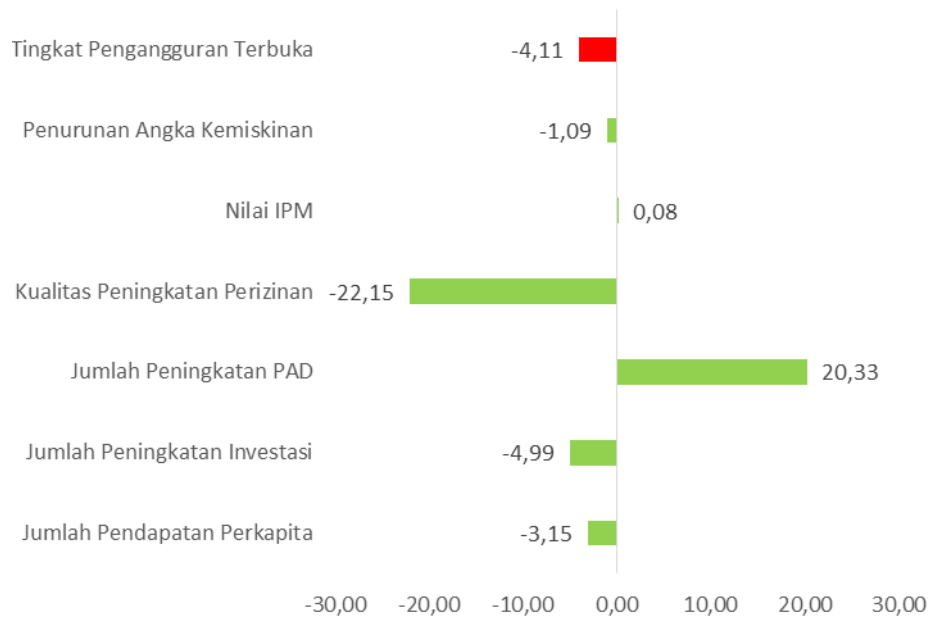
P. KOTA MOJOKERTO



Gambar 164. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Mojokerto

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Mojokerto memiliki skor tertinggi pada variabel Infrastruktur, yaitu 85.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Infrastruktur sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 22.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



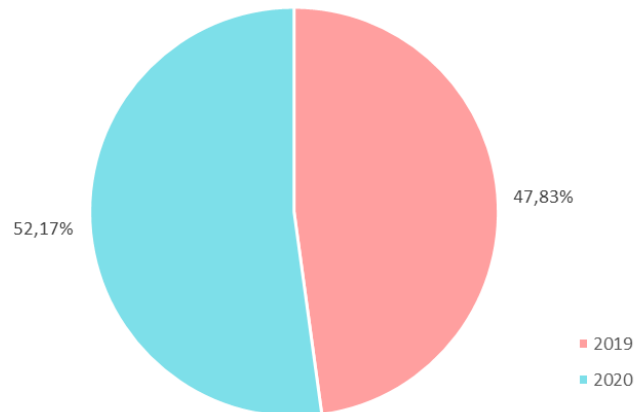
Gambar 165. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Mojokerto

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Mojokerto belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4.11% yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 4.11% dibandingkan tahun 2019. Namun hal ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1.09%, angka tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya naik 0.02%. Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan sebesar 0.08% dimana nilai tersebut lebih tinggi dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan sebesar 22.15% nilai tersebut belum memenuhi standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kota Mojokerto juga mengalami penurunan pada Jumlah Pendapatan Perkapita sebesar 3.15% dimana nilai tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan hanya sebesar 1.85%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan sebesar 4.99% dimana nilai tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir, indikator Peningkatan PAD pada Kota Mojokerto menunjukkan kenaikan sebesar 20.33%, yang berarti nilai tersebut masih sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

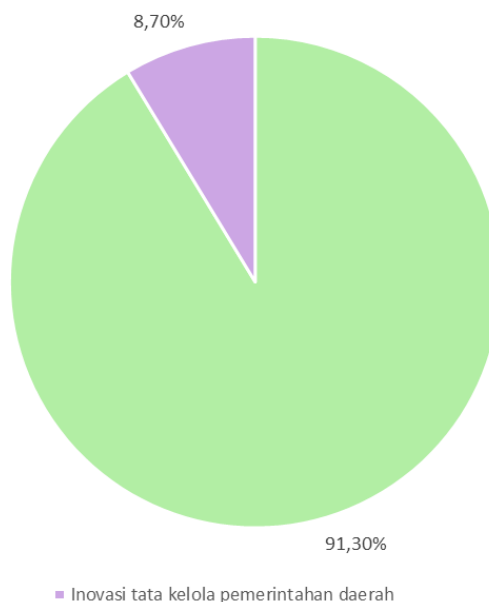
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 166. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Mojokerto

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Mojokerto telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 12 (52.17%) inovasi dari 23 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 11 (47.83%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

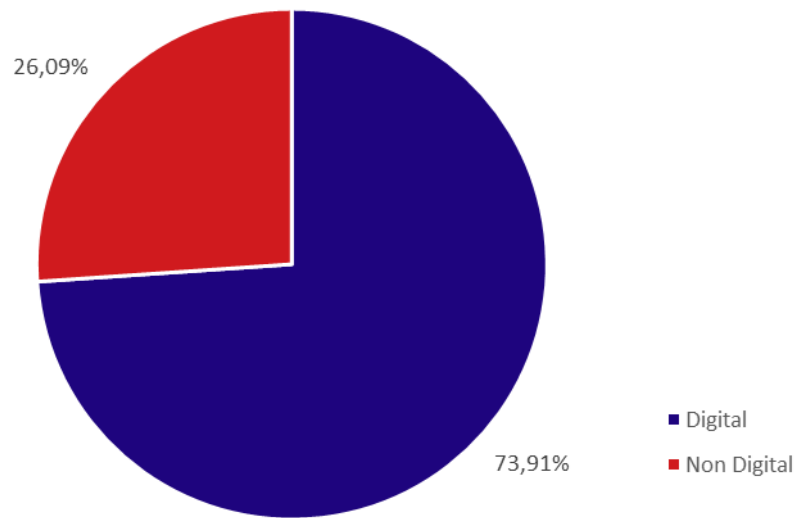
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 167. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Mojokerto

Berdasarkan bentuk inovasi, baru terdapat 2 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Mojokerto, yaitu inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Proporsi inovasi pelayanan publik yaitu terdapat 21 (91.30%) inovasi pelayanan publik dan 2 (8.70%) inovasi lainnya adalah tata kelola pemerintahan.

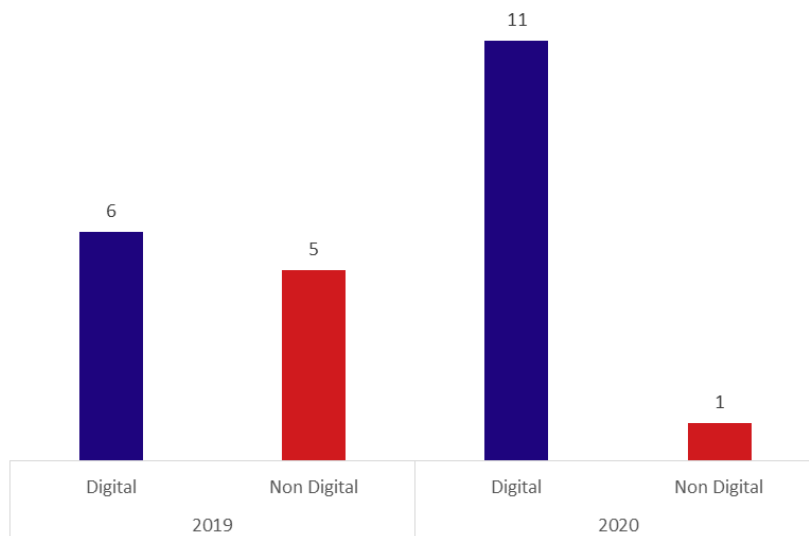
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 168. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Mojokerto

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 17 (73.91%) dari 23 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Mojokerto merupakan inovasi digital dan 6 (26.09%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

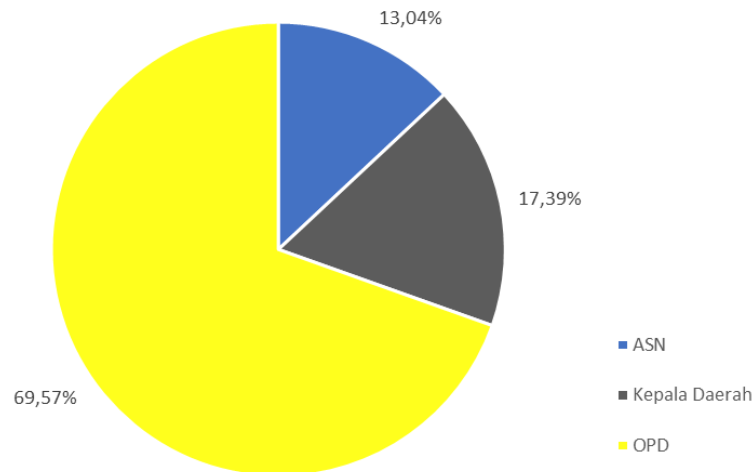
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 169. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Mojokerto

Dapat dilihat bahwa jumlah inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan oleh Kota Mojokerto sejumlah 6 inovasi kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 11 inovasi. Sedangkan jumlah inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 hanya ada 5 inovasi dilaporkan lalu pada tahun 2020 turun menjadi 1 inovasi non digital.

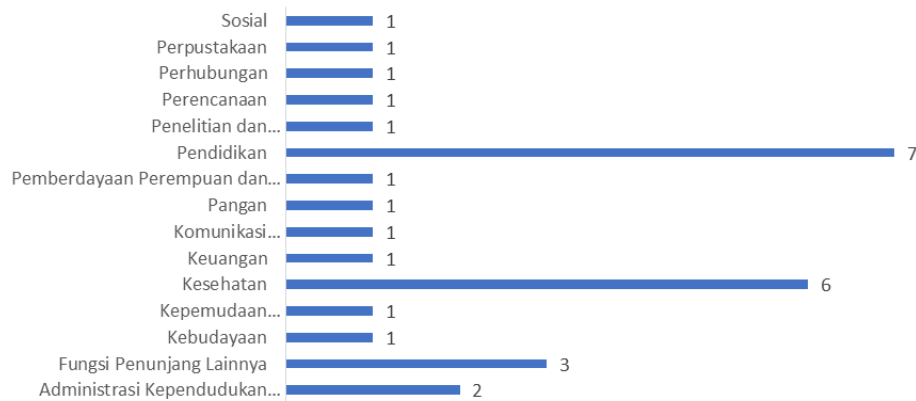
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 170. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Mojokerto

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Mojokerto pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 16 (69.57%) inovasi sementara 4 (17.39%) inovasi diinisiasi oleh Kepala Daerah dan 3 (13.04%) inovasi lainnya diinisiasi oleh ASN. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

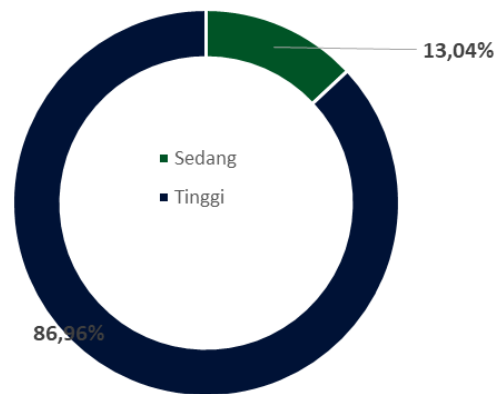
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 171. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Mojokerto

Mayoritas urusan inovasi pada Kota Mojokerto adalah inovasi pada urusan pendidikan dengan 7 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, beberapa urusan wajib pelayanan dasar yang dilaporkan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut urusan pendidikan dengan 7 inovasi dan urusan kesehatan dengan 6 inovasi, sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar lainnya belum dilaporkan.

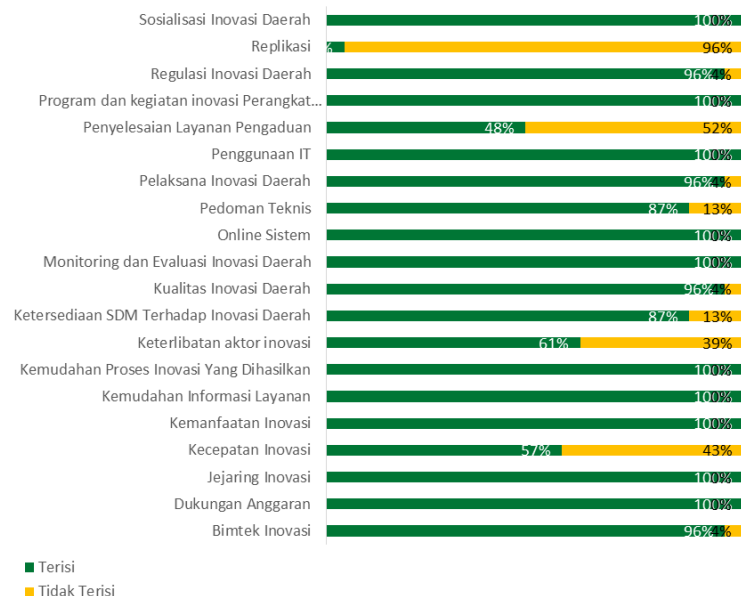
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 172. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Mojokerto

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang dan tinggi, dimana terdapat 20 (86.96%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi dan terdapat 3 (13.04%) inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



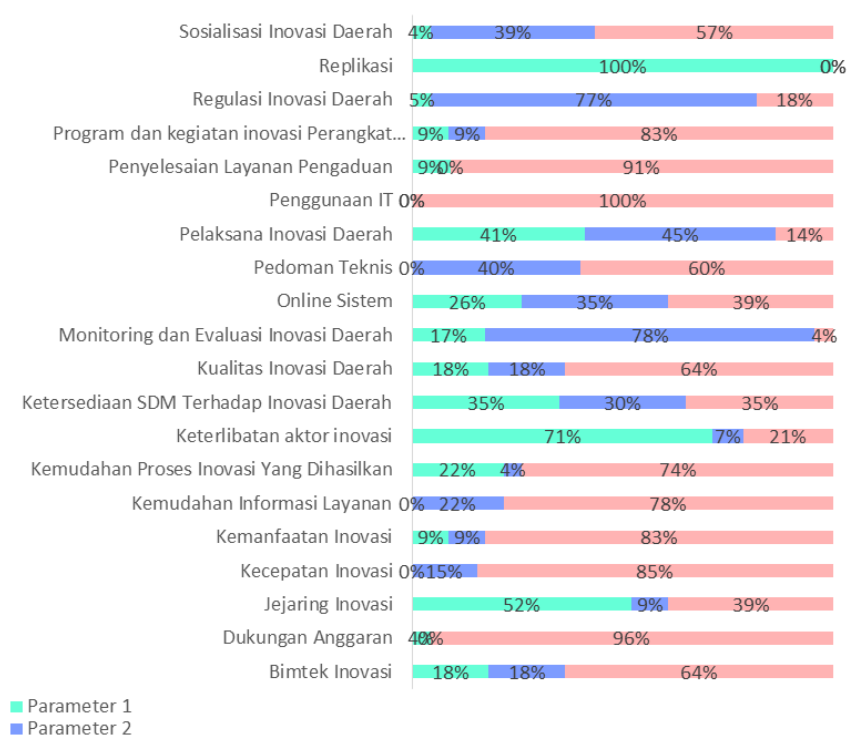
Gambar 173. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Mojokerto

Dari 23 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Mojokerto, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 13.70%

sedangkan 86.30% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu: Indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penggunaan IT, Online Sistem, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Jejaring Inovasi, dan Dukungan Anggaran. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Mojokerto telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 4% artinya hanya 1 dari 23 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 174. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

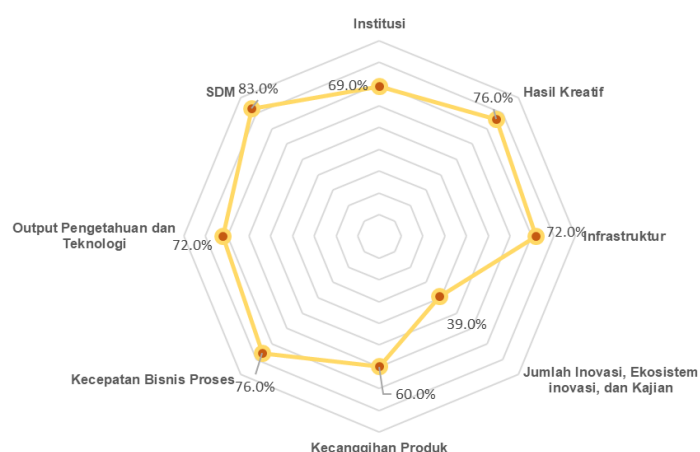
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penggunaan IT sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 78% artinya 78% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Regulasi.

j. Daftar Inovasi Kota Mojokerto beserta Skor Kematangannya

Tabel 17. Daftar Inovasi Kota Mojokerto beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
PAUS DANIL (Paket Plus Pemeriksaan Standar Ibu Hamil)	108
E-SKM (SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK) KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO	105
MAGIS (Mojokerto Kota – Geographic Information System)	128
BRANTAS TUNTAS (Berita Anak Terkini di Sekolah Orang Tua Nyaman Tenang dan Puas)	123
CURHAT NING ITA	115
DOLEN KOMO (Dongeng Online Kota Mojokerto)	118
SI IMUT KERTO (Sistem Infomasi Manajemen Uji Kendaraan Bermotor Terintegrasi Kota Mojokerto)	127
KEJAR MADU (KELAS BELAJAR MENGENAL MAKHLUK HIDUP)	107
CEKER PEDAS SEDIKIT MANIS	100
Klinik 3 to Zero	100
LALIN SI PENDUK	106
SIMPAN (Solusi Medis Lengkap Dalam Genggaman)	124
PERLAHAN IN ON (Pelaporan Peralihan Hak Tanah Bangunan Terintegrasi Secara Online)	116
SemPelMas (System Pelayanan Masyarakat)	102
NGARANG BIJI ??, GOODBYE...	107
SAMBEL TERI (Pemeriksaan Berat Badan, Tinggi Badan, Laboratorium, Tekanan Darah Terintegrasi) Puskesmas Kedundung	91
MLIJO Online Pasar Tanjung	103
SI PERWIRA (Siswa Pelopor Wirausaha)	112
GAYATRI KENDALI COVID	109
Aplikasi E-Surat	124
SIPUSER (Sistem Perpustakaan Elektronik Pemersatu SMP Negeri 2)	102
PPDB Online	85
AMBYAAR BRO (AMANKAN BAYI, ANAK-ANAK DAN REMAJA DARI BAHAYA ROKOK)	87

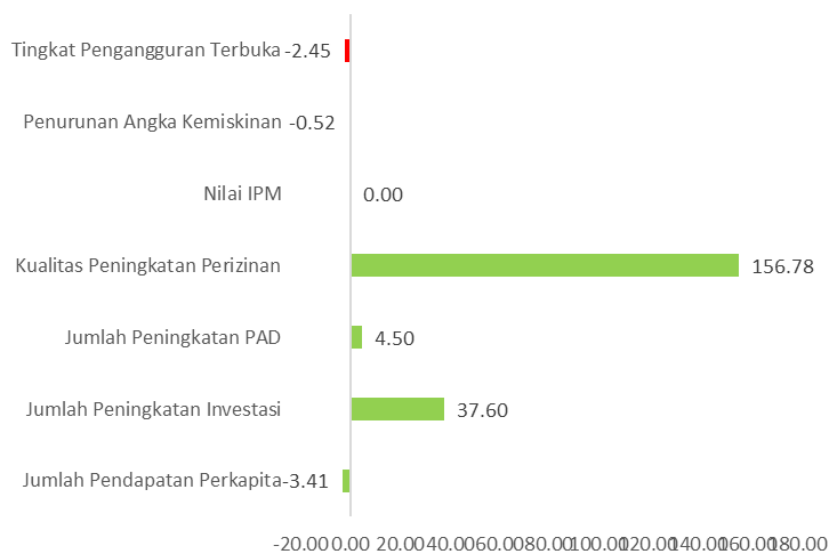
Q. KOTA PROBOLINGGO



Gambar 175. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Probolinggo

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Probolinggo memiliki skor tertinggi pada variabel SDM, yaitu 83.0%. Artinya secara umum indikator pada variabel SDM sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 39.0% dimana secara umum capaian skor indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 176. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Probolinggo

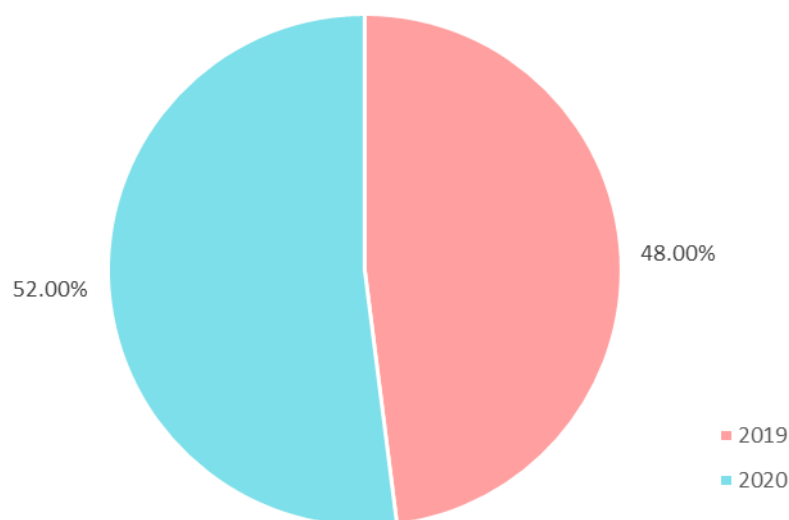
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Probolinggo sudah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2.45%, yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 2.45% dibandingkan tahun 2019. Namun hal ini telah sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Selanjutnya, indikator Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan sebesar 156.78% dimana nilai tersebut sudah lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan PAD yang meningkat sebesar 4.50% dimana nilai tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 8%. Pemerintah Kota Probolinggo mengalami kenaikan pada Jumlah Investasi sebesar 37.60% dimana sudah lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan peningkatan sebesar 0.45%.

Jumlah Pendapatan Perkapita Kota Probolinggo turun sebesar 3.41%, dimana nilai tersebut sudah lebih rendah dibandingkan dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang menurun sebesar 1.85%. Demikian pula dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu sebesar 0.00% dimana nilai tersebut sama dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Terakhir, indikator Penurunan Angka Kemiskinan pada Kota Probolinggo menunjukkan penurunan sebesar 0.52%, yang berarti bahwa jumlah penduduk miskin naik sebesar 0.52% dibandingkan tahun sebelumnya. nilai tersebut sudah belum mencapai dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 0.02%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

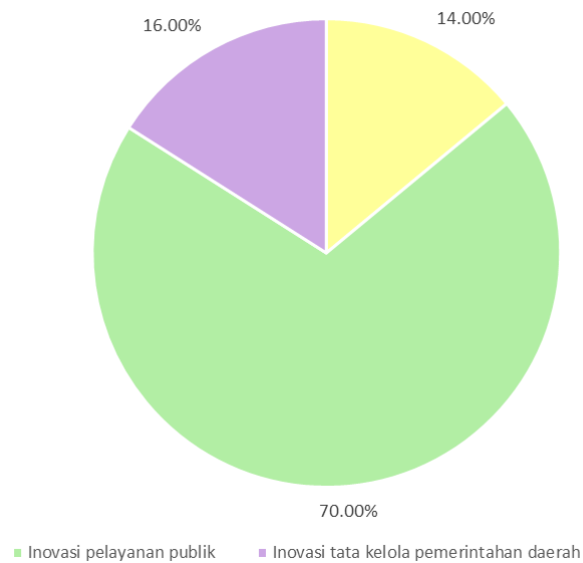
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 177. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Probolinggo

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Probolinggo telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 26 (52.00%) inovasi dari 50 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 24 (48.00%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2020.

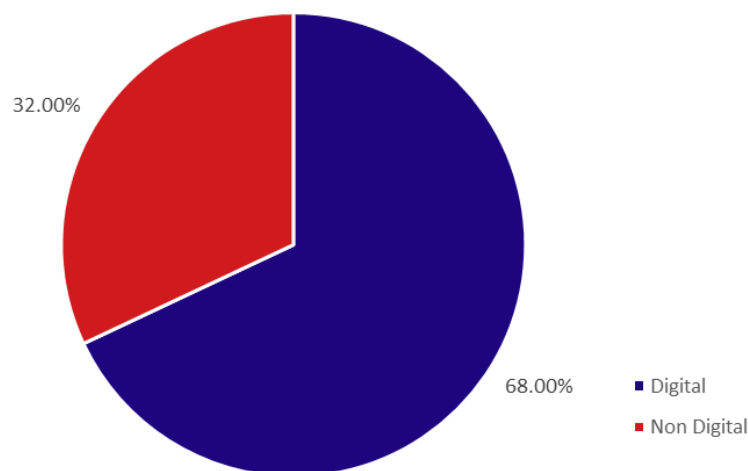
b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 178. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Probolinggo

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah berturut-turut, yaitu terdapat 35 (70.00%) inovasi pelayanan publik dan 8 (16.00%) inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Probolinggo merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Sementara 7 (14.00%) inovasi lainnya adalah inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

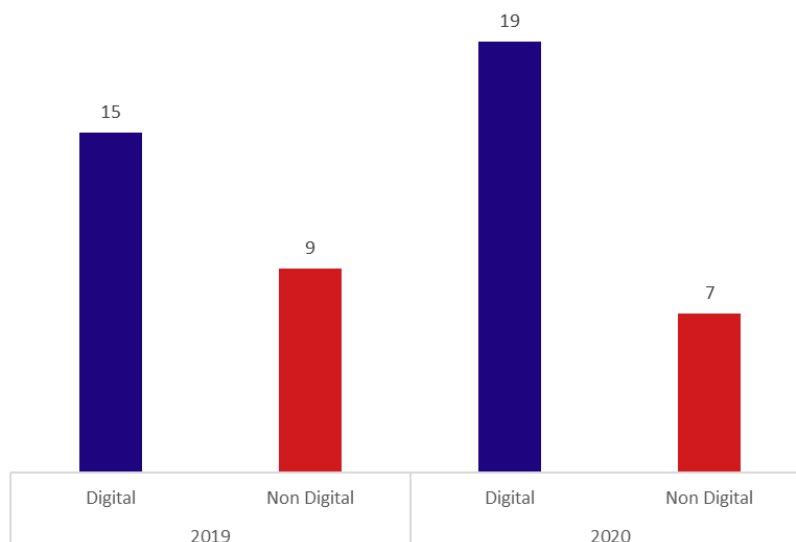
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 179. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Probolinggo

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, 34 (68.00%) dari 50 inovasi daerah yang dilaporkan Kota Probolinggo merupakan inovasi digital dan 16 (32.00%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

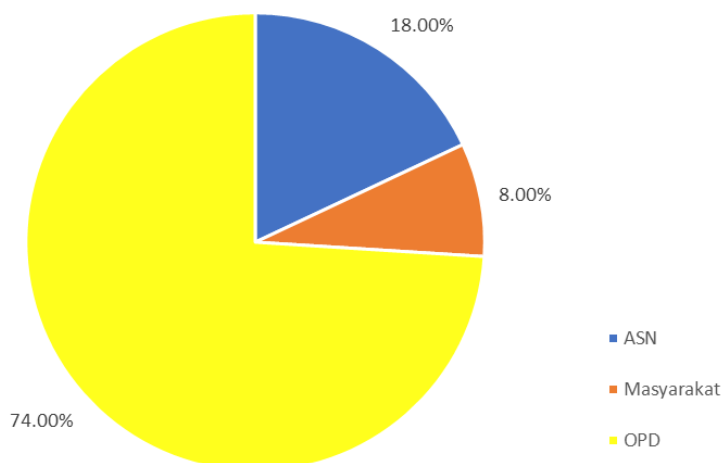
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 180. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Probolinggo

Dapat dilihat bahwa inovasi digital mengalami kenaikan di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 15 inovasi kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 19 inovasi. Sedangkan jumlah penerapan inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 sejumlah 9 inovasi telah diterapkan oleh Kota Probolinggo dan pada tahun 2020 menurun menjadi sejumlah 7 inovasi.

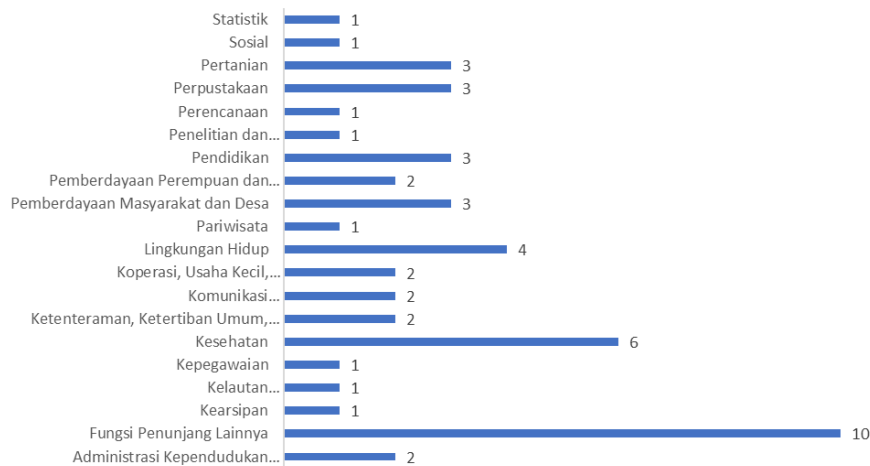
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 181. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Probolinggo

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Probolinggo pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 37 (74.00%) inovasi. Inovasi yang diinisiasi oleh ASN sejumlah 9 (18.00%) inovasi, sementara 4 (8.00%) lainnya diinisiasi oleh Masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD dan Kepala Daerah belum dilaporkan di tahun 2021.

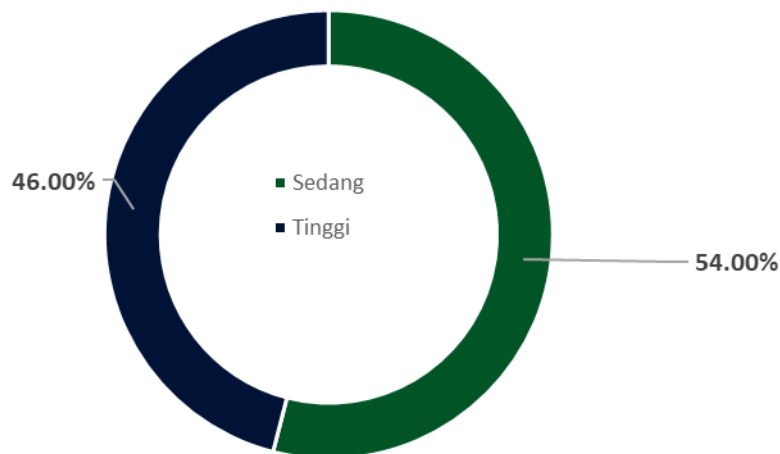
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 182. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Probolinggo

Sebaran inovasi daerah pada Kota Probolinggo berdasarkan urusan pemerintahan cukup beragam. Urusan yang paling banyak adalah inovasi pada urusan fungsi penunjang lainnya dengan 10 inovasi dari 50 inovasi yang dilaporkan. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, terdapat beberapa urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan dengan 3 inovasi, urusan kesehatan dengan 6 inovasi, dan urusan sosial dengan 1 inovasi.

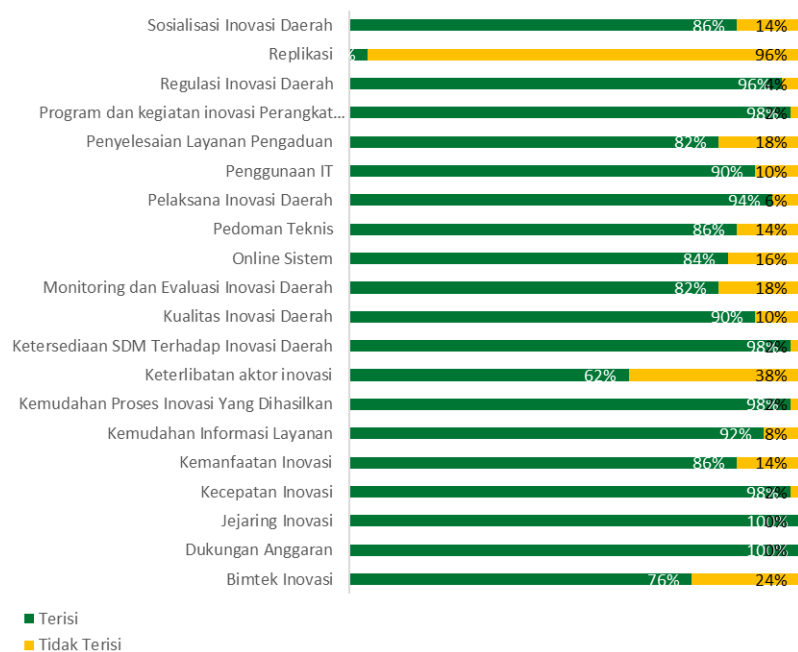
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 183. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Probolinggo

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi, yaitu sejumlah 23 (46.00%) inovasi. Selain itu, sisanya terdapat 27 (54.00%) inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

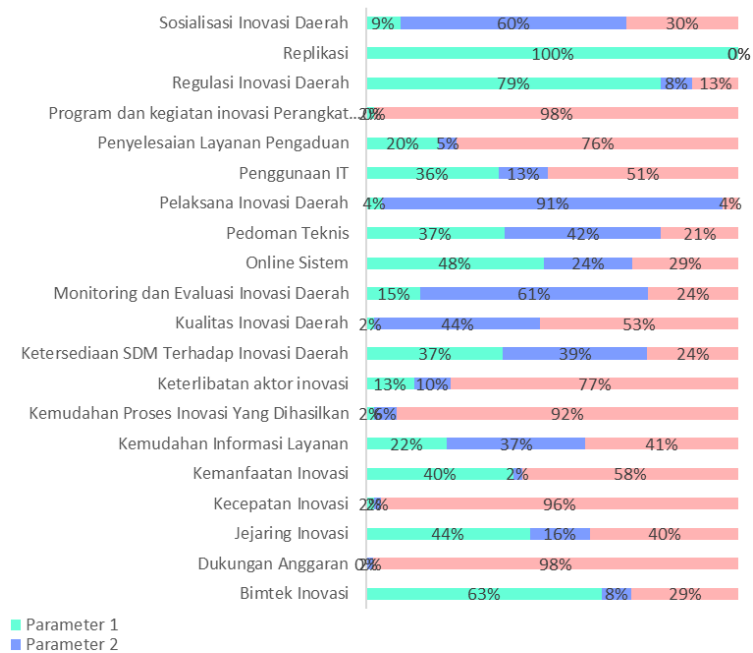
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 184. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Probolinggo

Dari 50 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Probolinggo, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 14.90% sedangkan 85.10% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Jejaring Inovasi dan Dukungan Anggaran memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 100% artinya 50 dari 50 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Probolinggo telah terisi data pendukung pada indikator-indikator tersebut. Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi yaitu sebesar 4% artinya hanya 2 dari 50 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 185. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPd sebesar 98%, artinya 98% dari inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPd termasuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 91% artinya 91% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator Pelaksana Inovasi Daerah termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Replikasi.

j. Daftar Inovasi Kota Probolinggo beserta Skor Kematangannya

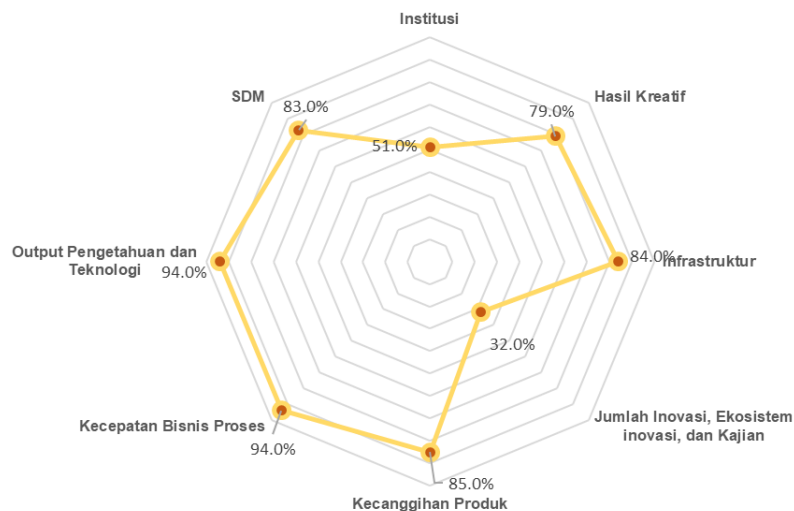
Tabel 18. Daftar Inovasi Kota Probolinggo beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
View Probolinggo (Visitable, Impressive, Energy, Worthy)	98
BPJS BANGKIT" (Berkas Pelayanan Jalan Sendiri)	113
DIG RIPKA (Digitalisasi Arsip Kelurahan)	73
Klinik Sultan (Klinik Konsultasi dan Pengaduan)	63
Automatic and Mobile Unloading Ramp yang CAAKEB (Cepat, Akurat, Aman, Kesrawan, Efisien dan Berkualitas)	94
PAKDESUN (Partisipasi Komunitas Difabel Untuk Sungai)	107
BOS DILAN (Bantuan Sosial Delivery Lanjut Usia)	105

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
BAZAR PELAYANAN "MAJENGAN BERLARI" (MAYANGAN BIAYA GRATIS LAYANAN MALAM HARI)	105
Jati Kampung Seni	81
TOSSAKU JEBOL MANTUL	82
KNKM (Komunitas Noasih Kreatif Mandiri)	89
SI MAK NGEBOR (Aksi Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim dengan Gerakan Arisan Perbanyak Biopori)	82
KAMPUNG BATIK BAREMI	74
BESJEM (Berkah Sampah Jadi E-Money)	90
JANGAN MANISA (Perpanjangan peminjaman Lewat Whatsapp)	99
Noasih Trans	76
NASI WALANGKU (Layanan Siap Bawa Pulang Buku)	86
TANGGO VANILA (Pendaftaran Anggota Via Online Aja)	85
"KAMPUNG INGGRIS WISATA BENTENG"	85
Mlijo Online Probolinggo	98
Layanan Gool (Go Online)	117
Ayo Mbak (Ayo Membangun bersama Anak)	82
JURUS AK3 PLUS SANTUNAN KEMATIAN (Jadi Sekali Urus Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan KTP-el Plus Santunan Kematian)	116
JEMPOL UNTUKMU (JEMPut bOLA UNTUK produK berMUtu)	91
NGOPI (Ngobrol Pintar)	84
ADEK DEWA (Anak Dekat dengan Satwa)	91
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)	94
Setetes Mol Sejuta Kehidupan	63
Inovasi Kampung Tematik Menuju Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan	93
JARING PERAK (jaringan perlindungan perempuan dan anak)	114
SI POKER (Sistem Inovasi Polisi Masker)	81
Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak (SISKIA)	126
KARTU UMKM, SATU KARTU BERBAGAI MANFAAT	125
Si Juwita Malam (Sistem Informasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Dalam Negeri)	123
SIPEKA (Sistem Informasi dan Pelaporan Penanganan Perkara)	113
Dear Karedok (DEpo ARsip Kemudahan Pencarian DOKumen)	110
COMPOK LASTAREH	115
SEGITIGA BERMUDA (Sekolah Digital Dan Teknologi Informasi Gadget Berorientasi Mutu dan Karakter)	118
ULTPK (Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan)	101
TEMAN BAHAGIA (Sistem Pembinaan bagi Penderita Gangguan Jiwa)	113
HIPERAKTIF BRO	114

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Sipena BOS (Sistem Pengendalian Dana Bantuan Operasional Sekolah berbasis Digital Berfokus Pada Mutu Pembelajaran)	122
GISA SABAR (GEOGRAPICH INFORMASI SYSTEM SAMBUNGAN BARU)	114
Si JinGGo (Sistem Informasi Jaringan Informasi Good Governance)	119
Sari Perak Joss (Satu Hari Perawatan Keluarga Jemput Obati Sampai Sembuh).	126
Belajar " OGS " MEMPESONA	117
Wastafel "Muvico" (Musnahkan Virus Corona)	77
SISTEM INOVASI LAYANAN ARISAN/ANGSURAN JAMBAN) KIKIS PERILAKU " BABs " (BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN) DI KOTA PROBOLINGGO	87
APUSIDA (Aplikasi Usulan Inovasi Daerah)	109
"SISITUR" (SISTEM INFORMASI INFRASTRUKTUR)	99

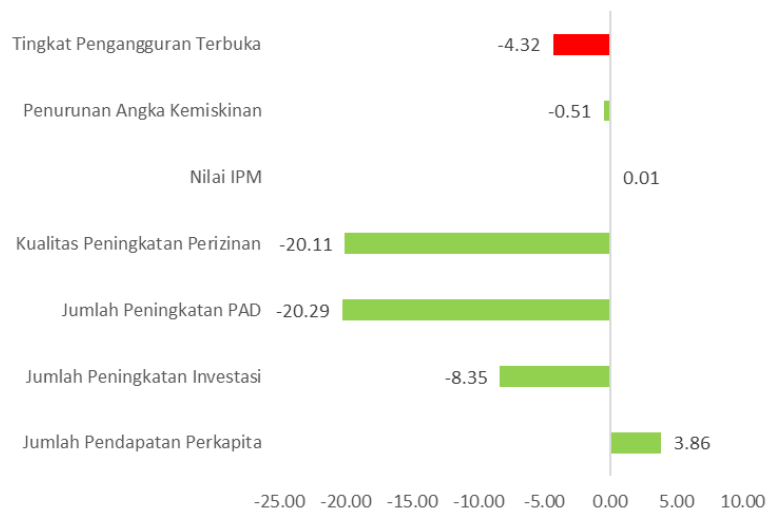
R. KOTA SURABAYA



Gambar 186. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Surabaya

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Surabaya memiliki skor tertinggi pada variabel Kecepatan Bisnis Proses dan Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 94.0%. Artinya secara umum indikator pada variabel - variabel tersebut sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi, dan Kajian masih sangat rendah, yaitu 32.0% dimana secara umum capaian skor indikator pada variabel tersebut masih sangat rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



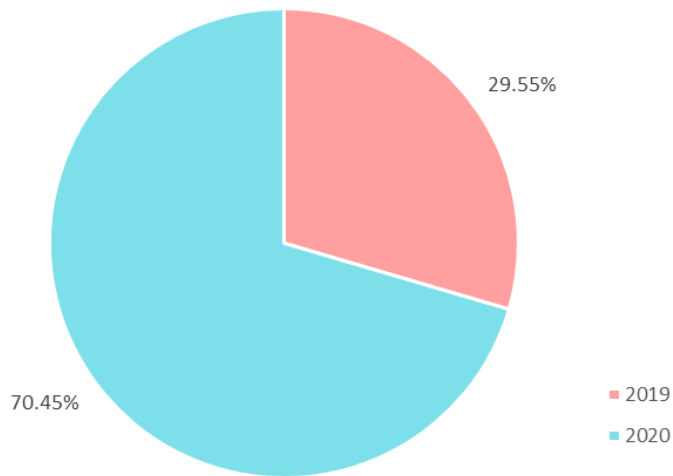
Gambar 187. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Surabaya

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Surabaya belum mengalami perkembangan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya penurunan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4.32% yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka naik sebesar 4.32% dibandingkan tahun 2019. Namun hal ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan menurun sebesar 0.51%, angka tersebut lebih kecil dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya naik 0.02%. Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan yaitu sebesar 0.01% dimana nilai tersebut telah mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami penurunan yaitu sebesar 20.11% nilai tersebut belum melampaui standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan pada Jumlah Pendapatan Perkapita sebesar 3.86% dimana nilai tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan hanya sebesar 1.85%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami penurunan sebesar 8.35% dimana nilai tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir, indikator Peningkatan PAD pada Kota Surabaya menunjukkan penurunan sebesar 20.29%, yang berarti nilai tersebut lebih rendah dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

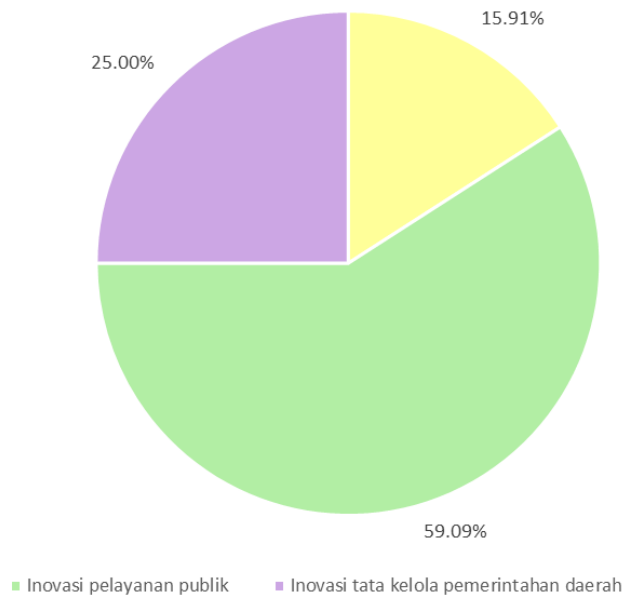
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 188. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Surabaya

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kota Surabaya telah diterapkan sejak tahun 2020. Terdapat 31 (70.45%) inovasi dari 44 inovasi yang dilaporkan tersebut diterapkan sejak tahun 2020 dan 13 (29.55%) inovasi lainnya diterapkan sejak tahun 2019.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

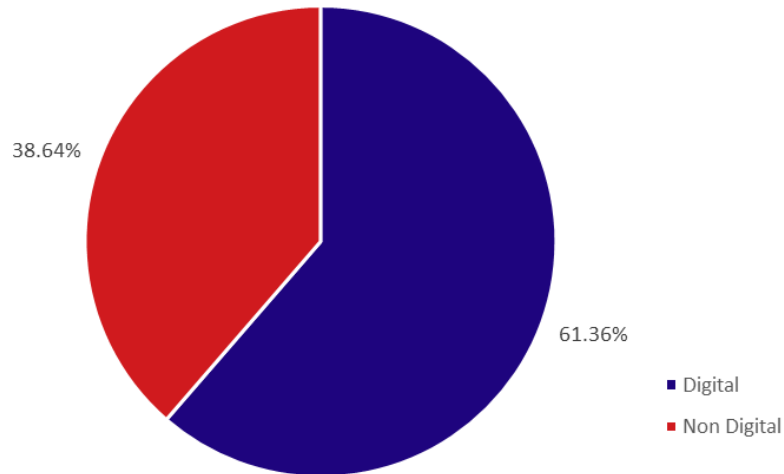


Gambar 189. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Surabaya

Berdasarkan bentuk inovasi, terdapat 3 bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Surabaya, yaitu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan, dan inovasi

daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Proporsi inovasi pelayanan publik yaitu terdapat 26 (59.09%) inovasi, terdapat 11 (25.00%) inovasi tata kelola pemerintahan. Sementara 7 (15.91%) inovasi lainnya adalah inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Surabaya merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

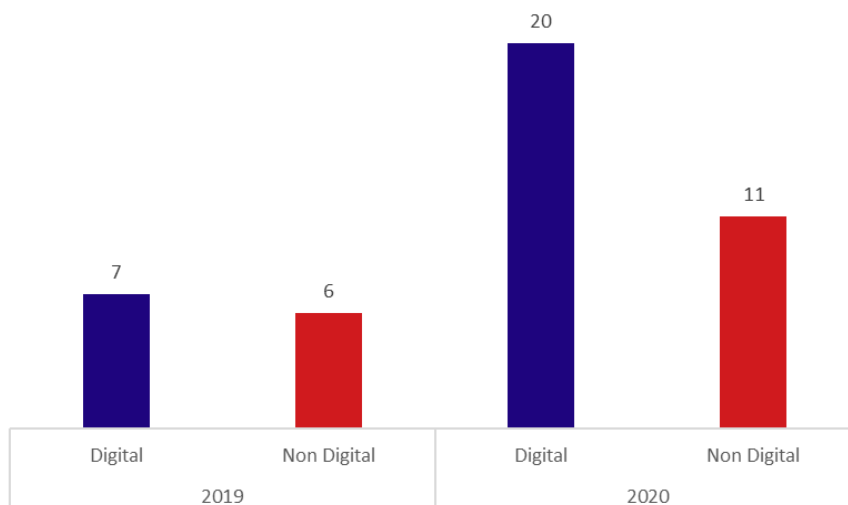
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 190. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Surabaya

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan Kota Surabaya merupakan inovasi digital, yaitu sebesar 27 (61.36%) inovasi. Sedangkan 17 (38.64%) inovasi lainnya merupakan inovasi non digital.

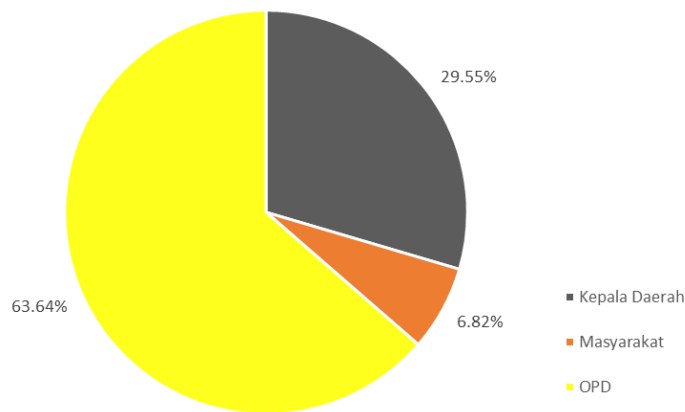
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 191. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Surabaya

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik pada inovasi digital dan non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 7 inovasi kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 20 inovasi. Demikian pula pada inovasi non digital dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 6 inovasi kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 11 inovasi.

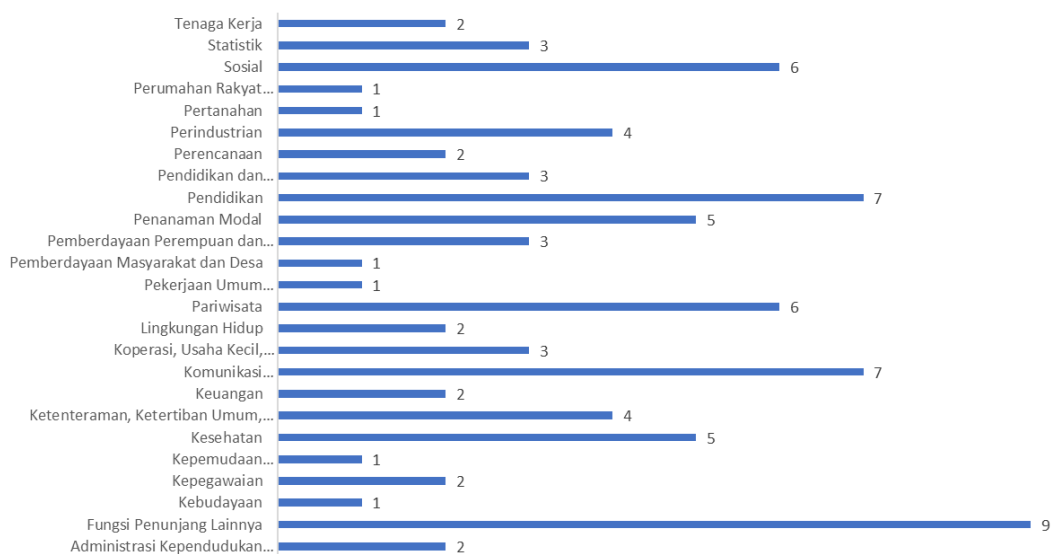
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 192. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Surabaya

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Surabaya pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sejumlah 28 (63.64%) inovasi sementara inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah sejumlah 13 (29.55%) inovasi dan sisa inovasi lainnya diinisiasi oleh Masyarakat sejumlah 3 (6.82%) inovasi dan. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN dan DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 193. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Surabaya

Mayoritas urusan inovasi pada Kota Surabaya adalah inovasi pada urusan fungsi penunjang lainnya dengan 9 inovasi. Dari sebaran inovasi daerah tersebut, seluruh urusan wajib pelayanan dasar telah dilaporkan Kota Surabaya antara lain urusan kesehatan dengan 5 inovasi, urusan sosial dengan 6 inovasi, urusan pendidikan dengan 3 inovasi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan 1 inovasi, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dengan 1 inovasi, dan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan 4 inovasi.

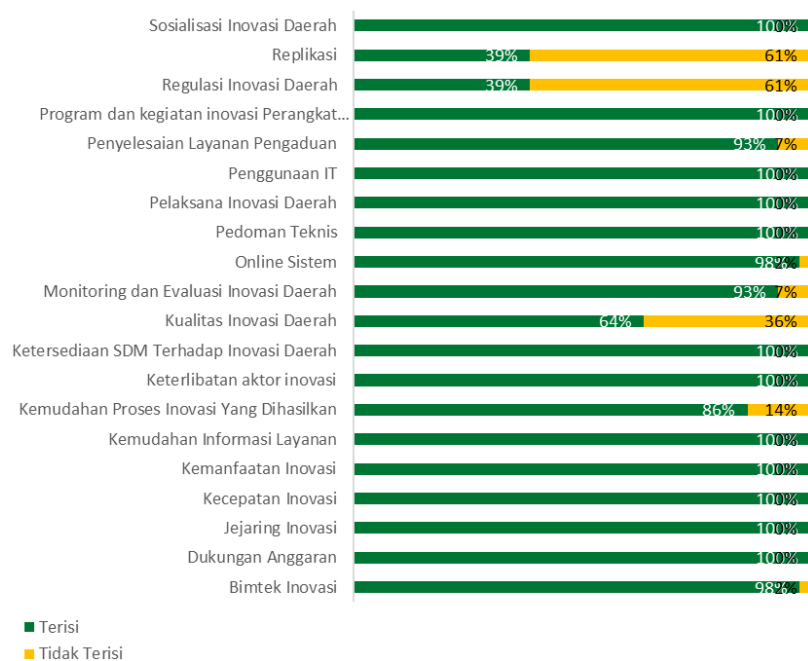
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 194. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Surabaya

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi masih mencapai skor kematangan tinggi, dimana seluruh (100.00%) inovasi termasuk kategori skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

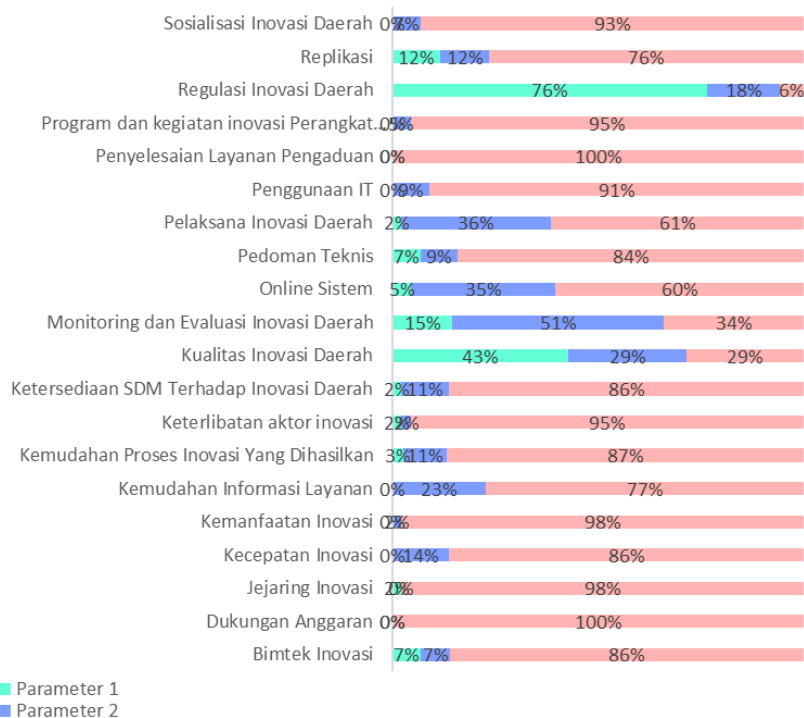


Gambar 195. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Surabaya

Dari 44 inovasi yang dilaporkan oleh Kota Surabaya, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 9.55% sedangkan 90.45% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator dengan tingkat keterisian 100%, yaitu: Indikator Sosialisasi Inovasi Daerah, Program dan Kegiatan Inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD, Penggunaan IT, Pelaksana Inovasi Daerah, Pedoman Teknis, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Keterlibatan Aktor Inovasi, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, Kemudahan Informasi Layanan, Kemanfaatan Inovasi, Kecepatan Inovasi, Jejaring Inovasi, dan Dukungan Anggaran. Artinya, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Surabaya telah terisi data pendukung pada indikator - indikator tersebut.

Sedangkan indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung yang paling rendah adalah indikator replikasi dan regulasi inovasi daerah yaitu sebesar 39% artinya 17 dari 44 inovasi yang dilaporkan telah terisi data pendukung dari indikator-indikator tersebut.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 196. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Penyelesaian Layanan Pengaduan dan Dukungan Anggaran masing-masing sebesar 100%, artinya seluruh inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator – indikator tersebut masuk dalam kategori parameter ketiga. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 51% artinya 51% inovasi yang telah terisi data pendukung pada indikator tersebut termasuk dalam kategori parameter kedua. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi Inovasi Daerah sebesar 76% artinya 76% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator tersebut.

j. Daftar Inovasi Kota Surabaya beserta Skor Kematangannya

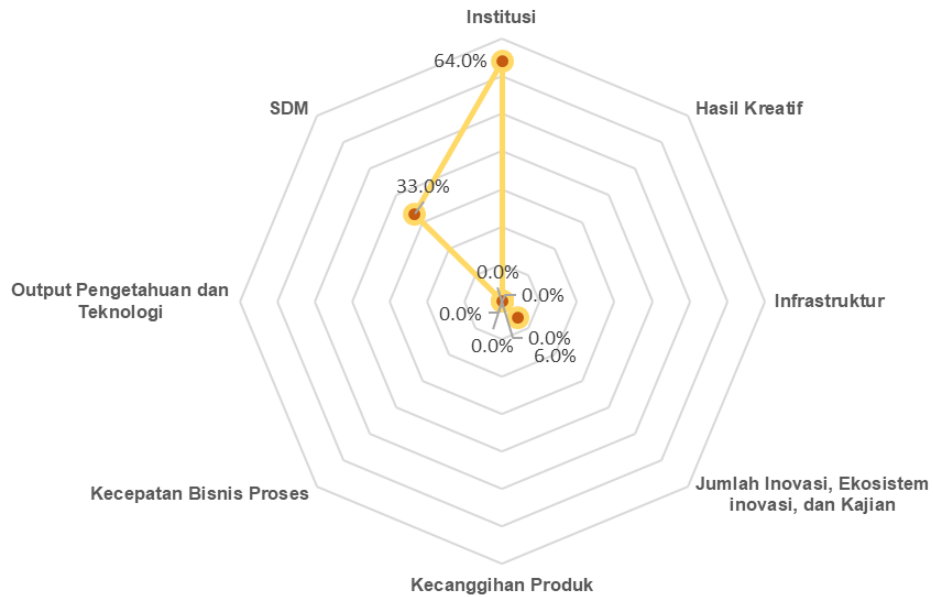
Tabel 19. Daftar Inovasi Kota Surabaya beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Klampid Dispendukcapil	146
SIGIS (Surabaya Integrated Geographic Information System)	117
Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Sekolah (SIMBAS)	104
TAMAN KALIMAS (Tempat Menampung Karya Literasi Masyarakat)	119
Sistem Pembayaran Satu Kasir Sentra Wisata Kuliner (E-Kastra)	121

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Pembentukan Koperasi Konsumen untuk Pemberdayaan UMKM dan Toko Kelontong di Surabaya	118
Si Pengkupas (Sistem Informasi Manajemen Pengukuran Kinerja Pelaku Usaha Mikro Kota Surabaya)	115
Layanan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi	124
Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja	118
Tim Penyelamatan dan Evakuasi (Tim Rescue)	130
Transaksi Non-Tunai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS) Mobile	100
Aplikasi Apel Petang (Aplikasi Pelacakan Pegawai Tangguh)	114
Rumah Bahasa Surabaya	114
Aplikasi CSR	102
Promosi Investasi Digital - Pameran Virtual	123
Klinik investasi	123
inovasi kampung wisata kampung lawas maspati	122
Respon Time 7 Menit Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	128
Destinasi Wisata Sontoh Laut	128
Parade Seni Budaya Surabaya Virtual	106
Aplikasi Sistem Informasi Asemrowo Andalan, Santun, Inovatif dan Kreatif (SI ASIK)	128
SKM Online	118
SURABAYA MEMANGIL " SAWAHAN MENJAWAB "	117
Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Industri	123
Klinik Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM)	123
Sistem Informasi Program Layanan Masyarakat (SIMPROLAMAS)	120
SI RONDO (Sistem Informasi Registrasi Online Koridor)	111
Kampung Pendidikan Kampung'e Arek Suroboyo (KP KAS) 2019	123
Kampung Pendidikan Kampungé Arek Suroboyo (KP KAS) Tatanan Normal Baru 2020	136
Kelompok Masyarakat Sadar Wisata Bozem Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut	121
Job Fair Online	115
e-SPPT PBB	105
Gerdu Lawan Covid 19 Kecamatan Sukolilo	124
Pemeriksaan Laboratorium Virologi PCR (Polymerase Chain Reaction) pada Laboratorium Kesehatan Daerah	114
Kampung Wisata Religi	110
GRMS (Government Resources Management System)	127
e-SAKIP Kota Surabaya	116
e-Sidang	102
KAMPUNG TANGGUH WANI BANGKIT RW.04 KEL.WONOREJO	127
Wani Ngurus Izin	128
Aplikasi Lawan Covid	105

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Aplikasi Monev TIK (Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi)	111
Service and Operation Command Centre (Pusat Kendali Pelayanan dan Operasi) PDAM Surya Sembada Kota Surabaya	108
Tur Museum Online	106

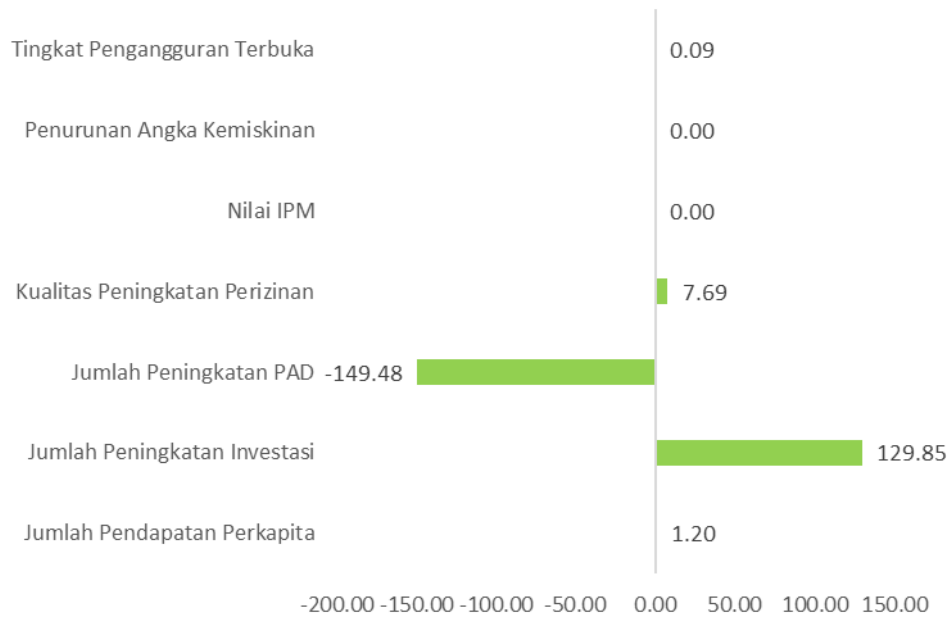
S. KOTA PASURUAN



Gambar 197. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Pasuruan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Pasuruan memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 64.0%. Artinya secara umum indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Infrastruktur, Hasil Kreatif, Output Pengetahuan dan Teknologi, Kecepatan Bisnis Proses, dan Kecanggihan Produk masih sangat rendah, yaitu 0.0% dimana secara umum capaian skor indikator - indikator pada variabel tersebut masih sangat rendah atau berada pada parameter 1.

1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



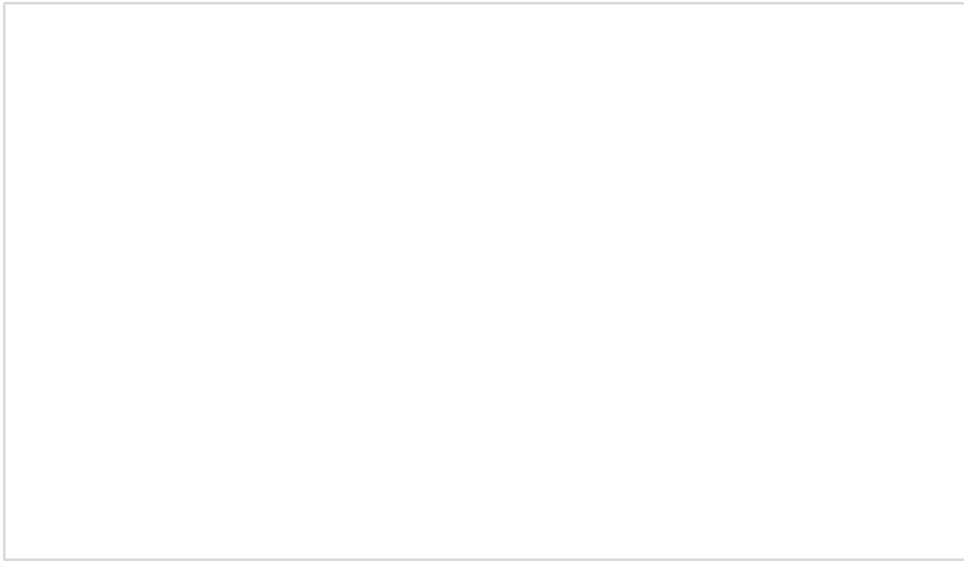
Gambar 198. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Pasuruan

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Pasuruan belum mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data menunjukkan adanya kenaikan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0.09% yang berarti bahwa pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka turun sebesar 0.09% dibandingkan tahun 2019. Namun hal ini belum sesuai dengan standar parameter indeks inovasi daerah yang naik sebesar 0.92% bagi jumlah pengangguran terbuka. Selanjutnya, indikator Penurunan Angka Kemiskinan sebesar 0.00% atau tetap, angka tersebut hampir mencapai dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya hanya naik 0.02%. Indeks Pembangunan Manusia juga tidak mengalami perubahan atau tetap yaitu sebesar 0.00% dimana nilai tersebut sama dengan standar nasional parameter indeks inovasi daerah sebesar 0% atau tetap. Selanjutnya, Kualitas Peningkatan Perizinan mengalami kenaikan yaitu sebesar 7.69% nilai tersebut sudah mencapai standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik sebesar 5%.

Pemerintah Kota Pasuruan juga mengalami kenaikan pada Jumlah Pendapatan Perkapita sebesar 1.20% dimana nilai tersebut sudah lebih baik dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah menunjukkan penurunan hanya sebesar 1.85%. Demikian pula dengan indikator Jumlah Peningkatan Investasi mengalami peningkatan sebesar 129.85% dimana nilai tersebut sudah lebih besar dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah seharusnya naik sebesar 5%. Terakhir, indikator Peningkatan PAD pada Kota Pasuruan menunjukkan penurunan sebesar 149.48%, yang berarti nilai tersebut masih jauh dari standar nasional parameter indeks inovasi daerah yang seharusnya naik 8%.

2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

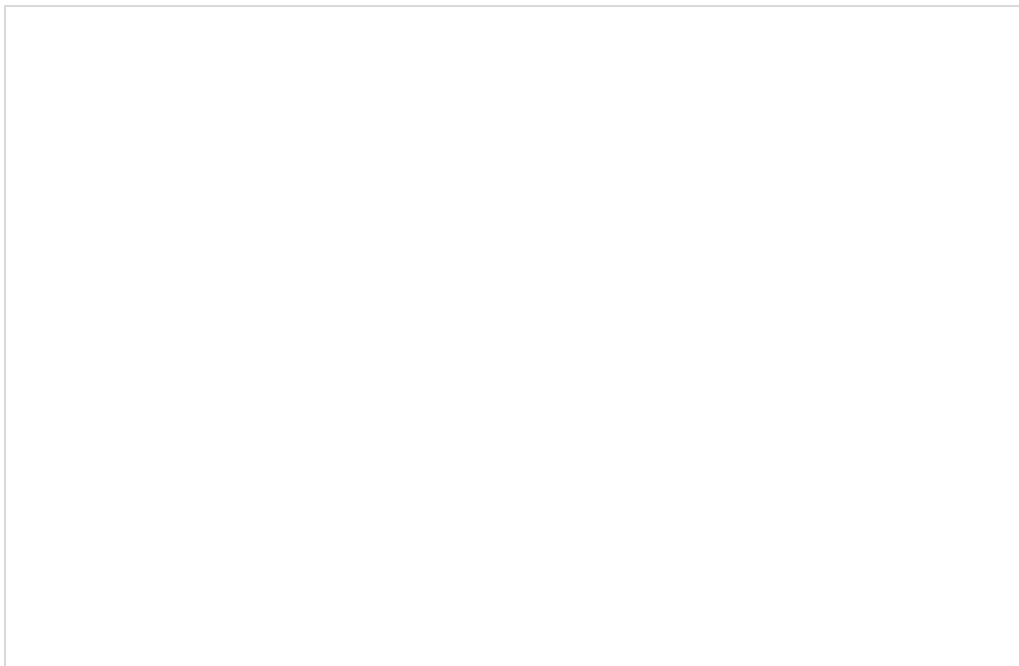
a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 199. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Pasuruan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, tidak ada inovasi yang dilaporkan oleh Kota Pasuruan.

b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

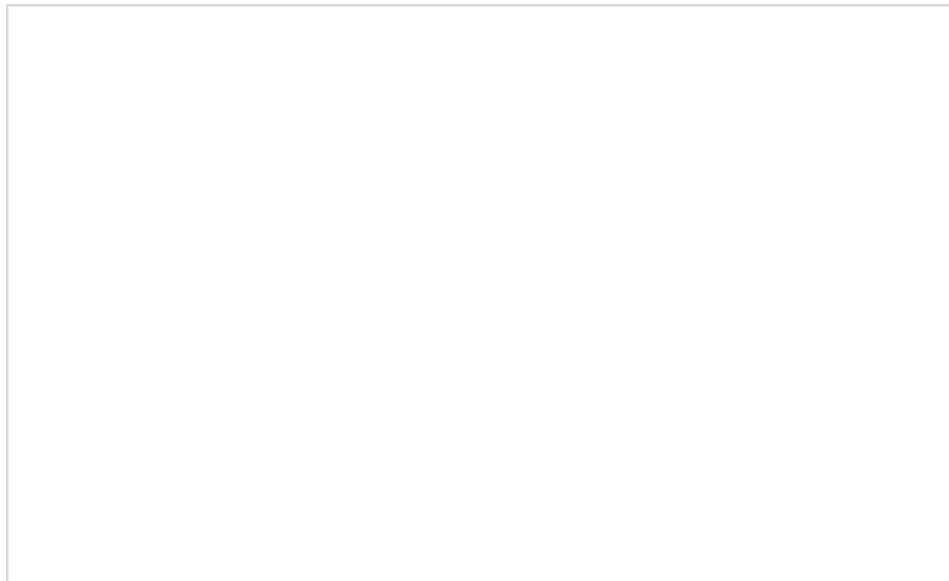


Gambar 200. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Pasuruan

Berdasarkan bentuk inovasi, tidak ada bentuk inovasi yang dilaporkan oleh Kota Pasuruan, baik itu inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan, dan inovasi daerah

lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan inovasi tata kelola pemerintah daerah.

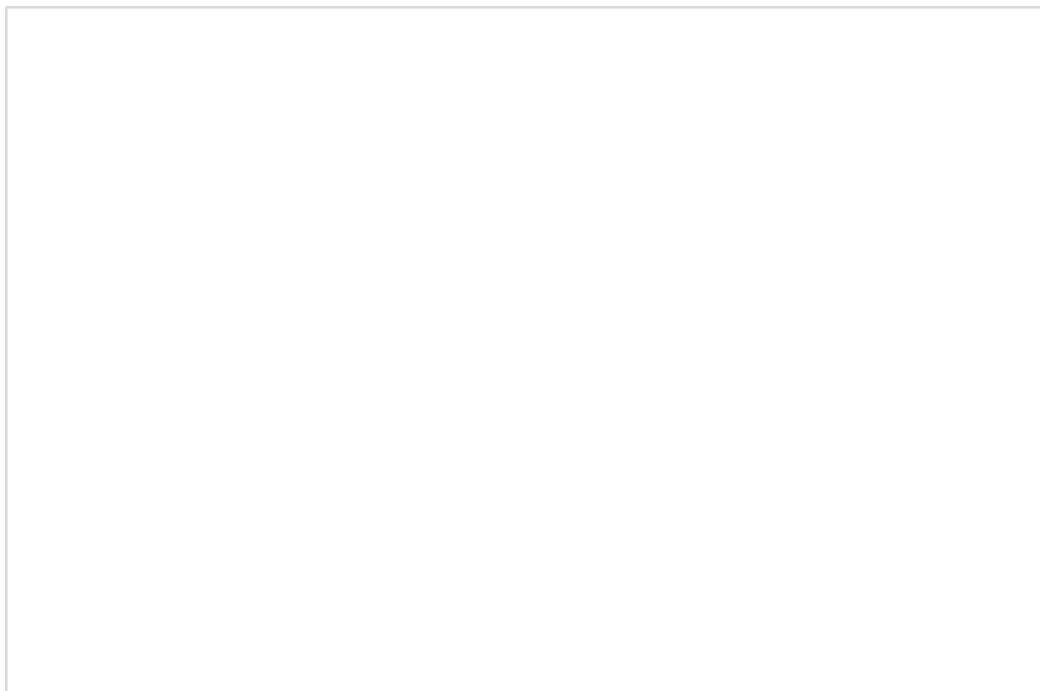
c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 201. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Pasuruan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, tidak ada inovasi daerah yang dilaporkan Kota Pasuruan.

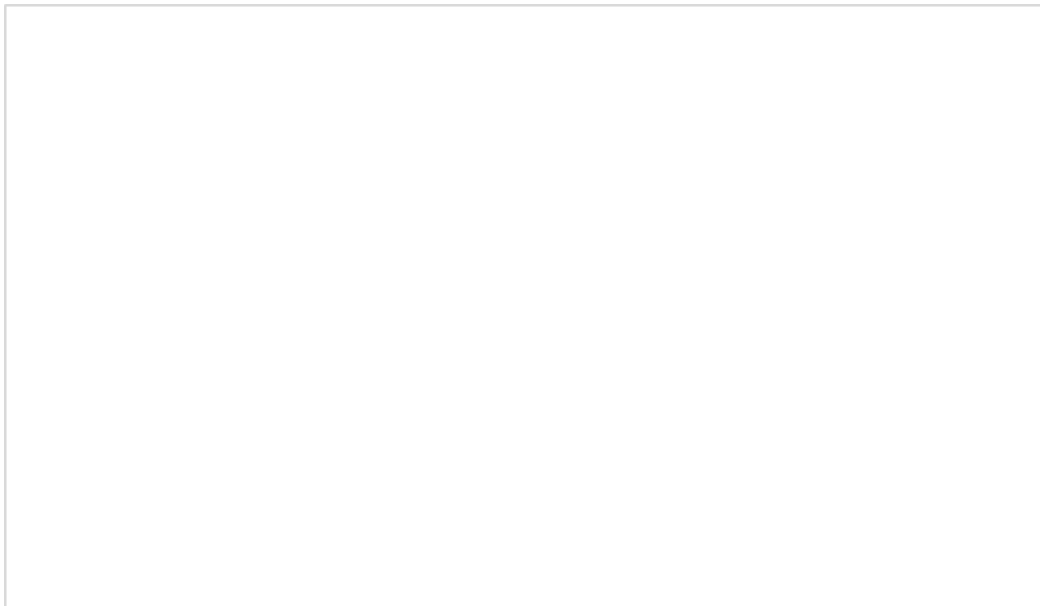
d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 202. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Pasuruan

Secara umum berdasarkan jumlah inovasi berdasarkan tahun dan jenis inovasi, tidak ada inovasi yang dilaporkan oleh Kota Pasuruan.

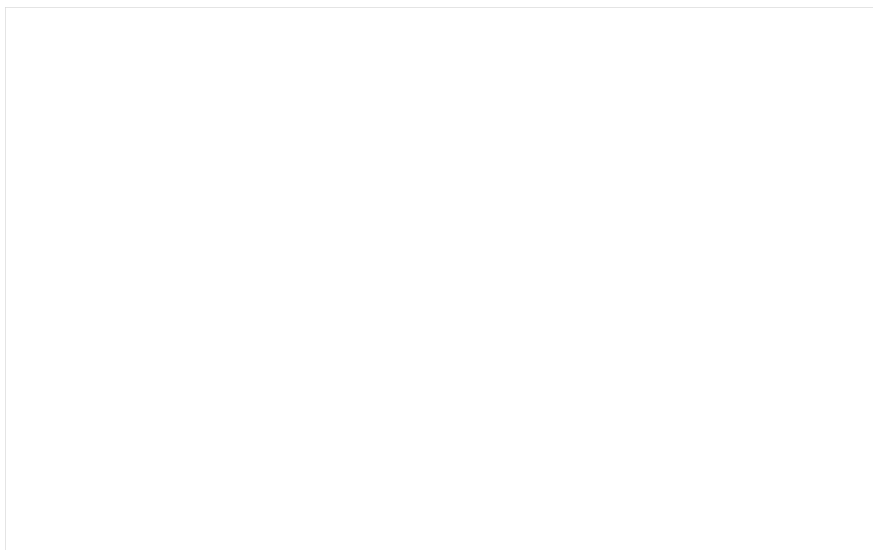
e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 203. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Pasuruan

Tidak ada inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Pasuruan pada tahun 2021 baik itu yang diinisiasi oleh perangkat daerah, Masyarakat, DPRD, ASN, dan Kepala Daerah.

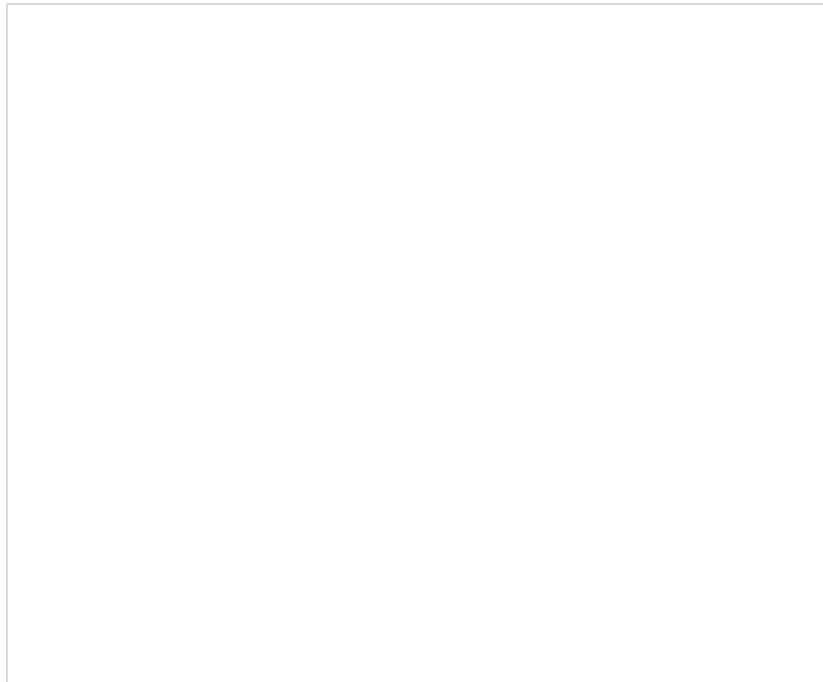
f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 204. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Pasuruan

Terkait jumlah inovasi berdasarkan urusan pemerintahan, tidak ada urusan inovasi yang dilaporkan Kota Pasuruan.

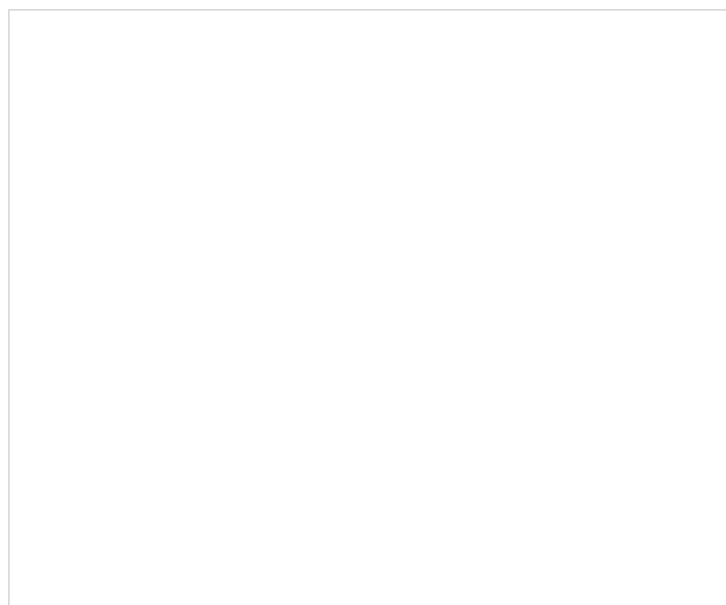
g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 205. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Pasuruan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, belum ada inovasi yang dilaporkan oleh Kota Pasuruan.

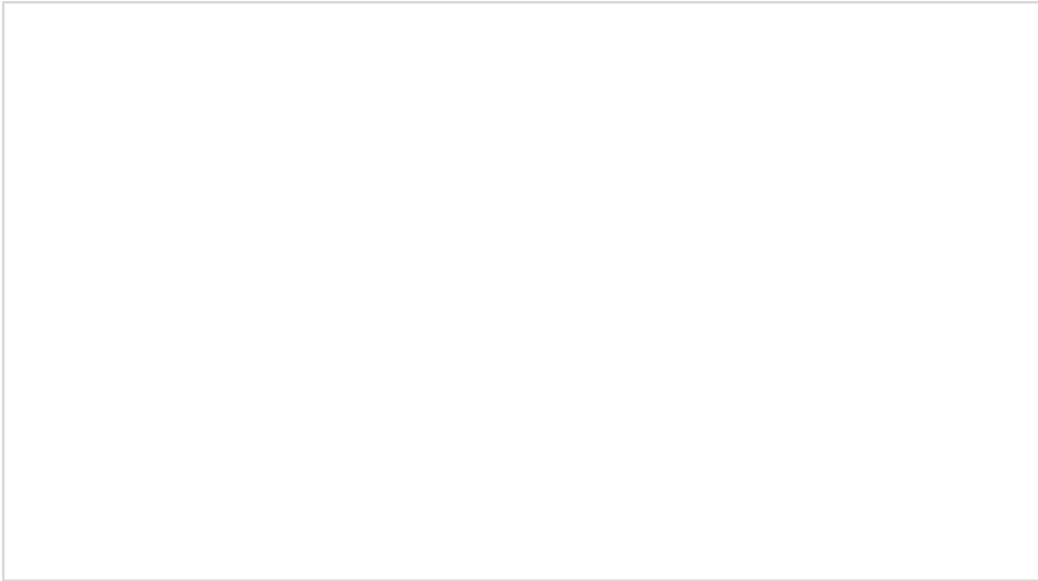
h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 206. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Pasuruan

Tingkat keterisian data pendukung dalam indeks inovasi daerah Kota Pasuruan masih kosong, hal ini dikarenakan belum ada inovasi yang dilaporkan Kota Pasuruan.

i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 207. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dari indikator satuan inovasi daerah, belum ada inovasi yang dilaporkan Kota Pasuruan.

j. Daftar Inovasi Kota Pasuruan Beserta Skor Kematangannya

Tabel 20. Daftar Inovasi Kota Pasuruan Beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN

The Page Left is Blank

BAB III

PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

3.1. Permasalahan Inovasi Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Timur

Fokus pembahasan pada bagian buku ini adalah rekomendasi pembinaan inovasi daerah di sebagian Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian Indeks Inovasi Daerah

NO	PEMERINTAH DAERAH	INDEKS INOVASI	KATEGORI
1	Kabupaten Pasuruan	10.72	Kurang Inovatif
2	Kabupaten Ponorogo	33.84	Inovatif
3	Kabupaten Probolinggo	44.70	Inovatif
4	Kabupaten Sampang	59.24	Inovatif
5	Kabupaten Sidoarjo	48.55	Inovatif
6	Kabupaten Situbondo	60.05	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Sumenep	50.38	Inovatif
8	Kabupaten Trenggalek	55.28	Inovatif
9	Kabupaten Tuban	56.73	Inovatif
10	Kabupaten Tulungagung	33.91	Inovatif
11	Kota Batu	24.46	Kurang Inovatif
12	Kota Blitar	53.21	Inovatif
13	Kota Kediri	55.03	Inovatif
14	Kota Madiun	52.99	Inovatif
15	Kota Malang	51.88	Inovatif
16	Kabupaten Mojokerto	45.31	Inovatif
17	Kota Pasuruan	13.60	Kurang Inovatif
18	Kota Probolinggo	61.51	Sangat Inovatif
19	Kota Surabaya	64.70	Sangat Inovatif

Perumusan rekomendasi tersebut mengacu pada pertama, skor dan predikat Kab/Kota berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun 2021; Kedua, kinerja inovasi daerah dilihat dari capaian pemda pada 5 variabel dalam Aspek Satuan Inovasi Daerah tahun 2021 .

Urgensi Aspek Satuan Inovasi Daerah untuk melihat kinerja inovasi daerah ialah bahwa didalamnya memuat variable input dan proses yang berkontribusi sebagai pendorong atau pengaktif inovasi daerah. Lain halnya dengan Aspek Satuan Pemerintah daerah yang bersifat makro sebagai hasil dan dampak dari inovasi daerah. Aspek Satuan Inovasi Daerah menunjukkan upaya pelebagaan inovasi daerah. Jika dicermati lebih lanjut Aspek Satuan Inovasi Daerah tersebut terdiri dari terdiri dari 5 variable dan 20 indikator. 5 Variabel tersebut adalah variable Infrastruktur, Output pengetahuan dan teknologi, Kecepatan bisnis proses, Kecanggihan produk dan Hasil kreatif. Variabel input dan proses yang merupakan variabel pengaktif atau pendorong inovasi daerah yang di breakdown ke dalam 20 indikator.

Persoalan inovasi daerah pada kabupaten kurang inovatif di Provinsi Jawa Timur perlu ditindak lanjuti dengan cara melakukan identifikasi, apakah terletak pada minimnya inovasi ataukah pada teknis pelaporan. Data statistic pada bab dua merupakan data yang menunjukkan capaian inovasi daerah di beberapa Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur berdasarkan pelaporan inovasi daerah pada aplikasi indeks inovasi daerah dengan tahun penerapan 2019 dan 2020.

3.2. Rekomendasi secara Umum

Untuk Menumbuhkembangkan ekosistem Inovasi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menerapkan strategi secara cermat agar Inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan (OECD, 2021). Strategi yang dapat ditempuh untuk menghasilkan inovasi daerah adalah sebagai berikut;

1. **Memperkuat kepemimpinan dan budaya organisasi.** Kepemimpinan yang kuat akan mampu memberikan visi strategis yang diperlukan untuk menjadi ujung tombak inovasi daerah. Pemimpin di daerah perlu mempromosikan inovasi secara terbuka. Gaya kepemimpinan di daerah termasuk tingkat OPD harus berkembang agar dapat membangun tim yang gesit, dan membangun *platform* untuk menghasilkan ide yang mendukung inovasi daerah. Strategi yang dapat dilakukan oleh daerah misalnya menerbitkan perda yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan inovasi di daerah.
2. **Memperluas jejaring atau kemitraan dan memperkuat kolaborasi.** Kontribusi Jaringan dan kemitraan dalam menyebar luaskan inovasi merupakan modal penting untuk mencapai kesuksesan inovasi daerah karena tautan ke organisasi lain dapat memberikan akses ke keterampilan, dukungan, dan sarana untuk mempraktikkan ide dan, pada saat yang sama, dapat menghubungkan aktor di berbagai tingkat pemerintahan. Oleh karena itu penting bagi daerah untuk meningkatkan kapasitasnya dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai aktor di luar sektor publik (yaitu bisnis, lembaga *think tank*, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, dan aktor strategis lainnya) untuk menemukan ide serta mengembangkan inovasi daerah, demi kemanfaatan kolektif;
3. **Kemampuan organisasi yang inovatif, adaptif dan fleksibel.** Strategi inovasi yang jelas adalah dasar untuk mencapai inovasi yang sukses; sehingga harus adaptif, jelas dan dengan narasi yang menarik. Organisasi perlu membangun kapabilitas untuk mendukung inovasi melalui perencanaan dan pengalokasian sumber daya dengan cermat. Langkah tersebut didasarkan pada adanya biaya langsung dalam rangka menghasilkan inovasi misalnya pelatihan, sistem informasi dan infrastruktur (sarana dan prasarana). Inovasi juga perlu didukung dengan kompetensi ASN agar dapat berfikir lebih kreatif, memastikan sumber keuangan dan keahlian yang diperlukan untuk mendukung dan mendorong inovasi, memiliki strategi untuk manajemen risiko serta peraturan yang mendukung budaya inovasi. strategi yang dapat dilakukan ialah membentuk tim yang dapat memperkuat inovasi daerah, menyiapkan manajemen SDM yang kompeten.
4. **Pengaturan tata kelola pemerintahan yang kondusif.** Daerah perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mendorong inovasi diantaranya peningkatan partisipasi publik,

akuntabilitas pemerintah, dan kualitas peraturan di daerah;. Strategi yang dapat ditempuh adalah mempromosikan kebijakan inovasi di semua lini.

5. **Sistem insentif dan penghargaan.** Dalam mendorong Inovasi Daerah perlu disertai dengan pengakuan dan penghargaan terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam inovasi tersebut. Daerah perlu menyiapkan mekanisme yang kuat untuk mempertahankan budaya inovasi melalui pengakuan kepada individu atau organisasi yang menghasilkan inovasi, serta mengadakan kompetisi inovasi secara luas.
6. Bersinergi dalam pelestarian dan peningkatan performa inovasi demi kemanfaatan bersama.
7. Mendorong peran provinsi dalam melakukan fungsi pembinaan inovasi daerah.
8. Melakukan identifikasi terhadap persoalan mendasar di daerah kurang inovatif, pertama:memang minim inovasi (inovasi minim, pelaporan minim); kedua, menunjukkan adanya kendala teknis pelaporan (inovasi ada, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dilengkapi data dukung).

3.3. Rekomendasi Terhadap Daerah Berpredikat Inovatif

Komitmen berinovasi pada Kabupaten/Kota berpredikat inovatif perlu terus ditingkatkan. Jaring-laba-laba yang disajikan dalam bab dua menunjukkan kinerja atau capaian inovasi pada setiap variabelnya. Identifikasi variable yang masih perlu dioptimalkan pada jaring laba-laba tersebut diperlukan untuk mengambil langkah percepatan pemenuhan indikator-indikator pada variabel tersebut.

Berikut ini merupakan tabel capaian variable yang masih perlu dioptimalkan karena masih kurang dari 60% dalam Aspek Satuan Inovasi Daerah pada kabupaten/kota berpredikat inovatif di beberapa Kabupaten/ Kota wilayah Provinsi Jawa Timur hasil pengukuran tahun 2021, yaitu.

Tabel 22. Capaian Variabel Kurang dari 60% Aspek Satuan Inovasi Daerah pada daerah Berpredikat Inovatif di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

NO	PEMERINTAH DAERAH	INDEKS INOVASI	CAPAIAN VARIABEL KURANG DARI 60%
1.	Kabupaten Ponorogo	33.84	-
2.	Kabupaten Probolinggo	44.70	Infrastruktur
3.	Kabupaten Sampang	59.24	-
4.	Kabupaten Sidoarjo	48.55	-
5.	Kabupaten Sumenep	50.38	Kecanggihan Produk
6.	Kabupaten Trenggalek	55.28	-
7.	Kabupaten Tuban	56.73	-
8.	Kabupaten Tulungagung	33.91	Kecanggihan produk
9.	Kota Blitar	53.21	-
10.	Kota Kediri	55.03	-
11.	Kota Madiun	52.99	-
12.	Kota Malang	51.88	-
13.	Kabupaten Mojokerto	45.31	-

Sumber: Indeks Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri 2021

Berdasarkan kondisi di atas, sebagian besar daerah yang inovatif telah mampu menunjukkan pencapaian variable di atas 60%. Optimalisasi yang perlu dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rekomendasi Strategi Untuk Meningkatkan Capaian Variabel

Variabel	Kabupaten/ Kota	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	1. Kab. Probolinggo	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah dengan perda atau Perkada sesuai ketentuan yang berlaku
		Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan Inovasi
		Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
		Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
		Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	<ul style="list-style-type: none"> • koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran • menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
		Kecanggihan produk	1. Kab. Sumenep 2. Kab. Tulungagung
Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain		
Kecepatan	mengupayakan pembuatan		

		penciptaan inovasi	inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
--	--	--------------------	---

3.4. Rekomendasi terhadap Daerah Berpredikat Kurang Inovatif

Diantara daerah berpredikat kurang inovatif di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, dan Kota Pasuruan, dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 24. Capaian Variable Kurang dari 60% Aspek Satuan Inovasi Daerah pada daerah Berpredikat Kurang Inovatif di Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, dan Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

No	Pemerintah Daerah	Indeks Inovasi	Capaian Variabel kurang dari 60%
1	Kabupaten Pasuruan	10.72	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Variabel
2	Kota Batu	24.46	<ul style="list-style-type: none"> Kecanggihan Produk Kecepatan Bisnis Proses
3	Kota Pasuruan	13.60	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Variabel

Tabel 25. Rekomendasi Strategi Untuk Meningkatkan Capaian Variabel

Variabel	Kabupaten/ Kota	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
Infrastruktur	1. Kabupaten Pasuruan 2. Kota Pasuruan	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah dengan perda atau Perkada sesuai ketentuan yang berlaku
		Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan Inovasi
		Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
		Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
		Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola

Variabel	Kabupaten/ Kota	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
			inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	<ul style="list-style-type: none"> koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
Output Pengetahuan dan teknologi	1. Kabupaten Pasuruan 2. Kota Pasuruan	Keterlibatan aktor inovasi	<ul style="list-style-type: none"> memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan
		Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
		Jejaring inovasi	<ul style="list-style-type: none"> bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
Kecepatan Bisnis Proses	1. Kabupaten Pasuruan 2. Kota Batu 3. Kota Pasuruan	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
		Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
		Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
		Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> menyosialisasikan layanan

Variabel	Kabupaten/ Kota	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
		layanan pengaduan	<p>pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat,</p> <ul style="list-style-type: none"> tanggap menindaklanjuti aduan yang ada menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan
Kecanggihan produk	<ol style="list-style-type: none"> Kabupaten Pasuruan Kota Batu Kota Pasuruan 	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
		Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
		Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
Hasil Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> Kabupaten Pasuruan Kota Pasuruan 	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> melakukan monev inovasi secara berkala membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi
		Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Dalam mengoptimalkan pelaporan inovasi daerah melalui aplikasi indeks inovasi daerah diperlukan kapabilitas ASN utamanya pada OPD yang menaungi Inovasi Daerah dalam manajemen data. Kementerian dalam Negeri telah menyediakan buku panduan yang dapat diakses secara terbuka oleh publik untuk memudahkan teknis pelaporan inovasi Daerah.

